



TERAKREDITASI SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

KONSERVATISME AKUNTANSI DAN KONFLIK *BONDHOLDER-SHAREHOLDER* PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Moh. Nasih dan Robith Hudaya

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KEPERCAYAAN PADA SUPERVISOR, DAN PERILAKU IDEAL KEWARGAAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERAWAT

Muhammad Cholil

PENGARUH KRITERIA MISKIN TERHADAP PILIHAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Djoko Susanto

PENGARUH KAPABILITAS MANAJERIAL PARA MANAJER PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI

Oding Supriadi

SUMBER PEMBIAYAAN PEDAGANG DI SALATIGA

Birgitta Dian Saraswati, Sotyia Fevriera, dan Sally Dwijayanti

KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Baldric Siregar



Rp7.500,-

JAM	VOL. 22	NO. 3	Hal 193-275	DESEMBER 2011	ISSN: 0853-1259
-----	---------	-------	-------------	---------------	-----------------

Vol. 22, No. 3, Desember 2011

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN (JAM)

TERAKREDITASI
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

EDITOR IN CHIEF

Djoko Susanto
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL BOARD MEMBERS

Baldric Siregar
STIE YKPN Yogyakarta

Harsono
Universitas Gadjah Mada

Dody Hapsoro
STIE YKPN Yogyakarta

Soeratno
Universitas Gadjah Mada

Eko Widodo Lo
STIE YKPN Yogyakarta

Wisnu Prajogo
STIE YKPN Yogyakarta

MANAGING EDITORS

Sinta Sudarini dan Enny Pudjiastuti
STIE YKPN Yogyakarta

EDITORIAL SECRETARY

Rudy Badrudin
STIE YKPN Yogyakarta

PUBLISHER

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1406 Fax. (0274) 486155

EDITORIAL ADDRESS

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat STIE YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 Fax. (0274) 486155
<http://www.stieykpn.ac.id> • e-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id
Bank Mandiri atas nama STIE YKPN Yogyakarta No. Rekening 137 – 0095042814

Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM) terbit sejak tahun 1990. JAM merupakan jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Yayasan Keluarga Pahlawan Negara (STIE YKPN) Yogyakarta. Penerbitan JAM dimaksudkan sebagai media penguangan karya ilmiah baik berupa kajian ilmiah maupun hasil penelitian di bidang akuntansi dan manajemen. Setiap naskah yang dikirimkan ke JAM akan ditelaah oleh MITRA BESTARI yang bidangnya sesuai. Daftar nama MITRA BESTARI akan dicantumkan pada nomor paling akhir dari setiap volume. Penulis akan menerima lima eksemplar cetak lepas (*off print*) setelah terbit.

JAM diterbitkan setahun tiga kali, yaitu pada bulan April, Agustus, dan Desember. Harga langganan JAM Rp7.500,- ditambah biaya kirim Rp12.500,- per eksemplar. Berlangganan minimal 1 tahun (volume) atau untuk 3 kali terbitan. Kami memberikan kemudahan bagi para pembaca dalam mengarsip karya ilmiah dalam bentuk *electronic file* artikel-artikel yang dimuat pada JAM dengan cara mengakses artikel-artikel tersebut di *website* STIE YKPN Yogyakarta (<http://www.stieykpn.ac.id>).

DAFTAR ISI
TERAKREDITASI
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

**KONSERVATISME AKUNTANSI DAN KONFLIK *BONDHOLDER-SHAREHOLDER* PADA PERUSAHAAN
NON KEUANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA**

Moh. Nasih dan Robith Hudaya

193-202

**PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KEPERCAYAAN PADA SUPERVISOR,
DAN PERILAKU IDEAL KEWARGAAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERAWAT**

Muhammad Cholil

203-216

**PENGARUH KRITERIA MISKIN TERHADAP PILIHAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

Djoko Susanto

217-234

**PENGARUH KAPABILITAS MANAJERIAL PARA MANAJER PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS
PEMBELAJARAN AKUNTANSI**

Oding Supriadi

235-246

SUMBER PEMBIAYAAN PEDAGANG DI SALATIGA

Birgitta Dian Saraswati, Sotya Fevriera, dan Sally Dwijayanti

247-255

**KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH PEMEGANG
SAHAM PENGENDALI**

Baldric Siregar

257-275

Vol. 22, No. 3, Desember 2011

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

MITRA BESTARI
JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN (JAM)
TERAKREDITASI
SK. Nomor: 64a/DIKTI/Kep/2010

Editorial JAM menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada MITRA BESTARI yang telah menelaah naskah sesuai dengan bidangnya. Berikut ini adalah nama dan asal institusi MITRA BESTARI yang telah melakukan telaah terhadap naskah yang masuk ke editorial JAM untuk Vol. 22, No. 1, April 2011; Vol. 22, No. 2, Agustus 2011; dan Vol. 22, No. 3, Desember 2011.

Ade Fatma Lubis

Universitas Sumatra Utara

Abdul Hamid Habbe

Universitas Hasanuddin

Agus Suman

Universitas Brawijaya

Basu Swastha Dharmmesta

Universitas Gadjah Mada

Bambang Sutopo

Universitas Sebelas Maret

Edy Suandi Hamid

Universitas Islam Indonesia

Sugiyanto

Universitas Diponegoro

Gagaring Pagalung

Universitas Hasanuddin

Wahyuddin

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Hartono

Universitas Sebelas Maret

J. Sukmawati Sukamulja

Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Niki Lukviarman

Universitas Andalas

Ritha Fatimah Dalimunthe

Universitas Sumatra Utara

Tandelilin Eduardus

Universitas Gadjah Mada

KONSERVATISME AKUNTANSI DAN KONFLIK BONDHOLDER-SHAREHOLDER PADA PERUSAHAAN NON KEUANGAN TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

Moh. Nasih dan Robith Huda

Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Airlangga
Jalan Airlangga Nomor 4, Surabaya 60286
Telepon +62 31 5036584, Fax. +62 31 5026288
E-mail: mhnasih@yahoo.com

ABSTRACT

This study is intended to test the agency theory by analyzing possible influence of accounting conservatism, institutional ownership and managerial ownership to bondholder shareholder conflicts in the non-financial companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2007 to 2009. The data is documented from the Indonesian Capital Market Directory (ICMD) and analyzed using multiple regression analysis by significance level of 5%. The results of the analysis proved that simultaneously, shareholder bondholder conflict is influenced by accounting conservatism, institutional ownership and managerial ownership by $F = 4.421 (> 4)$. Partially, of the three hypothesized variables that affect conflict, only two variables involved which accounting conservatism and institutional ownership with t each 2.609 and 2.355 (> 2). Managerial ownership does not affect the conflict ($t = 0.472 < 2$). The results of this study are generally managed to confirm the agency theory which explains that the parties involved in the management of companies namely Investor, Management, and Bondholder has their own interests and seek to maximize those interests. To prevent counter-productive conflicts, it would require a variety of mechanisms including the application of conservative accounting and through institutional ownership.

Keywords: agency theory, bondholder-shareholder conflict, conservative accounting, institutional ownership, managerial ownership

PENDAHULUAN

Sesuai dengan teori agensi, lazimnya konflik terjadi antara prinsipal atau pemilik dengan agensi atau manajemen. Konflik *bondholder shareholder* berbeda dengan konflik agensi tersebut. Konflik terjadi karena adanya perbedaan kepentingan tentang pembayaran dividen. *Shareholder* menuntut perusahaan membagikan dividen yang tinggi sebagai hasil investasinya. Sebaliknya, *bondholder* menuntut perusahaan untuk tidak membayarkan dividen berlebihan agar tersedia jaminan/aset cukup untuk pembayaran utang. *Shareholder* melalui serta bersama-sama dengan manajemen juga memiliki insentif untuk melakukan transfer kesejahteraan melalui pembayaran dividen. Kondisi tersebut menyebabkan *bondholder* kehilangan jaminan pelunasan utang yang berpotensi meningkatkan risiko tidak terbayar sehingga akan memperbesar potensi konflik *bondholder shareholder*. Menurut Ahmed *et al.* (2002) dan Sari (2004), untuk mengefektifkan kontrak hutang, *bondholder* mensyaratkan perusahaan yang berhadapan dengan

konflik *bondholder shareholder* menggunakan akuntansi konservatif. Konservatisme akuntansi dapat membatasi pembayaran dividen yang dilakukan manajemen, kecuali dalam kondisi pembayaran dividen sangat rendah. Menurut Hille (2011), dalam kondisi pembayaran dividen rendah, penggunaan akuntansi konservatif tidak berpengaruh dan atau mampu mengatasi konflik *bondholder shareholder*. Penggunaan akuntansi konservatif ditandai dengan munculnya akrual negatif yang dihasilkan dari penundaan pengakuan pendapatan dan mempercepat pengakuan kerugian (Givoly dan Hayn, 2000). Perusahaan akan lebih cepat mengakui biaya-biaya dan menunda pengakuan terhadap pendapatan-pendapatan. Akibatnya nilai perusahaan turun karena rendahnya laba dan berpengaruh pada keterbatasan fleksibilitas pendanaan (Lee, 2010).

Menurut teori konservatisme, akuntan harus melaporkan nilai terendah dari beberapa nilai yang mungkin untuk aktiva dan pendapatan serta nilai tertinggi untuk kewajiban dan beban. Akuntansi konservatif bermanfaat untuk mengatasi permasalahan keagenan berkait keputusan investasi manajer, meningkatkan efisiensi kontrak utang, fasilitasi pengawasan kontrak, dan mengurangi biaya pemeriksaan (Lara *et al.*; 2007 dan Ahmed *et al.*; 2002). Konservatisme berperan dengan melaporkan laba yang rendah sehingga dapat menekan insentif manajer dan *shareholder* untuk melakukan transfer kesejahteraan dengan cara pembagian dividen berlebih. *Bondholder* juga akan meminta perusahaan menggunakan akuntansi konservatif ketika konflik *bondholder shareholder* semakin tinggi.

Kepemilikan manajerial, sebagai salah satu manifestasi dari tata kelola yang baik, diharapkan dapat membatasi tindakan oportunistik manajer dan *shareholder* untuk memaksimalkan kepentingannya. Dengan demikian, konflik *bondholder shareholder* dapat direduksi. Dukungan kepemilikan manajerial terhadap penggunaan akuntansi konservatif dapat menekan konflik *bondholder shareholder*. Menurut teori struktur kepemilikan perusahaan, manajer dan pemegang saham memiliki kepentingan yang sama terhadap nilai perusahaan dan bertentangan dengan kepentingan *bondholder*. Oleh karena itu, mereka cenderung memaksimalkan kesejahteraannya dengan melakukan transfer kesejahteraan dari *bondholder*.

Menurut teori kontrak utang, untuk membatasi adanya transfer kesejahteraan dan menyelaraskan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan, maka perlu adanya mekanisme kontrak utang. Mekanisme kontrak yang efisien menekankan pada penggunaan kebijakan akuntansi konservatif. Ahmed *et al.* (2002) berpendapat bahwa kontrak akan lebih efektif dengan menggunakan akuntansi konservatif. Midastry dan Mas'ud (2003) juga menyimpulkan bahwa bahwa konflik dapat diatasi dengan meningkatkan kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan dan atau pertanyaan penelitian apakah konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara bersama-sama berpengaruh terhadap terjadinya konflik *bondholder shareholder* dan apakah konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh terhadap terjadinya konflik *bondholder shareholder*.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Sesuai dengan teori keagenan, pada setiap perusahaan terdapat hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (prinsipal) dengan pihak yang menerima wewenang (agensi) dalam bentuk kontrak kerja. Menurut Jensen dan Meckling, (1976), *agency theory concerning the relationship between a principal (shareholder) and an agent of the principal (company's managers)*. *Agency theory is a very academic term. Essentially it involves the costs of resolving conflicts between the principals and agents and aligning interests of the two groups*. Teori agensi mengasumsikan semua individu bertindak atas kepentingannya *shareholder* yang diasumsikan hanya tertarik kepada hasil investasinya yang bertambah dalam perusahaan. *Bondholder* tertarik kepada pelunasan utangnya. Agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Baik prinsipal maupun agen berusaha memperbesar keuntungannya sendiri. Prinsipal menginginkan pengembalian yang besar atas investasinya dan pelunasan utang tepat waktu, di mana salah satunya terlihat dengan kenaikan porsi dividen dari tiap saham yang dimiliki. Agen menginginkan kepentingannya

diakomodir dengan pemberian kompensasi, bonus, insentif, dan remunerasi yang besar atas kinerjanya dalam mengelola perusahaan.

Prinsipal perlu menilai kinerja agen dalam penentuan pemberian kompensasi, bonus, insentif, dan remunerasi. Prinsipal menilai prestasi agen berdasarkan kemampuannya memperbesar laba untuk dialokasikan pada pembagian dividen. Semakin tinggi laba, harga saham, dan dividen, maka agen dianggap memiliki kinerja baik sehingga layak mendapat kompensasi tinggi. Apabila tidak ada pengawasan yang memadai, maka agen dapat berperilaku oportunistik dengan memanipulasi kondisi keuangan seolah-olah perusahaan mencapai target sesuai harapan prinsipal (Midiastuty dan Mas'ud, 2003). Akibatnya terjadi *creative accounting* yang menyalahi aturan, seperti adanya piutang yang tidak mungkin tertagih yang tidak dihapuskan, *capitalisasi expense* tidak semestinya, pengakuan penjualan tidak semestinya yang berdampak pada besarnya nilai aktiva dalam neraca yang dapat mempercantik laporan keuangan walaupun bukan nilai yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan asimetri informasi antara *stakeholders* dengan manajemen.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), terdapat tiga macam sumber pendanaan, yaitu *inside equity*, *outside equity*, dan *debt*. Total nilai pasar ekuitas adalah $S = S_i + S_o$ dan total nilai pasar dari perusahaan adalah $V = (S_i + S_o) + B$. Dengan mengasumsikan nilai V tetap, maka semakin besar nilai B (utang) maka nilai ekuitas pemegang saham yang dilambangkan dengan $S_i + S_o$ akan semakin kecil. Oleh karena itu, potensi terjadinya transfer kesejahteraan dari B ke $S_i + S_o$ akan semakin besar dan mengakibatkan tingginya biaya keagenan. Untuk membatasi transfer kesejahteraan tersebut perlu adanya mekanisme kontrak hutang.

Pada perusahaan skala kecil, kebutuhan untuk memperoleh pendanaan dari utang relatif sangat kecil. Oleh karena itu, kepemilikan perusahaan sepenuhnya ada di tangan *shareholder* sehingga tidak mungkin terjadi konflik. Konflik *bondholder shareholder* timbul saat perusahaan mencari pendanaan dari utang. Konflik berpotensi timbul karena pembayaran dividen yang terlalu tinggi menyebabkan ancaman bagi *bondholder* karena dapat mengurangi aktiva untuk pelunasan utang. Almilia (2007) berpendapat, utang memberikan insentif bagi manajer dan *shareholder* untuk melakukan

tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai perusahaan, melalui keputusan-keputusan pendanaan dengan cara pembayaran dividen. Manajer dan *shareholder* juga dapat menguntungkan dirinya sendiri dengan cara menggunakan kekuasaannya untuk memaksa perusahaan membayar dividen dan menggunakan alasan mencari tambahan pendanaan dari luar yang lebih besar (La Porta *et al.*, 2000). Mengacu pada teori agensi yang mengasumsikan masing-masing pihak berkonflik untuk memaksimalkan kepentingannya, maka semakin besar kepemilikan manajerial maupun institusional berarti semakin besar konflik *bondholder shareholder* karena adanya usaha memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk memperoleh dividen.

Konflik *bondholder shareholder* terjadi karena perbedaan kepentingan mengenai kebijakan pembayaran dividen akibat adanya pendanaan investasi dari hutang. *Bondholder* meminta perusahaan untuk tidak membayarkan dividen berlebih agar tersedia kecukupan aktiva minimum untuk pembayaran utang, sedang *shareholder* menuntut adanya pembayaran dividen terus menerus dan jumlahnya besar (Ahmed *et al.*, 2002; dan Sari, 2004). Dua bentuk hubungan keagenan yang terpengaruh oleh kebijakan dividen adalah hubungan pemegang saham-kreditur dan hubungan manajer-pemegang saham.

Dalam konflik *bondholder shareholder*, diasumsikan *shareholder* memilih dan mengangkat, mengkompensasi dan memecat manajer, sehingga dianggap efisien untuk menyamakan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham (Haryono, 2005). *Shareholder* dapat memaksa manajemen perusahaan membayar dividen yaitu dengan memilih pejabat dalam perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen sesuai harapan *shareholder* dan menggunakan alasan mencari tambahan pendanaan dari luar yang lebih besar sehingga perusahaan secara terus menerus membayarkan dividen untuk menarik investasi masuk (La Porta *et al.*, 2000).

Menurut Almilia (2007), utang memberikan insentif bagi manajer dan *shareholder* untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai utang dan memperbesar nilai ekuitasnya melalui keputusan-keputusan investasi dan keputusan-keputusan pendanaan. Keputusan investasi dapat mempengaruhi bagian manajer dan *shareholder* atas nilai perusahaan,

melalui mekanisme *dispersion effect*, dan *repayment effect*. Pada *dispersion effect*, jika terdapat 2 proyek investasi yang mempunyai dispersi yang berbeda, perbedaan dispersi tersebut akan mempengaruhi nilai pasar utang. Pengaruh dispersi terhadap nilai pasar utang disebabkan adanya perbedaan probabilitas *debt default*. Nilai pasar utang akan lebih besar bagi proyek investasi yang mempunyai dispersi yang lebih rendah.

Nilai perusahaan merupakan penjumlahan nilai utang dan nilai ekuitas, sehingga dengan nilai perusahaan tetap, kenaikan nilai hutang akan mengurangi nilai ekuitas. Nilai ekuitas menunjukkan bagian kesejahteraan manajer dan *shareholder*. Manajer dan *shareholder* cenderung memilih proyek investasi yang mempunyai dispersi yang besar (sehingga nilai utang turun). Manajer dan *shareholder* dapat melakukan transfer kesejahteraan dari *bondholder*, dengan menyatakan akan mengambil proyek yang dispersinya kecil, sehingga nilai utang yang diperoleh akan tinggi, tetapi kemudian manajer dan *shareholder* memilih proyek investasi yang dispersinya besar, sehingga manajer dan *shareholder* memperoleh tambahan kesejahteraan dari penurunan nilai utang tersebut.

Pada mekanisme *repayment effect*, *shareholder* menginginkan agar manajer memilih investasi yang menguntungkan meski beresiko tinggi. Jika investasi ini dipilih, maka resiko utang tidak dapat dilunasi semakin besar. Sebaliknya *bondholder* menginginkan manajer memilih investasi beresiko rendah untuk mengurangi resiko gagal bayar. Pemegang saham kurang menyukai investasi seperti ini karena tingkat pengembaliannya lebih kecil.

Kesejahteraan dapat ditransfer melalui 2 tipe aktivitas pendanaan yakni pembayaran dividen dan *reordering of financial claims*. Pembayaran dividen yang terlalu tinggi menyebabkan ancaman bagi *bondholder* karena mengurangi aktiva yang seharusnya tersedia untuk pelunasan utang. Meskipun dalam prosedurnya utang dibayar terlebih dahulu, *bondholder* tetap khawatir terhadap tindakan manajemen yang oportunistik yang dapat menyebabkan berkurangnya aktiva perusahaan untuk pelunasan utang. Pengeluaran sejumlah utang tambahan akan mentransfer kesejahteraan dari *bondholder* kepada manajer dan dalam proses tersebut akan timbul biaya-biaya yang mengurangi nilai perusahaan. Hal ini dapat

terjadi untuk pengeluaran utang tambahan yang mempunyai prioritas sama atau lebih tinggi dari hutang awal dan pengeluaran utang tambahan yang prioritasnya lebih rendah.

Terdapat beberapa cara dan sekaligus faktor yang diidentifikasi berpengaruh terhadap terjadinya konflik *shareholder bondholder*. Menurut Watt (2002), diperlukan adanya kontrak utang untuk mengatasi konflik, sedang menurut Begley dan Freedman (2004), diperlukan adanya batasan terhadap kebijakan pendanaan dan investasi. *Bondholder* pada umumnya menuntut penggunaan akuntansi konservatif terhadap kebijakan dividen untuk memastikan tidak adanya pemberian dividen berlebih dan distribusi aktiva. Penerapan akuntansi konservatif juga diidentifikasi berdampak pada penurunan konflik karena biaya keagenan akan semakin rendah (Kwon, 2005). Perusahaan yang berhadapan dengan tingginya konflik *bondholder shareholder* berkait kebijakan dividen cenderung menggunakan akuntansi konservatif (Ahmed *et al.*, 2002). Penggunaan akuntansi konservatif juga dapat meningkatkan efektivitas dari kontrak utang (Li dan Mehta, 2010). Tujuannya memastikan pembatasan pembayaran dividen, pengembalian pinjaman dan tersedianya aktiva untuk pelunasan utang. Pada sisi lain, Hille (2011), tidak menemukan hubungan antara konflik *bondholder shareholder* dengan konservatisme akuntansi yang diakibatkan pembayaran dividen rendah.

Selain konservatisme akuntansi, menurut Jensen dan Meckling (1976), kenaikan nilai utang *bondholder* akan menurunkan nilai ekuitas manajer dan *shareholder*. Manajer dan *shareholder* memiliki insentif untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurangi nilai utang dan memperbesar nilai ekuitas melalui keputusan-keputusan pendanaan. Utang mendorong manajer dan *shareholder* untuk melakukan transfer kesejahteraan dari *bondholder* melalui pembagian dividen (Almilia, 2007). Mengacu pada teori agensi yang mengasumsikan masing-masing pihak berkonflik untuk memaksimalkan kepentingannya, maka semakin besar kepemilikan manajerial berarti semakin besar konflik *bondholder shareholder* karena setiap manajer yang memiliki kepemilikan manajerial berusaha memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk memperoleh dividen. Kepemilikan manajerial dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan kepentingan

dalam permasalahan keagenan. Midiastuty dan Mas'ud (2003) membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konflik agensi, sedang Fauz dan Rosidi (2007) belum berhasil membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*. *Shareholder* dapat memaksa manajemen membayar dividen dengan memilih pejabat dalam perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen sesuai harapan *shareholder* (La Porta *et al.*, 2000).

Kepemilikan institusional juga diidentifikasi mempengaruhi konflik *bondholder shareholder*. Kepemilikan institusional berperan sebagai pengawas yang efektif terhadap manajemen perusahaan karena menguasai mayoritas saham dan memiliki sumber daya lebih besar dibandingkan dengan pemegang saham. Hartzell dan Starks (2003) menemukan bahwa institusi memiliki peranan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan berkait masalah agensi. *Shareholder* berperan dan mempunyai kewenangan memilih dan mengangkat, mengkompensasi, dan memecat manajer sehingga dianggap efisien untuk menyamakan tujuan manajer dengan tujuan pemegang saham. *Shareholder* institusional dapat memanfaatkan kapasitas yang dimilikinya untuk meningkatkan kesejahteraan pihaknya sendiri dengan mengabaikan pihak lain (Haryono, 2005).

Besarnya kepemilikan institusional memberikan tekanan kepada manajer yang ingin terlihat baik di depan pemegang saham dengan memperlihatkan kinerjanya. Salah satu cara agar kinerja manajer dianggap bagus dengan melunasi hutang perusahaan dan membagikan dividen terus menerus untuk menarik investasi masuk. *Shareholder* dapat memaksa manajemen membayar dividen dengan memilih pejabat dalam perusahaan yang menawarkan kebijakan dividen sesuai harapan *shareholder* dan menggunakan alasan mencari tambahan pendanaan dari luar yang lebih besar untuk menarik investasi masuk (La Porta *et al.*, 2000). Semakin besar kepemilikan institusional berarti semakin besar konflik *bondholder shareholder* karena investor institusional mengharapkan return yang tinggi dalam bentuk dividen dan *capital gain* (Jensen, 1986). Menurut Midiastuty dan Mas'ud (2003), berdasarkan hasil penelitiannya, kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konflik agensi yakni konflik yang terjadi antara *shareholder* dan *bondholder*.

Penelitian ini merupakan penelitian sebab akibat

(korelasional) yang dimaksudkan untuk menyelidiki kemungkinan adanya pengaruh antar variabel penelitian yang meliputi konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional dan konflik *bondholder shareholder*, serta mempelajari sejauh mana variasi suatu faktor berkaitan dengan variasi satu atau lebih faktor lain berdasarkan koefisien hubungan atau koefisien lainnya. Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data yang berasal dari laporan keuangan perusahaan yang bukan merupakan sektor keuangan di Bursa Efek Indonesia. Laporan keuangan perusahaan didokumentasikan dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Penelitian dilakukan atas perusahaan yang bukan termasuk sektor keuangan, membagikan dividen meskipun tidak berurutan dari tahun 2007 sampai tahun 2009, dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap periode tahun 2005 sampai tahun 2009. Total observasi dalam penelitian ini berjumlah 101. Analisis data dilakukan melalui analisis regresi berganda dengan taraf signifikansi 5%, sedang pembahasan dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduksi maupun induksi.

Variabel-variabel dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur berdasarkan teori tertentu. Konservatisme (KONS) merupakan sebuah tindakan penuh kehati-hatian yang dilakukan oleh perusahaan ketika menyusun laporan keuangan. Perusahaan yang menganut akuntansi konservatif, cenderung memiliki akrual negatif disebabkan laba bersih yang dihasilkan lebih kecil dari kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi. Akrual ini memiliki sifat *hidden reserve* dan akan berbalik menjadi akrual positif di masa mendatang. Untuk mempermudah perhitungan statistik, nilai akrual negatif dikali -1 sehingga nilainya menjadi positif. Konservatisme diukur dengan model pengukuran menurut Lara *et al.* (2007) dengan rumus:

$$KONS_{it} = \sum_{x=0}^2 \frac{NI_{i,t-x} + B.Dep_{i,t-x} - CFO_{i,t-x}}{T.Aktiva_{i,t-x}} x - 1$$

Keterangan:

- KONS_{it} = Konservatisme Akuntansi perusahaan i tahun t
 NI_{i,t-x} = Laba Bersih perusahaan i tahun sebelumnya

- B. $Dep_{i,t-x}$ = Beban depresiasi perusahaan i tahun sebelumnya
 CFO_{i,t-x} = Arus Kas operasional perusahaan i tahun sebelumnya
 T. Aktiva_{i,t-x} = Total aktiva perusahaan i pada tahun sebelumnya

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi di luar perusahaan. Pengukuran terhadap kepemilikan institusional melihat pada persentase saham, dimana membagi jumlah saham yang dimiliki pihak institusi dari luar perusahaan dengan total saham yang beredar. Rumus yang digunakan sesuai penelitian Midiastuty dan Mas'ud (2003):

Kepemilikan Institusional =

$$\frac{\text{Jumlah Saham Dimiliki Isitusi}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Kepemilikan Manajerial (MANOWN). Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan saham perusahaan oleh direksi maupun komisaris perusahaan. Kepemilikan manajerial diukur berdasarkan persentase saham yang dimiliki manajemen dengan rumus sebagaimana digunakan Midiastuty dan Mas'ud (2003) sebagai berikut:

Kepemilikan Manajerial =

$$\frac{\text{Jumlah Saham Dimiliki Manajerial}}{\text{Jumlah Saham Beredar}} \times 100\%$$

Konflik *Bondholder Shareholder* (KONF). Konflik ini terjadi disepertar kebijakan dividen perusahaan. *Bondholder* sebagai pihak yang memberi pinjaman kepada perusahaan menuntut agar perusahaan tidak membagikan dividen berlebihan diatas nilai yang telah ditentukan sedangkan *shareholder* menuntut agar perusahaan membagikan dividen yang besar. Konflik diukur menggunakan proksi tingkat pembayaran dividen dengan membagi dividen yang dibayarkan dengan total aktiva perusahaan. Jika perusahaan membayarkan dividen dengan level yang rendah, maka konsentrasi *bondholder* terhadap pembayaran dividen berkurang. Konflik diukur dengan menggunakan formula sebagaimana digunakan Ahmed *et al.* (2002) sebagai berikut:

Tingkat Pembayaran Dividen =

$$\frac{\text{Deviden Yang Dibayarkan}}{\text{Total Aktiva Perusahaan}} \times 100\%$$

HASIL PENELITIAN

Statistik deskriptif variabel penelitian yang meliputi konflik *bondholder shareholder*, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan konservatisme akuntansi nampak seperti pada Tabel 1. Konflik *bondholder shareholder* terjadi antara 0,07% sampai 33,57%, dengan rata-rata 4,28% dan standar deviasi 6,38%. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa 'tingkat' konflik tidak terlalu tinggi meskipun dengan rentang yang cukup lebar.

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Dev.</i>
KONF	101	,0007	,3357	,042814	,0638206
KONS	101	-,6355	,5198	-,024821	,2337807
MANO	101	,0000	,2561	,011600	,0392562
ONSO	101	,1232	,9900	,702187	,2061236
Valid N (<i>listwise</i>)	101				

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Konservatisme akuntansi perusahaan rata-rata -0,024 dengan konservatisme tertinggi 0,519 dan terendah -0,635 dan standar deviasi 0,233. Dilihat dari rata-ratanya yang negatif nampak perusahaan di Indonesia cenderung menggunakan akuntansi optimis, sebagai akronim dari konservatif. Kepemilikan manajerial rata-rata hanya 1,16% dan tertinggi 26%. Banyak perusahaan yang para manajernya tidak ikut memiliki perusahaan atau kepemilikan manajerial sebesar nol. Pada sisi lain, kepemilikan institusional terendah 12,32% dan tertinggi 99,00% dengan rata-rata 70,21%. Dua kondisi terakhir mengindikasikan bahwa tingkat kepemilikan manajerial perusahaan sangat rendah. Kepemilikan perusahaan justru mayoritas dipunyai oleh institusi-institusi.

Hasil analisis regresi mengindikasikan bahwa secara simultan variabel konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder* dengan $F = 4,421$ dan $Sig = 0,006$, sebagaimana nampak pada Tabel 2. Hasil analisis ini membuktikan bahwa hipotesis yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap konflik *bondholder*

shareholder.

Secara parsial, dari 3 variabel yang diajukan sebagai faktor berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*, hanya 2 variabel yang secara signifikan terbukti berpengaruh yakni kepemilikan institusional dan konservatisme akuntansi dengan nilai t masing-masing 2,355 (Sig 0,021) dan 2,609 (Sig 0,011), sedang variabel kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan ($t = 0,472$ dan $Sig = 0,638$), sebagaimana nampak pada Tabel 3. Dengan demikian, hipotesis yang menyatakan bahwa konservatisme akuntansi mempengaruhi konflik *bondholder shareholder* dan kepemilikan institusional mempengaruhi konflik *bondholder shareholder* terbukti. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial mempengaruhi konflik *bondholder shareholder* ditolak.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis nampak bahwa secara bersama-sama, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*. Hasil

Tabel 2
Pengaruh Simultan Variabel

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1 Regression	,049	3	,016	4,421	,006 ^a
Residual	,358	97	,004		
Total	,407	100			

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

a. Predictors: (Constant), KONSERV, INSOWN, MANOWN

b. Dependent Variable: KONFLIK

Tabel 3
Pengaruh Parsial Variabel

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>T</i>	<i>Sig.</i>
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1 (Constant)	-,008	,023		-,340	,735
MANOWN	,078	,165	,048	,472	,638
INSOWN	,073	,031	,237	2,355	,021
KONSERV	,069	,026	,251	2,609	,011

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah. a. Dependent Variable: KONFLIK

tersebut dapat mudah dipahami. Konservatisme mencerminkan sikap kehati-hatian manajemen dalam menyusun laporan keuangan, khususnya dalam kondisi yang penuh dengan ketidakpastian. Konservatisme mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang berpengaruh negatif terhadap kondisi keuangan perusahaan, tetapi tidak sebaliknya. Biaya-biaya dan atau kerugian yang mungkin akan timbul harus segera diakui. Sebaliknya, kemungkinan diperolehnya keuntungan atau pendapatan pada masa yang akan datang tidak boleh diakui sebelum keuntungan tersebut benar-benar terjadi.

Melalui konservatisme, suatu perusahaan akan terhindar dari kerugian besar pada masa-masa mendatang karena kerugian-kerugian tersebut telah diantisipasi dan diakui sebelumnya yakni dengan bersiap untuk tidak memperoleh keuntungan dan mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian. Kondisi tersebut akan menjamin para pihak yang bertransaksi atau sekurang-kurangnya mengikat perjanjian dengan perusahaan, karena laporan keuangan yang disajikan benar-benar menunjukkan kondisi yang sesungguhnya serta tidak mengelembungkan keuntungan yang menyesatkan terutama bagi investor luar atau *bondholder*. Di samping itu, konservatisme akan meredam terjadinya konflik yang disebabkan oleh kebijakan deviden. Konservatisme akan menekan pembagian deviden yang berlebih. *Bondholder* pada umumnya menuntut penggunaan akuntansi konservatif terhadap kebijakan deviden untuk memastikan tidak adanya pemberian deviden berlebih dan distribusi aktiva. Hasil penelitian ini berhasil mengkonfirmasi konsep dan atau penelitian sebelumnya. Kwon (2005) menyimpulkan bahwa penerapan akuntansi konservatif juga diidentifikasi berdampak pada penurunan konflik karena biaya keagenan akan semakin rendah. Menurut Ahmed *et al.* (2002), perusahaan yang berhadapan dengan tingginya konflik *bondholder shareholder* berkait kebijakan deviden cenderung menggunakan akuntansi konservatif untuk meredam atau mereduksinya. Li dan Mehta (2010) menyatakan bahwa penggunaan akuntansi konservatif juga dapat meningkatkan efektivitas dari kontrak utang.

Di samping konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional juga berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*. Hasil ini

mengkonfirmasi bahwa berdasarkan teori keagenan, dalam suatu perusahaan terdapat para pihak yakni *shareholder*, manajemen, dan *bondholder* yang mempunyai kepentingan yang berbeda dan bahkan saling berseberangan. Masing-masing pihak juga berusaha untuk memaksimalkan kepentingannya sehingga potensi terjadinya konflik sangat besar. Keberadaan *shareholder* institusi dipastikan akan memperkuat posisi tawar-menawar *shareholder*. Melalui kepemilikan institusional, kepemilikan (hak/suara) yang sebelumnya menyebar ke individu-individu sehingga relatif cair dan beragam menjadi berpadu dan padat. Dengan kekuatan yang semakin padu dan padat, usaha *shareholder* untuk memperjuangkan kepentingannya serta mengalirkan kesejahteraan sebanyak-banyaknya ke pihak *shareholder* akan semakin keras.

Shareholder juga akan semakin periksa untuk memaksa manajemen agar mengembangkan dan mengambil kebijakan-kebijakan, khususnya yang terkait dengan pembagian deviden, menjadi lebih *pro-shareholder*. Para manajer menjadi lebih *pro-shareholder*, baik suka maupun terpaksa, karena bagi manajer yang tidak *pro shareholder*, karirnya di perusahaan pasti terancam. Kondisi ini menyebabkan kepentingan *bondholder* akan tereduksi bahkan mungkin tereliminasi, sehingga konflik tidak mungkin dihindari dan bahkan semakin menjadi-jadi. Hasil penelitian ini sekaligus mengkonfirmasi pendapat Hartzell dan Starks (2003), Haryono (2005), La Porta *et al.* (2000), Jensen (1986), serta Midiastuty dan Mas'ud (2003) yang secara umum berkesimpulan bahwa besar kepemilikan institusional berarti semakin besar konflik *bondholder shareholder*.

Berbeda dengan konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional yang berpengaruh, kepemilikan manajerial tidak mempengaruhi konflik *bondholder shareholder*. Hasil ini berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya. Sesuai dengan teori keagenan, setiap pihak yakni *shareholder*, *management*, maupun *bondholder*, berjuang untuk memaksimalkan kepentingannya yakni memperoleh kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa semakin besar kepemilikan manajerial berarti semakin besar konflik *bondholder shareholder* karena setiap manajer yang memiliki kepemilikan manajerial berusaha memaksimalkan keuntungan bagi dirinya untuk memperoleh deviden, sebagaimana hasil penelitian Midiastuty dan Mas'ud (2003) yang berhasil

membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konflik agensi karena, sebagai sesama *shareholder*, *shareholder* mempunyai kekuatan memaksa manajemen membayar dividen sesuai dengan harapan *shareholder* atau kalau tidak mau dipaksa, mengganti manajemen dengan orang lain yang mempunyai komitmen untuk mengembangkan dan melaksanakan kebijakan dividen sesuai harapan *shareholder* (La Porta *et al.*, 2000).

Tidak berpengaruhnya kepemilikan manajerial terhadap konflik *bondholder shareholder* sejalan dengan penelitian Fauz dan Rosidi (2007) yang belum berhasil membuktikan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*. Terdapat beberapa faktor yang diidentifikasi menjadi penyebab kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*, yakni, sekurang-kurangnya 1) tingkat kepemilikan manajerial perusahaan *go public* non keuangan di Indonesia masih sangat rendah. Rata-rata kepemilikan manajerial perusahaan tersebut hanya 1,16% serta 70,3% perusahaan mempunyai saham yang dimiliki oleh manajemen, 2) manajemen berada pada posisi yang menyulitkan karena secara teknis manajemen harus mengamankan kepentingan pemberi kredit (*bondholder*) sebagai bagian dari sumber pendanaan yang terikat pada kontrak, sedang pada sisi lain manajemen juga harus secara konsisten mengawal kepentingan *shareholder* sebagai pihak yang menugaskannya (prinsipal) sebagai manajemen perusahaan (agensi). Posisi ini menyebabkan fungsi manajemen untuk mengelola dan atau mereduksi konflik menjadi terabaikan, 3) manajemen perusahaan di Indonesia belum cukup baik dan memenuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga perlindungan terhadap kreditor tidak memadai. Perusahaan di Indonesia juga diidentifikasi masih berorientasi pada tujuan klasik perusahaan yaitu untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya untuk memaksimalkan kekayaan *shareholder* (Yahanpath dan Joseph, 2011).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Secara simultan, konservatisme akuntansi, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial berpengaruh

terhadap konflik *bondholder shareholder*. Secara parsial, hanya konservatisme akuntansi dan kepemilikan institusional yang berpengaruh terhadap konflik *bondholder shareholder*; sedang kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap konflik *bondholder shareholder*. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa konflik antara *bondholder* dengan *shareholder* dapat dikelola melalui penggunaan konsep konservatisme dalam penyusunan laporan keuangan, kepemilikan institusional, maupun, secara bersama-sama, kepemilikan manajerial. Konsep konservatisme juga dipandang masih relevan khususnya dalam penanganan konflik yang terjadi antara pemilik, pengelola, maupun kreditor sebagaimana dijelaskan dalam teori keagenan.

Saran

Dalam penelitian ini, variabel konservatisme akuntansi maupun konflik *bondholder shareholder* diukur dengan menggunakan pendekatan atau proksi serta hanya berdasarkan data sekunder. Oleh karena itu, sekecil apapun, pasti terdapat bias dalam pengukuran kedua variabel tersebut. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar penggunaan proksi serta data sekunder direduksi dan dikembangkan pengukuran yang lebih memanifestasikan variabel yang akan diukur yang menyangkut kebijakan dan perilaku serta konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, A. Billings, B. Morton, R. dan Stanford-Harris, M. 2002. "The Role of Accounting Conservatism in Mitigating Bondholder-Shareholder Conflicts over Dividend Policy and in Reducing Debt Costs". *The Accounting Review* Vol. 77, No. 4 October 2002 pp. 867–890.
- Almilia, L., S. 2007. "Pengujian Size Hypothesis dan Debt/Equity Hypothesis yang Mempengaruhi Tingkat Konservatisme Laporan Keuangan Perusahaan dengan Teknik Analisis Multinomial Logit". *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*.

- Begley, J dan Freedman, R. 2004. "The Changing Role of Accounting Number in Public Lending Agreements". *Accounting Horizon*, Vol. 18, No, 2 June 2004 pp. 81-96.
- Fauz, A. dan Rosidi. 2007. "Pengaruh Aliran Kas Bebas, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Kebijakan Hutang dan Collateral Asset terhadap Kebijakan Dividen". *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 8, No. 2, Juni 2007.
- Givoly, D., dan Hyan, C. 2000. "The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?" *Journal of Accounting and Economics* 29 (2000) 287-320.
- Hartzell, J., dan Starks, L. 2003. "Institutional Investor and Executive Compensation". *Journal of Finance*. Vol. LVIII No. 6.
- Haryono, S. 2005. "Struktur Kepemilikan dalam Bingkai Teori Keagenan". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 5, No.1 Pebruari 2005.
- Hille, J., C. 2011. *Accounting Conservatism: The association between bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and accounting conservatism, the effect on the cost of debt and the influence of the implementation of IFRS in 2005*. Department of Accounting, Auditing & Control. Erasmus School of Economics
- Jensen, M. 1986. "Agency Cost of Free Cash Flow, Corporate Finance and Takeovers". *American Economic Review*. 76.
- Jensen, M.C. dan W. H. Meckling. 1976. "Theory of The Firm: Manajerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial and Economics*. 3. 305-360.
- Kwon, Y. 2005. "Accounting Conservatism and Managerial Incentives". *Management Science*. Vol. 51, No. 11, November 2005, pp. 1626-1632.
- Lara, J., Osma, B., dan Penalva, F. 2007. *Accounting Conservatism and Corporate Governance*. Springer Science+Business Media, LLC 2007
- Lee, J. 2010. *The Role of Accounting Conservatism in Firms' Financial Decisions*. Kellogg School of Management Northwestern University.
- Li, L., dan Mehta, M. 2010. *The Relation between Firm Characteristics and Dividend Covenants*. Social Science Research Network.
- Midiastuty., P.P., dan Mas'ud. 2003. *Analisis Hubungan Mekanisme Corporate governance dan Indikasi Manajemen Laba*. Simposium Nasional Akuntansi VI. Surabaya.
- Sari, D. 2004. *Hubungan Antara Konservatisme Akuntansi dengan Konflik Bondholders-Shareholders Seputar Kebijakan Dividen dan Peringkat Obligasi Perusahaan*. Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali 2 dan 3 Desember 2004.
- Watt, R. 2002. *Conservatism in Accounting*. The Bradley Policy Research Center Financial Research and Policy Working Paper No. FR 02-21.
- Yahanpath, N. dan Joseph, T. 2011. "A Brief Review of The Role of Shareholder Wealth Maximisation and Other Factors Contributing to The Global Financial Crisis". *Qualitative Research in Financial Markets*. Vol. 3, No. 1, 2011.

PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, KEPERCAYAAN PADA SUPERVISOR, DAN PERILAKU IDEAL KEWARGAAN ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAYANAN PERAWAT

Muhammad Cholil

Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Sebelas Maret
Jalan Ir. Sutami Nomor 36A Kentingan, Surakarta 57126
Telepon +62 271) 647481, 669090. Fax. +62 271 638143
E-mail: cholil_mch@yahoo.co.id

ABSTRACT

The purpose of this research was to analyze the effect of transformational leadership, trust in supervisor, individual-focused organizational citizenship behavior, and organization-focused organizational citizenship behavior on nurse service quality. Service quality serves as endogenous variable, transformational leadership as exogenous variable, and trust in supervisor, individual-focused organizational citizenship behavior, and organization-focused organizational citizenship behavior as mediator variables. Three hundred fifty-three nurses as respondents from five private hospital in Surakarta had comprehensively filled in the given questionnaires. Based on the analysis of structural equation modeling, it was discovered that the model of the research met the model's test criteria based on the indexes of properness test: RMSEA, CMIN, GFI, AGFI, TLI, CFI and NFI. This research also revealed several results. First, transformational leadership has positive influences on nurse's trust to the leader, OCBI, OCBO and service quality. Second, trust in supervisor influences OCBI and OCBO. Third, OCBO influences service quality, while OCBI does not. Fourth, trust in the leader partially mediates the influence of transformational leadership to both OCBO and OCBI. Fifth, OCBO mediates, while OCBI does not mediate the in-

fluence of transformational leadership to service quality.

Keywords: transformational leadership, trust in supervisor, ideal organizational citizenship behavior, service quality

PENDAHULUAN

Pasien menjadi fokus perhatian terpenting bagi pimpinan dan karyawan suatu rumah sakit. Banyak rumah sakit bangkrut bukan karena struktur biaya, namun lebih karena ketidaktepatan kualitas layanan yang sesuai dengan harapan pasien (Cleverly, 1993). Perawat merupakan salah satu elemen terpenting dalam proses pemberian perawatan dan layanan rumah sakit karena curahan waktu dan energi yang lebih besar. Untuk itu perawat merupakan salah satu magnet kualitas layanan yang perlu menampilkan perilaku perawatan dan pelayanan ideal. Untuk itu perawat harus menampilkan kontak fisik dan inderawi serta emosi yang selalu siap melayani pasien secara kompeten, tulus, dan penuh pengabdian.

Adkins (2000) menjelaskan bahwa 75% alasan penghentian seseorang dalam berlangganan barang

dan jasa karena kesalahan kualitas layanan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan pemberian keunggulan kualitas pelayanan terutama oleh tenaga yang berada di lini depan yang berkaitan langsung dengan fungsi layanan menjadi sangat penting. Untuk sebuah rumah sakit, perilaku layanan perawat berpengaruh pada kualitas layanan jasa dan kinerja (Broomberg & Mills, 2004). Hal ini senada dengan pendapat Ryan (2009) yang menjelaskan bahwa perilaku layanan perawat di suatu rumah sakit mempengaruhi tingkat kesembuhan pasien. Perilaku layanan pada pasien yang ideal memerlukan lubrikasi (ramuan atau pelumasan) tertentu. Di antara bentuk lubrikasi tersebut adalah kepercayaan perawat pada supervisor dan jajaran kepemimpinan lainnya. Supervisor harus selalu membangun kepercayaan melalui perilaku profesional, adil, dedikatif, dan akomodatif. Jika supervisor rumah sakit dapat membunikan kepercayaan pada setiap perawat, maka perawat tak ada alasan untuk tidak mempercayainya dan mendorong untuk semakin loyal seperti yang dikemukakan Yukl (2010) bahwa dengan penampilan perilaku dan kinerja jauh di atas yang diharapkan.

Perilaku dan kinerja lebih dari panggilan tugas terlepas dari pertimbangan kompensasi finansial inilah yang menurut Oetama (2008) dikenal dengan istilah perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi (PIKO) sebagai terjemahan dari *organizational citizenship behavior* (OCB). Dikatakan ideal karena memang diperlukan upaya ekstra untuk memahami dan mewujudkan perilaku tersebut sebagai salah satu keunggulan kompetitif yang sulit ditiru, karena diramu dari keunggulan keunikan keperilaku. Williams dan Anderson (1991) membedakan perilaku ideal kewargaan organisasi berdasarkan fokus yang dituju menjadi perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu selanjutnya disingkat PIKOI dan perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi selanjutnya disingkat PIKOO.

Menurut Enhart dan Naumann (2004), dalam suatu rumah sakit diperlukan pemahaman dan penerapan perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi sebagai sesuatu yang sangat penting. Yoon dan Suh (2003) juga menyatakan masih sedikit bukti empiris tentang efek positif perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi pada kualitas layanan di rumah sakit yang harus diteliti mengingat adanya optimisme yang

menjamin adanya efek positif tersebut bagi kepentingan pengembangan keberhasilan organisasi rumah sakit. Dalam rangka mewujudkan terjadinya perilaku ideal perilaku kewargaan organisasi dalam suatu organisasi diperlukan pemahaman dan pemenuhan faktor yang mempengaruhi perilaku ideal tersebut.

Di antara faktor tersebut adalah kepercayaan personal pada setiap jajaran dan tingkatan kepemimpinan. Adanya kepercayaan bawahan terhadap pimpinan seperti dikatakan Barki dan Hartwick (2001) menjadi faktor kunci terjadinya kooperasi kegiatan organisasi. Morgant dan Hunt (1994) juga mengatakan bahwa kepercayaan bawahan terhadap pimpinan berhubungan secara positif dengan keunggulan kualitas kooperasi, koordinasi, konflik fungsional, dan persetujuan yang bersifat positif.

Faktor-faktor kepemimpinan penting dalam meningkatkan kepercayaan bawahan antara lain adalah ketepatan pemilihan gaya kepemimpinan. Berdasarkan sejumlah gaya kepemimpinan yang relevan dan akan datang populer dewasa ini dan di masa yang akan datang adalah kepemimpinan transformasional. Sebagian besar kajian para teoritis dan peneliti tentang kepemimpinan transformasional dibandingkan dengan perilaku kepemimpinan yang lain, hasilnya selalu menunjukkan pengaruh hubungan yang lebih besar terhadap variabel konsekuensi yang digunakan. Pendekatan pemimpin terhadap bawahan yang bernuansa kepemimpinan transformasional menurut Lebrasseur *et al.* (2002) akan mempertajam strategi, struktur dan budaya untuk proses perbaikan kualitas termasuk kualitas layanan secara berkesinambungan.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Untuk meningkatkan keunggulan kualitas layanan diperlukan perilaku ideal kewargaan organisasi terutama oleh personal lini depan yang berkaitan langsung dengan fungsi layanan kepada pelanggan. Menurut Choi (2006), perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi berpengaruh positif pada kualitas layanan. Di sisi lain, Bienstock *et al.* (2003) menjelaskan terdapat pengaruh positif perilaku ideal kewargaan organisasi karyawan layanan restoran terhadap pemenuhan standar kualitas layanan pelanggan.

Hui *et al.* (2001) menyebutkan bahwa SDM yang memenuhi kriteria sebagai warga organisasi yang unggul, baik yang berfokus pada individu maupun organisasi dapat diarahkan pada peningkatan penyajian kualitas layanan seperti yang diharapkan pelanggan. O'Connell *et al.* (2001) menemukan hubungan yang signifikan antara perilaku ideal kewargaan organisasi dengan sikap layanan pada pelanggan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H1: Perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus individu berpengaruh positif terhadap kualitas layanan.

H2: Perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas layanan.

Untuk memiliki SDM yang menampilkan perilaku ideal kewargaan organisasi diperlukan perilaku kepemimpinan yang tepat, yaitu kepemimpinan transformasional. Muchiri *et al.* (2002) menemukan adanya pengaruh positif kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi dan kinerja. Koh *et al.* (1985) juga menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional memiliki pengaruh pada sejumlah variabel *outcome* termasuk perilaku ideal kewargaan organisasi. Lepine *et al.* (2002) dalam *review* dan *meta-analisisnya* menjelaskan bahwa perilaku kepemimpinan merupakan salah satu prediktor penting untuk perilaku ideal kewargaan organisasi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H3: Kepemimpinan transformasional supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu.

H4: Kepemimpinan transformasional supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi.

Menurut Pudsakoff dan MacKenzie (1997), kepemimpinan transformasional perlu menjadikan kualitas layanan sebagai visi perusahaan untuk memotivasi bawahan yang berkaitan langsung dengan fungsi layanan, sedang Jabnoun dan Rasasi (2005) menjelaskan adanya hubungan kepemimpinan transformasional dan kualitas layanan yang dirasakan oleh pasien. Demikian pula Keller (1995) serta Masi dan Cooke (2000) menjelaskan bahwa bawahan yang

dipimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional akan memiliki perilaku layanan yang lebih baik, ke arah peningkatan kualitas layanan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H5: Kepemimpinan transformasional supervisor berpengaruh positif terhadap kualitas layanan.

Perwujudan PIKO memerlukan tingkat kepercayaan bawahan yang tinggi terhadap pemimpin seperti dikatakan Jung dan Avolio (2000) dan harus dibangun dengan kepemimpinan transformasional. Bartam dan Casimir (2006) dan Arnold *et al.* (2001) menemukan bahwa kepemimpinan pengelola program MBA yang berperilaku transformasional mempengaruhi kepercayaan mahasiswa pada pengelola. Dirks dan Ferrin (2002) dalam kajian *meta analisis* tentang kepercayaan pada pemimpin dan ditemukan bahwa prediktor utama kepercayaan pada pemimpin adalah perilaku kepemimpinan transformasional. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H6: Kepemimpinan transformasional supervisor berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada supervisor.

Faktor kepercayaan pada pemimpin akan menjadi jembatan bagi tumbuh dan berkembangnya perilaku ideal kewargaan organisasi yang mensyaratkan harapan dan perwujudan pemenuhan kualitas layanan bagi para pelanggan produk dan atau jasa yang ditawarkan. Konovsky dan Pugh (1994); Mayer dan Gavin (2005); Connel *et al.* (2003) menemukan hasil penelitian tentang pengaruh antara kepercayaan pada pemimpin dengan perilaku ideal kewargaan organisasi, sedang Budhwar dan Xiong Chen (2002) juga menjelaskan bahwa kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi baik yang berfokus pada individu maupun organisasi. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H7: Kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu.

H8: Kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi.

Kepemimpinan transformasional banyak menjadi faktor penentu kinerja organisasional seperti kepercayaan, kepuasan kerja, komitmen, perilaku ideal kewargaan organisasi, dan kualitas layanan. Namun kecenderungan pola hubungan antara kepemimpinan

transformatif dengan sejumlah variabel konsekuensi tersebut dapat bersifat tidak langsung/berdiri sendiri. Pertama, adanya mediasi kepercayaan terhadap supervisor pada pengaruh antara kepemimpinan transformasional dengan perilaku ideal kewargaan organisasi yang didukung oleh Podsakoff *et al.* (1990), Pillai *et al.* (1999), Casimir *et al.* (2006), Bartam dan Casimir (2006), dan Jung dan Avolio (2000). Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H9: Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu.

H10: Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi.

Kedua, perilaku ideal kewargaan organisasi memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional pada kualitas layanan didukung oleh penelitian Choi (2006) yang menemukan bahwa *generalized compliance* sebagai perwujudan perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi berfungsi sebagai pemediasi, sedang dimensi altruisme tidak memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional dengan kualitas layanan. Oleh karena itu, dirumuskan hipotesis:

H11: Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu.

H12: Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi

Jumlah kuesioner yang dapat dianalisis berasal dari 353 tenaga perawat rawat inap tetap yang memiliki masa kerja minimal 1 tahun yang diambil secara proporsional dari lima rumah sakit di Surakarta. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner dengan skala Likert 1-5. Penentuan jumlah responden sebesar 353 mempertimbangkan kriteria standar alat analisis yang direncanakan menggunakan SEM (*Structural Equation Model*), yang menyarankan bahwa jumlah sampel minimal sebanyak 5 kali dan maksimal 10 kali parameter penelitian seperti dikemukakan Hair *et al.* (1998).

Kualitas layanan dan dimensinya mengacu pada

pendapat Parasuraman, *et al.* (1985, 1988) yang dimodifikasi oleh Brady dan Cronin (2002) yang menjelaskan bahwa kualitas layanan hanya dari persepsi kualitas layanan yang dirasakan tanpa harus membandingkan dengan kualitas yang diharapkan. Perilaku ideal kewargaan organisasi baik yang berfokus pada individu maupun pada organisasi mengacu pendapat Williams dan Anderson (1991). Kepercayaan pada pemimpin mengacu pada pengertian Podsakoff *et al.* (1990) yang menjelaskan kepercayaan sebagai "*faith in and loyalty to the leader*", sedang kepemimpinan dan dimensinya mengacu pada dari konsep Bass (1985) yang menekankan sebagai gaya kepemimpinan yang berbasis pada kejelasan formulasi dan aktualisasi visi dan misi organisasi yang berfokus pada orientasi pelanggan dengan memotivasi, menstimulasi, dan pengakuan keunikan individual.

Variabel penelitian terdiri 5 variabel, yaitu kepemimpinan transformasional, kepercayaan pada supervisor, perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu (PIKOI), perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi (PIKOO), dan kualitas layanan perawat. Berdasarkan analisis faktor sebagaimana bisa dilihat pada Tabel 1 sampai dengan Tabel 5 ternyata ada dua item yaitu DR4 dan IS1 yang tidak valid, karena memiliki *Loading Factor* (LF) di bawah 0,5, sedang koefisien *Cronbach Alfa* (CA) kelima variabel penelitian memenuhi kriteria reliabilitas karena menunjukkan koefisien CA yang lebih besar 0,6 sebagaimana nampak pada Tabel 6.

Tabel 1
Hasil Analisis faktor Kualitas Layanan

Kode	LF	Pernyataan
DR 1	0,774	Memberikan layanan sesuai dengan jadwal waktu yang dijanjikan
DR 2	0,831	Memberikan layanan dengan cepat
DR 3	0,823	Menjawab pertanyaan pasien dan bersedia membantu pasien
DR4	-	Sabar melayani dan tidak terkesan sibuk dalam memberikan layanan
JM1	0,795	Merawat dengan menanamkan kepercayaan diri pada pasien
JM2	0,799	Memberikan rasa aman dalam memberikan layanan
JM3	0,819	Memiliki kemampuan menjawab pertanyaan pasien
JM4	0,712	Secara konsisten bersikap sopan pada pasien
EM1	0,765	Merawat dan melayani pasien secara nyaman untuk semua pasien
EM2	0,758	Memberikan layanan terbaik yang mengesankan dihati pasien
EM3	0,717	Memahami kebutuhan spesifik pasien, misalnya minta didoakan
EM4	0,811	Memperhatikan dengan baik pendapat dan masukan pasien
EM5	0,801	Memperhatikan kepentingan personal pasien tentang dengan layanan
KAN1	0,742	Secara tulus membantu permasalahan yang dihadapi pasien
KAN2	0,717	Memberikan perhatian layanan terbaik pada kesempatan pertama
KAN3	0,669	Memberikan perawatan sesuai waktu yang diperlukan
KAN4	0,757	Memberikan kesempatan berkomunikasi sesuai yang diperlukan pasien

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 2

Hasil Analisis faktor Perilaku Ideal Kewargaan Organisasi -Fokus pada Individu

Kode	LF	Pernyataan
PIA1	0,823	Siap menggantikan tugas layanan perawat yang tidak hadir
PIA2	0,826	Menolong sesama perawat yang memiliki tugas berat
PIA3	0,893	Mendampingi perawat baru seputar tugas layanan
PIA4	0,528	Menolak melakukan layanan lain, karena bukan tanggungjawabnya®
PICU1	0,743	Membantu pekerjaan kepala ruang /supervisor tanpa diminta
PICU2	0,746	Menghindari bertemu supervisor karena alasan yang tidak jelas
PICU2	0,754	Memperhatikan dan membantu problem anggota kelompok perawat

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 3

Hasil Analisis faktor Perilaku Ideal Kewargaan Organisasi-Fokus pada Organisasi

Kode	LF	Pernyataan
POCV1	0,665	Menyebarkan informasi penting bagi anggota kelompok perawat
POCV2	0,766	Siap menghadiri acara (pertemuan, pameran) meski tidak diundang, namun penting bagi kemajuan RS
POCV3	0,812	Hadir diluar jadwal kerja (datang awal, pulang akhir) demi kepentingan RS
POCO1	0,783	Memberikan alasan yang dapat jelas, jika tidak hadir bekerja ke RS
POCO2	0,722	Menggunakan fasilitas RS untuk kepentingan pribadi®
POCO3	0,755	Memfaatkan pendekatan informal untuk mematuhi aturan demi RS
POS1	0,641	Membiarkan perawat lain melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan masalah layanan®
POS2	0,753	Mengeluh untuk hal hal yang tidak penting®
POS3	0,762	Menjaga dan melestarikan kekayaan RS
POS4	0,714	Meluruskan berbagai pendapat negatif terhadap nama baik RS

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 4
Hasil Analisis faktor Kepercayaan pada Supervisor

Kode	LF	Pernyataan
KF1	0,658	Memperlakukan secara adil terhadap semua perawat
KF2	0,798	Mengambil keuntungan pribadi dengan mengabaikan perawat®
KF3	0,832	Kurang bisa dipercaya dibanding supervisor/kepala ruang lain ®
KF4	0,742	Mudah dihubungi untuk membahas masalah layanan dan ditindaklanjuti dengan kongkrit
KL1	0,856	Membuat saya perlu setia padanya
KL2	0,867	Membuat saya mendukung kebijakannya hampir pada semua keadaan padan
KL3	0,847	Membuat saya mempunyai emosi kesetiaan padanya
KL4	0,588	Saya sedang mempertimbangkan untuk berpindah kesupervisor lain®

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 5
Hasil Analisis faktor Kepemimpinan Transformasional

Kode	LF	Pernyataan
II1	0,763	Menekankan pentingnya nilai layanan yang berfokus dan tujuan masa depan
II2	0,845	Menanamkan rasa bangga jika merawat dan melayani sesuai harapan pasien
II3	0,834	Mendorong perawat untuk mencapai prestasi layanan terbaik
II4	0,788	Mengutamakan kepentingan kelompok perawat dalam pemberian layanan
II5	0,673	Menekankan pemberian perawatan dan layanan yang menimbulkan rasa hormat
II6	0,508	Memberikan teladan yang baik di dalam melayani sesuai harapan pasien
IM1	0,763	Menekankan optimisme masa depan melalui layanan sesuai harapan pasien
IM2	0,748	Menekankan, pasien sebagai sumber umpan balik perbaikan kualitas layanan
IM3	0,811	Mendorong meningkatkan gairah untuk melayani pasien sesuai harapan pasien
IM4	0,818	Memberikan ilham/inspirasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada pasien
IM5	0,793	Merangsang untuk memberikan masukan perbaikan kualitas layanan pasien
IS1	-	Menggunakan cara pandang yang sama dari waktu ke waktu dalam menyelesaikan masalah layanan
IS2	0,786	Merangsang menggunakan cara yang kreatif dalam menangani layanan pasien
IS3	0,877	Merangsang memanfaatkan pengalaman memperbaiki kualitas layanan
IS4	0,854	Mengembangkan potensi perawat untuk peningkatkan kualitas layanan
IC1	0,741	Menjadwalkan pelatihan perawat untuk meningkatkan kemampuan layanan
IC2	0,816	Mempertimbangkan kepentingan individu untuk meningkatkan semangat layanan
IC3	0,593	Memberikan penghargaan atas kinerja perawat tanpa mempertimbangkan perasaan perawat secara individual ®
IC4	0,78	Memberikan jalan keluar khusus, untuk meningkatkan rasa percaya diri individu perawat dalam memberikan layanan

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 6
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

	Alpha	Mean	SD	1	2	3	4	5
1. Kepemimpinan Transformasional	0,903	21.32	2.64	1				
2. Kepercayaan pada Supervisor	0,840	10.39	1.52	0,700	1			
3. OCBO	0,822	16.70	2.01	0,679	0,654	1		
4. OCBI	0,776	10.78	1.34	0,581	0,585	0,741	1	
5. Kualitas Layanan	0,880	21.84	2.35	0,753	0,576	0,708	0,610	1

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

HASIL PENELITIAN

Hasil uji kesesuaian model menunjukkan bahwa tujuh dari sembilan kriteria indek memenuhi kriteria baik seperti nampak pada Tabel 7 dan model penelitian dapat dilihat pada Gambar 2.

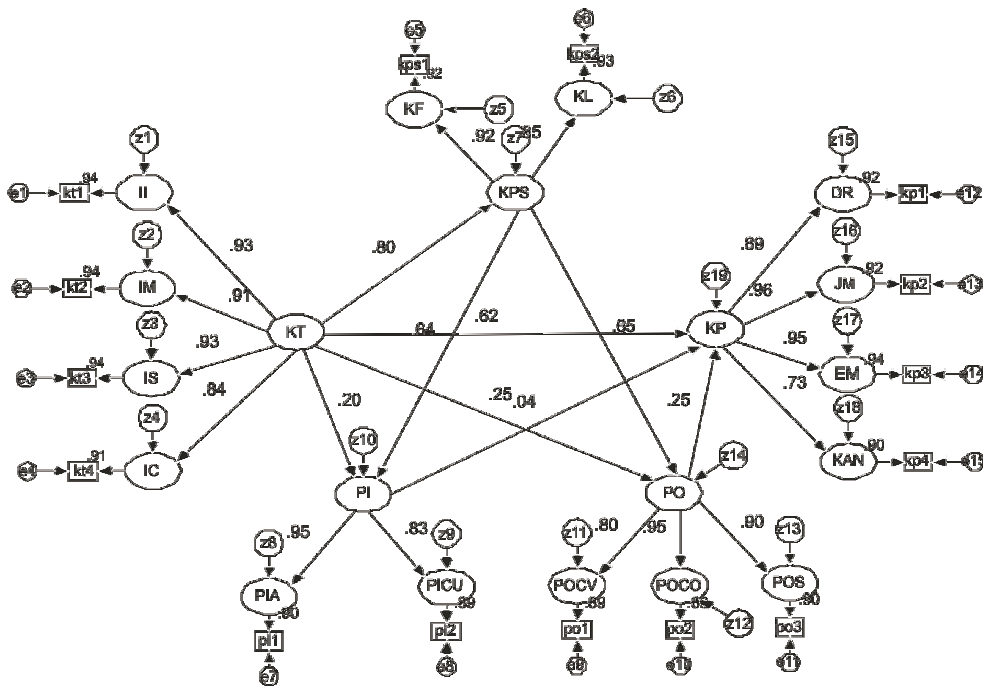
Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 yang mengacu dari Gambar 2 nampak bahwa ada 2 hipotesis yang tidak

didukung oleh hasil penelitian ini, yaitu hipotesis 1 dan 12. Perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu ternyata tidak mempengaruhi kualitas layanan dan hasil uji ini juga akan menunjukkan bahwa perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu tidak memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kualitas layanan.

Tabel 7
Uji Kesesuaian Model

No	Kriteria Indek Acuan	Nilai Acuan	Hasil	Arti
1	χ^2	Sekecil mungkin	305,496	-
2	p value	$\geq 0,05$	0,000	-
3	RMSEA	$\leq 0,1$	0,088	Baik
4	CMIN/df (relative χ^2)	(2 – 5)	3,726	Baik
5	GFI	$\geq 0,9$	0,90	Baik
6	AGFI	$\geq 0,8$	0,841	Baik
7	TLI	$\geq 0,9$	0,926	Baik
8	CFI	$\geq 0,9$	0,942	Baik
9	NFI	$\geq 0,9$	0,923	Baik

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).



Gambar 1
Model dan Hasil Penelitian

Tabel 8
Hasil Pengujian Hipotesis Langsung

Hipotesis	Est	SE	CR	Prob	Keterangan
H ₁ :Perilaku ideal kewargaan-fokus pada individu (PIKOI) berpengaruh positif terhadap kualitas layanan	0,036	0,063	0,536	0,592	Tidak didukung
H ₂ :Perilaku ideal kewargaan-fokus pada organisasi (PIKOO) berpengaruh positif terhadap kualitas layanan	0,250	0,082	3,375	<0,001	Didukung
H ₃ :Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap PIKOI	0,202	0,099	2,094	0,036	Didukung
H ₄ :Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap PIKOO	0,245	0,075	2,784	0,005	Didukung
H ₅ :Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kualitas layanan	0,620	0,073	8,118	<0,001	didukung
H ₆ :Kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepercayaan pada supervisor	0,797	0,053	14,890	<0,001	Didukung
H ₇ :Kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap PIKOI	0,641	0,106	6,196	<0,001	Didukung
H ₈ :Kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap PIKOO	0,650	0,086	6,526	<0,001	Didukung

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

Tabel 9
Hasil Pengujian Hipotesis dengan Mediasi

Hipotesis	Lngsung	mediasi	Hasil
H ₉ : Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap PIKOI	$\beta=0,814$ CR=14,68 $p<0,001$	$\beta=0,207$ CR=2,09 $p=0,036$	Didukung (mediasi parsial)
H ₁₀ : Kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap PIKOO	$\beta=0,724$ CR=12,96 $p<0,001$	$\beta=0,210$ C=2,784 $p=0,005$	Didukung (mediasi parsial)
H ₁₁ : PIKOI memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kualitas layanan.	$\beta=0,831$ CR=16,23 $p<0,001$	$\beta=0,034$ CR=0,536 $p=0,592$	Tidak didukung
H ₁₂ : PIKOO memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kualitas layanan	$\beta=0,831$ CR=16,23 $p<0,001$	$\beta=0,591$ CR=8,12 $p<0,001$	Didukung (mediasi parsial)

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah (2010).

PEMBAHASAN

Model penelitian yang diajukan dapat memenuhi persyaratan kelayakan model untuk indeks RMSEA, CMIN/df, GFI, AGFI, TLI, CFI, dan NFI. Hal ini menunjukkan model didukung oleh data empiris seperti dapat dilihat pada Tabel 7. Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 akan dijelaskan pembahasan hasil uji hipotesis 1 sampai hipotesis 12

H1 tidak didukung ($\hat{\alpha}=0,036, p>0,05$). Hal ini berarti perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu tidak berdampak pada kualitas layanan perawat. Penjelasan yang bisa dikemukakan disini adalah bahwa secara konseptual perilaku seseorang itu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunggal, tetapi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan dinamis. Di sisi lain perilaku ideal kewargaan yang berfokus individu juga dipengaruhi oleh karakteristik individu semisal sikap, kepribadian dan sebagainya. Kepribadian yang antagonis dan neurotis dapat menyebabkan terjadinya sikap saling curiga, skeptis, tumbuhnya keyakinan irasional yang berpotensi sangat mengganggu pemberian layanan yang berkualitas. Di samping itu, masih diperdebatkan apakah altruisme sebagai perwujudan PIKOI itu merupakan sifat tidak mementingkan diri sendiri seperti itu mencerminkan egoisme atau mementingkan diri sendiri seperti dikemukakan Neuberger *et al.* (1997) sebagai sifat tidak

mementingkan diri sendiri. Jika kecenderungan altruisme sebagai *selfish* maka temuan penelitian tersebut memang dapat saja terjadi demikian adanya. Faktor budaya misalnya untuk masyarakat Surakarta yang notabene masih dinuansai budaya keraton yang relatif memiliki "power distance" yang tinggi akan dapat menjadi faktor pengganggu perilaku altruisme dan kewaspadaan terjadinya masalah layanan yang berkualitas.

H2 didukung ($\hat{\alpha}=0,250, p<0,05$). Hal ini menjelaskan bahwa perawat yang semakin bermuatan perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi akan semakin meningkatkan kualitas layanan pada pasien. Perilaku ideal ke perawat yang tertuju pada organisasi sangat perlu diciptakan dan semakin ditingkatkan. Rasa memiliki rumah sakit, partisipasi aktif untuk kepentingan rumah sakit masih sangat perlu diupayakan melalui peningkatan kepercayaan baik kepada supervisor yang bergaya transformasionalis baik secara individual dan personal, serta secara tim.

H3 didukung ($\hat{\alpha}=0,202, p<0,05$). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kepemimpinan transformasional supervisor maka perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada individu juga akan semakin tinggi. H4 didukung ($\hat{\alpha}=0,245, p<0,05$). Hal ini berarti, semakin tinggi tingkat kepemimpinan transformasional supervisor maka perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi juga akan semakin tinggi.

Hasil ini sesuai dengan sejumlah penelitian yang mendukungnya, antara lain Muchiri *et al.* (2002), Koh, *et al.* (1985), dan Lepine *et al.* (2002).

H5 didukung ($\beta=0,620, p<0,05$). Hal ini berarti, tingkat transformasionalitas supervisor yang semakin tinggi akan meningkatkan kualitas layanan perawat. Kepemimpinan transformasional seperti dikatakan oleh Podsakoff *et al.* (1997) akan mendorong perilaku personil/karyawan berorientasi pada kebutuhan pelanggan organisasi, sedang Jabnoun dan Rasasi (2005), Keller (1995), serta Masi dan Cooke (2000) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan transformasional akan mempengaruhi kualitas layanan yang dirasakan bagi pasien, pelanggan, dan personil. H6 didukung ($\beta=0,797, p<0,05$). Hal ini berarti, semakin transformasional kepemimpinan supervisor akan semakin membangun kepercayaan perawat kepada supervisor. Hal ini sesuai dengan temuan hasil penelitian sebelumnya yaitu oleh Jung dan Avolio (2000), Gillespie dan Mann (2004), serta Bartam dan Casimir (2006). Dengan demikian, seorang pemimpin di tingkat manapun berkepentingan untuk senantiasa membangun kepercayaan di mata bawahan.

H7 yang mengatakan bahwa kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada individu ternyata didukung dalam penelitian ini ($\beta=0,641, p<0,05$). H8 yang mengatakan bahwa bahwa kepercayaan pada supervisor berpengaruh positif terhadap PIKO yang berfokus pada organisasi didukung ($\beta=0,650, p<0,05$). Artinya semakin tinggi kepercayaan perawat pada supervisor akan semakin berpeluang meningkatkan derajat perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada individu maupun organisasi. Hal ini sejalan dengan dukungan referensi sejumlah hasil penelitian yang mendukungnya antara lain Dirks dan Ferrin (2002), Konovsky dan Pugh (1994), Wagner dan Rush (2000), Pillai *et al.* (1999), Mayer dan Gavin (2005), serta Connel dan Travaglione (2003). Juga dikemukakan oleh Yulk (2010) bahwa terdapatnya kepercayaan pada pemimpin dapat menjadi pemacu penting bawahan. Dalam hal ini perawat untuk berperilaku di atas peran ekstra. Spontanitas keterpanggilan menjalankan tugas di atas yang diharapkan sangat mempengaruhi kualitas layanan perawat untuk memiliki perilaku siap menolong pada keluhan pasien, mencegah terjadinya permasalahan pelayanan secara proaktif. Demikian pula perawat akan

merasa lebih memiliki dan melindungi aset rumah sakit, meredam permasalahan secara konstruktif, tidak menyalahgunakan fasilitas dan kekuasaan yang diberikan rumah sakit.

H9 yang mengatakan bahwa kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh KT terhadap perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada individu dibuktikan sebagai berikut, yaitu dilihat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional dengan PIKOI ternyata hasilnya berpengaruh positif ($\beta=0,814, p<0,01$) dan setelah memasukkan variabel mediator (kepercayaan pada supervisor) masih tetap berpengaruh ($\beta=0,207, p<0,05$). Di sini terjadi penurunan signifikansi, yang berarti menunjukkan adanya pengaruh mediasi secara parsial. Derajat perilaku ideal yang berfokus pada individu dipengaruhi baik secara langsung dan tidak langsung melalui pembentukan kepercayaan pada pimpinan yang semakin tinggi di mata bawahan. H10 yang mengatakan bahwa kepercayaan pada supervisor memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada individu dibuktikan sebagai berikut, yaitu dilihat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional dengan perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi, ternyata hasilnya berpengaruh positif ($\beta=0,724, p<0,001$). Setelah memasukkan variabel mediator (kepercayaan pada supervisor) masih tetap berpengaruh ($\beta=0,210, p<0,005$). Artinya, terjadi penurunan besar pengaruh dan tingkat signifikansinya, sekaligus menunjukkan adanya pengaruh mediasi secara parsial. Derajat perilaku ideal yang berfokus pada organisasi dipengaruhi baik secara langsung dan tidak langsung melalui pembentukan kepercayaan pada pimpinan yang semakin tinggi bagi bawahan.

H11 yang mengatakan bahwa perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada individu memediasi pada pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kualitas layanan tidak didukung. Hal ini tampak dari adanya pengaruh langsung kepemimpinan transformasional dengan kualitas layanan ($\beta=0,831, p<0,001$), tetapi setelah memasukkan variabel mediator menjadi tidak berpengaruh ($\beta=0,034, p>0,05$), sehingga pengaruh mediasi tidak didukung. H12 yang mengatakan bahwa perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi memediasi pengaruh kepemimpinan transformasional pada kualitas layanan,

dibuktikan sebagai berikut, 1) dilihat pengaruh langsung kepemimpinan transformasional dengan kualitas layanan, ternyata hasilnya berpengaruh positif ($\beta=0,831, p<0,05$). Setelah memasukkan variabel mediator masih tetap berpengaruh dengan ($\beta=0,591, p<0,05$). Dalam hal ini terjadi penurunan pengaruh yang berarti menunjukkan adanya pengaruh mediasi secara parsial. Derajat perilaku ideal yang berfokus pada organisasi dipengaruhi baik secara langsung dan tidak langsung melalui pembentukan kepercayaan pada pimpinan yang semakin tinggi di mata bawahan.

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil pembuktian hipotesis, ternyata hanya 10 dari 12 hipotesis yang memenuhi kriteria layak, yaitu 1) kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap kepercayaan perawat pada supervisor, perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada individu maupun organisasi, dan kualitas layanan; 2) kepercayaan pada pemimpin berpengaruh pada perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada individu maupun organisasi; 3) perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada organisasi berpengaruh pada kualitas layanan, namun yang berfokus pada individu tidak berpengaruh pada kualitas layanan; 4) kepercayaan pada supervisor memediasi secara parsial terhadap pengaruh kepemimpinan transformasional dengan perilaku ideal kewargaan baik yang berfokus pada individu maupun organisasi; 5) perilaku ideal kewargaan organisasi yang berfokus pada organisasi memediasi secara parsial, sedang perilaku ideal yang berfokus pada individu tidak memediasi terhadap pengaruh kepemimpinan transformasional dengan kualitas layanan.

Implikasi

Implikasi manajerial hasil temuan penelitian ini adalah 1) pengelola rumah sakit perlu mendisain model keputusan/kebijaksanaan berdasarkan model hubungan antarbeberapa variabel yang memiliki esensialitas dan substansialitas strategis yang dapat menjadi pijakan utama dalam memberikan keunggulan kualitas layanan pasien dengan mengoptimalkan

peningkatan perilaku ideal kewargaan organisasi perawat yang memiliki kepercayaan semakin kuat terhadap kepemimpinan yang bergaya transformasional sebagai agen perubahan dalam menangkap peluang yang ditawarkan lingkungan dan 2) rumah sakit perlu menganalisis penyebab tidak terbuktinya pengaruh perilaku ideal kewargaan yang berfokus pada individu terhadap kualitas layanan perawat baik dari aspek individu perawat, struktur kekuasaan, lingkungan. Perlu diambil langkah-langkah kongkrit melalui proses transformasi sistem nilai dan budaya yang relevan untuk mengkondisikan dan memfasilitasi berkembangnya perilaku altruisme dan kepedulian untuk lebih mewaspadai terjadinya masalah layanan yang bersifat potensial. Implikasi teoritisnya adalah bahwa model kerangka pengaruh antara variabel penelitian ini perlu dicermati sebagai model saling pengaruh yang penting dan strategis untuk dipahami diwujudkan oleh setiap perawat di bawah perilaku kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional semakin penting untuk didemonstrasikan sebagai “*driver*” dalam mengelola perubahan melalui kepercayaan bawahan yang melahirkan perilaku ideal di atas panggilan tugas dan di atas kepentingan diri sendiri yang ditampilkan pada perilaku layanan pada pasien secara berkualitas.

Saran

Masih terdapatnya distribusi data yang tidak normal pada beberapa variabel. Ketidaknormalan distribusi data normal biasa terjadi dalam riset keperilakuan tetapi perlu dilakukan metode estimasi yang tepat untuk mengatasi hal ini, misalnya dengan metode estimasi ADF *asymtotically distribution free* (ADF), yaitu metode yang tidak mempersyaratkan normalitas data meskipun harus dilakukan dengan menggunakan jumlah responden yang lebih besar. Adanya beberapa instrumen penelitian, terdiri satu aitem daya respon (DR_4) yang diacu dari konsep *servqual* yang dimodifikasi dengan konsep *servperf* dan stimulasi intelektual (IS_1) yang didasarkan pada konsep MLQ tidak valid. Untuk penelitian mendatang dapat dilakukan perbaikan dalam penyusunan instrumen kuesioner, sehingga pengukuran untuk variabel terkait dapat dilakukan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adkins, B. 2000. Great customer service is key to business success. *Fort Worth Business Press*. January 20-February 5.
- Arnold, K. Barling J., and Kelloway, E. K. 2001. "Transformational leadership for the iron cage with predict trust, commitment and team efficacy". *Leadership & Organization Development Journal*. Vol. 22, No. 7:315-320.
- Aryee, S. Budwar, P. S., and Chen, Z. X. 2002. "Trust as mediator of the relationship between Organizational Justice and work outcomes: Test of a social exchange model". *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 3, No. 3: 267-285.
- Barki, H. and Hortwick, J. 2001. "Interpersonal conflict and its management in information system development". *Journal of MIS Quarterly*. Vol. 25, No. 2: 195- 228.
- Bartram, T. and Casimir, G. 2006. "The relationship between leadership and follower in role performance and satisfaction with leader". *Leadership and Organization Development Journal*. Vol. 28, No.3: 4-19.
- Bass, B. M. 1985. *Leadership and performance beyond expectations*. New York: free Press.
- Berry, L. L. and Parasuraman, A. 1991. *Marketing Service*. New York: The Free Press
- Bienstock, C. C., De Moranvile, C. W., and Smith, R. K. 2003. "Organizational citizenship behavior and service quality". *The Journal of Service Marketing*. Vol. 4, No. 5: 357-376.
- Brady, M. K., Cronin, J. J., and Brand, R. R. 2002. "Performance-only measurement of service quality: A replication and extension". *Journal of Business Research*. Vol. 55:17-31.
- Broomberg, J. dan Mill, A. 2004. Evaluating the quality of nursing care in the context of a comparison of contracted-out South African hospital. anne.mills@ishtm.ac.uk. 1-27.
- Casimir, G, Waldimin, D. A., Bartram, T., and Yang, S. 2006. "Trust and the relationship between leadership and follower performance: Opening the black box in Australia and China". *Journal of Leadership and Organizational Studies*. Vol. 12, No.3:68-84.
- Choi, J. H. 2006. The relationship among transformational leadership, organizational outcome, and service quality in the five major NCAA conferences. *Unpublished Doctoral Dissertation*. The Texas A & M University.
- Cleverly, W. O. 1993. "More efficient hospital are closing". *Journal Health Care financial Management*. Vol. 47, No. 5:82-84.
- Conel, J., Ferres, N., and Travaglione, T. 2003. "Engendering trust in manager-subordinate relationships predictors and outcomes". *Personal Review*. Vol. 32:569 -587.
- Dirks, K. T. and Ferrin D. L. 2002. "Trust in leadership: Meta-analytic finding and implications for research and practice". *Journal of Applied Psychology*. Vol. 87:611-628.
- Enhart, M. G., and Nauman, S. E. 2004. "Organizational citizenship behavior in work group: A group norms approach". *Journal of Applied Psychology*. Vol. 89, No. 6:960-974.
- Ferdinand, A. 2002. *Structural Equation Modeling dalam Penelitian Manajemen: Aplikasi model-model rumit dalam penelitian untuk tesis magister & disertasi doktor*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Feres, N., Travagoline, A., and Connel, J. 2000. "Trust: A precursor of the potential mediating effect of transformational leadership". *International Journal of Organizational Behavior*. Vol. 5, No. 8:242-263.

- Ghazali, I. 2008. *Model Persamaan Struktural Konsep dan Aplikasi dengan Program Amos 16.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gillespie, N. A., and Mann, L. 2004. "Transformational leadership and share value: The building blocks of trust". *Journal of Management Psychology*. Vol. 19, No. 6:588-606.
- Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., and Black, W. C. 1998. *Multivariate Data Analysis*. New Jersey: Prentice-Hall.
- Hui, C., Lam, S. S. K., and Schaubroack, J. 2001. "Can good citizens lead the way in providing quality service: A field quasi experiment". *Academy of Management Journal*. Vol. 44, No. 2:988-998.
- Jabnoun, N. and Rassai, A. J. AL. 2005. "Transformational leadership and service quality in UAE hospitals". *Managing Service Quality*. Vol. 15, No. 1:70-81.
- Jung, D. I., & Avolio, B. J. 2000. "Opening the black box: An experimental investigation of the mediating effect of trust and value congruence on transformational and transactional leadership". *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 21:949-964.
- Keller, R. T. 1995. "Transformational leader make a difference". *Research Technology Management*, 38(3), 41-44.
- Koh, W. L., Steers, R. M., and Terborg, J. R. 1998. "The effects of transformational leadership on teacher attitudes and student performance in Singapura". *Journal of Organizational Behavior*. Vol. 16, No. 4:319-333.
- Konovsky, M. A., and Pugh, S. D. 1994. "Citizenship behavior and social exchange". *Academy of Management Journal*. Vol. 37, No. 3:656-669.
- Korberg, C. S., Boss, R. W., Godman, E. A., Boss, A. D., and Monsen, E. W. 2005. "Empirical evidence of organizational citizenship behavior from the health care industry". *International Journal of public administration*. Vol. 28:417-436..
- LeBrasscur, R., Whissell, R., and Ojha, A. 2002. "Organizational learning, transformational leadership and implementation of continuous quality improvement in Canadian hospital". *Australian journal of Management*. Vol. 27, No. 2:141-162.
- Lepine, J. A., Eres. A., and Johnson, D. E. 2002. "The nature and dimensionality of organizational citizenship behavior. A critical review and metaanalysis". *Journal of Applied Psychology*. Vol. 87, No. 1:52- 65.
- Masi, R. J., and Cooke R. A. 2000. "Effects of transformational leadership on subordinate motivation, empowering norm, and organizational productivity". *The International Journal of Organizational Analysis*. Vol. 8, No. 9:16-47.
- Mayer, R. C, and Gavin, M. B. 2005. "Trust in management and performance: Who minds the shop while the employees watch the boss". *Academy of Management Journal*, Vol. 48, No. 5:874-888.
- Morgan, R. M., Hunt, S. D. 1994. "The commitment-trust theory of relationship marketing." *Journal of Marketing*. Vol. 58:20-38.
- Muchiri, M. K. 2002. "The effect of leadership style on organizational citizenship behavior and commitment". *Gadjahmada International Journal of Business*. Vol. 4:265-293.
- Neuberg, S. L., Cialdini, R. B., Brown, S. L., Luce, C., Sagarin, B. J., and Lewis (1997). "Does empathy lead to anything more than supervisory helpin? Comment on Batson et al. (1997)". *Journal of Personality and Sosial psychology*. Vol. 73, No. 3:510-516.
- O'connel, M. S., Doverspike, D., Watts, C. N., and Hattrup, K. 2001. "Predictors of organizational citizenship behavior among Mexican retail sales-

- people". *The International Journal of Organizational Analysis*. Vol. 9, No. 3:272-280.
- Organ, D. W. 1988. *Organizational citizenship behavior*. Lexington, M.A.:Lexington.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. 1985. "A conceptual model of service quality and its implications for future research". *Journal of marketing*. Vol. 49:41-51.
- Parasuraman, A., Zeithaml, V. A., and Berry, L. L. 1988. "Servqual: A multiple item scale for measuring consumer perceptions of service quality". *Journal of Retailing*. Vol. 64, No. 1:12-40.
- Pillai, R., Schriesheim, C., and Williams, E. 1999. "Fairness perceptions and trust as mediators for transformational and transactional leadership: A two sample study". *Journal of Management*. Vol. 25, No. 26:897-933.
- Piccolo, R. F., and Colquit, J. A. 2006. "Transformational leadership and job behaviors the mediating role of core job characteristic". *Academy of Management Journal*. Vol. 49, No. 3:327-340.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. 1990. "Transformational leader behaviors and their effects of followers, trust in leader, satisfaction, and organizational citizenship behaviors". *Leadership Quarterly*. Vol. 1, No. 2:107-147.
- Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., and Bommer, W. H. 1996. "Transformational leader behaviors and substitutes for leadership as determinants employee satisfaction, commitment, trust, and organizational citizenship behaviors". *Journal of Management*. Vol. 22, No. 2:259-298.
- Podsakoff, P. M., Ahearne, M., and MacKenzie, S. B. 1997. "Organizational citizenship behavior and the quantity and quality of work group performance". *Journal of Applied Psychology*. Vol. 82, No. 4:262-271.
- Ryan, P. 2009. "Integrated Theory of Health Behavior Change: Background and intervention development. Clinical Nurse Specialist". *The Journal for advanced practice Nursing*. Vol. 23, No. 3:161-171.
- Wagner, S. L., and Rush, H. C. 2000. "Altruistic organizational citizenship behavior: Context, disposition, and age". *The Journal Social Psychology*. Vol. 140, No. 3:379-391.
- Williams, L. J., & Anderson, S. E. 1991. "Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors". *Journal of Management*. Vol. 17:601-617.
- Wong, Y. T., Wong, C. S., and Ngo, Y. H. 2002. "Loyalty to supervisor, and trust in supervisor of workers in Chinese joint venture: A test of two competing model". *International Journal of Human Resource Management*. Vol. 13, No. 6:883-900.
- Yoon, M. H., and Suh, J. 2003. "Organizational citizenship behaviors and service quality as external effectiveness of contact employees". *Journal of Business Research*. Vol. 56, No. 8:597-611.
- Yukl, G. 2010. *Leadership in organization*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.

PENGARUH KRITERIA MISKIN TERHADAP PILIHAN STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Djoko Susanto

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: rudy@stieykpn.ac.id

ABSTRACT

Ten years local-autonomy which has been held in Indonesia has caused several positive and negative impact in local economic development, including in DIY Province. One of the local development impact in Province DIY is poverty. Poverty as an issue and economic problem is the impact of local development or other factor that must be solved so that the appropriate solution will be obtained to overcome it. The Poverty Reduction Strategy is the strategy in solving the problem faced by the poor and the limited resources to realize the fulfillment of basic rights. Using ANOVA 2 ways (2 treatments) are region treatment and poverty treatment in Regencies of Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul and Yogyakarta City in Province of DIY (alpha 5%).

Keywords: poverty, region treatment, poverty treatment

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi masalah fenomenal sepanjang sejarah Indonesia sebagai *nation state*, sejarah sebuah negara yang salah memandang dan

mengurus kemiskinan. Dalam negara yang salah urus, tidak ada persoalan yang lebih besar, selain persoalan kemiskinan (Sahdan, 2005). Kemiskinan telah membatasi hak rakyat untuk memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan, hak rakyat untuk memperoleh perlindungan hukum, hak rakyat untuk memperoleh rasa aman, hak rakyat untuk memperoleh akses atas kebutuhan hidup (sandang, pangan, dan papan) yang terjangkau, hak rakyat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan pendidikan, hak rakyat untuk memperoleh akses terhadap kebutuhan kesehatan, hak rakyat untuk memperoleh keadilan, hak rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik dan pemerintahan, hak rakyat untuk berinovasi, hak rakyat menjalankan hubungan spiritualnya dengan Tuhan, dan hak rakyat untuk berpartisipasi dalam menata dan mengelola pemerintahan dengan baik.

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan kronis, sehingga cara penanggulangan kemiskinan pun membutuhkan analisis yang tepat, melibatkan semua komponen permasalahan, serta diperlukan strategi penanganan yang tepat, berkelanjutan, dan tidak bersifat temporer. Sejumlah variabel dapat dipakai untuk melacak persoalan kemiskinan, dan dari variabel ini dihasilkan serangkaian strategi dan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang tepat sasaran dan berkesinambungan. Selama beberapa dekade, upaya penanggulangan kemiskinan

dilakukan dengan penyediaan kebutuhan dasar seperti pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, perluasan kesempatan kerja, pembangunan pertanian, pemberian dana bergulir melalui sistem kredit, pembangunan prasarana dan pendampingan, penyuluhan sanitasi, dan sebagainya. Berdasarkan serangkaian cara dan strategi penanggulangan kemiskinan tersebut, semuanya berorientasi material, sehingga keberlanjutannya sangat tergantung pada ketersediaan anggaran dan komitmen pemerintah. Di samping itu, tidak adanya tatanan pemerintahan yang demokratis menyebabkan rendahnya akseptabilitas dan inisiatif masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan dengan cara mereka sendiri, sekalipun sudah berada dalam era Otonomi Daerah (Sulekale, 2003).

Pemahaman mengenai “kemiskinan” mestilah beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Dalam pemahaman ini harus diakui bahwa seluruh masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama. Oleh karena itu, apabila ada kondisi dimana seseorang atau sekelompok laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat maka hal itulah yang disebut dengan kemiskinan. Kemiskinan juga harus dipandang sebagai masalah multidimensional, tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Pendekatan *right based approach* mengandung arti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya.

Situasi kemiskinan yang terungkap dalam sajian angka-angka hanyalah ukuran kemiskinan yang

didasarkan atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pemenuhan hak-hak dasar antara lain: terbatasnya kecukupan dan mutu pangan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan kesehatan, terbatasnya akses dan rendahnya mutu layanan pendidikan, terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha, terbatasnya akses layanan perumahan, terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi, lemahnya kepastian kepemilikan dan penguasaan tanah, memburuknya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, lemahnya jaminan rasa aman, dan lemahnya partisipasi.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) seperti provinsi lainnya juga mengalami masalah yang berkaitan dengan kemiskinan penduduk. Menurut Mubyarto (2002), pada tahun 1973 David Penny dan Masri Singarimbun mempublikasikan hasil penelitian tentang kemiskinan dan tekanan penduduk di Desa Sriharjo, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul dalam bentuk monografi di Cornell University berjudul *Population and Poverty in Rural Java: An Economic Arithmetic from Sriharjo*. Monografi inilah yang menjadikan Desa Sriharjo terkenal dan Provinsi DIY menjadi simbol kemiskinan di Indonesia. Sejumlah peneliti dari dalam dan luar negeri berdatangan untuk mendalami strategi bertahan hidup dari penduduk perdesaan yang kemiskinannya relatif parah seperti di Desa Sriharjo tersebut. Kini, tigapuluh tujuh tahun kemudian, Provinsi DIY masih mempunyai masalah yang sama dengan kemiskinan penduduk walaupun sudah banyak program dan kegiatan dari pemerintah pusat dan daerah yang dijalankan untuk menanggulangi masalah kemiskinan penduduk tersebut.

Kondisi kemiskinan di Provinsi DIY ditunjukkan sebagai berikut. Indikator ketimpangan distribusi pendapatan dapat dianalisis dari angka Rasio Gini (RG), ukuran ketimpangan menurut Kriteria Bank Dunia, dan Indeks Williamson. Pada tahun 2003–2008, nilai Rasio Gini dan ukuran ketimpangan Kriteria Bank Dunia menunjukkan pola yang hampir sama, dimana distribusi pendapatan di Provinsi DIY cenderung semakin merata. Namun demikian, nilai Indeks Williamson tidak menunjukkan pola yang persis sama. Nilai Rasio Gini

berkisar antara 0–1. Semakin mendekati 1 artinya ketimpangan pendapatan di antara penduduk semakin melebar. Jika ketimpangan semakin mendekati 0 berarti distribusi pendapatan di antara penduduk semakin merata. Mengacu pada tiga tingkatan nilai RG menurut Oshima, maka nilai RG Provinsi DIY yang berada pada kisaran 0,3 – 0,5 menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di wilayah ini termasuk menengah atau moderat.

Tabel 1
Nilai Rasio Gini di Ppropinsi DIY, Tahun 2003-2008

Tahun	Rasio Gini
2003	0,3440
2004	0,3727
2005	0,3867
2006	0,3684
2007	0,3263
2008	0,3159

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008. Data diolah.

Keterangan:

Nilai Rasio Gini

rendah = <0,3; sedang = 0,3–0,5; tinggi = > 0,5.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 (Maret 2008) berdasarkan data BPS Provinsi DIY menurun 17,2 ribu jiwa atau 2,71% menjadi 616,3 ribu jiwa, dari posisinya pada tahun 2007 yaitu 633,5 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin oleh BPS dihitung berdasarkan kebutuhan dasar individu yang dinilai dalam bentuk rupiah. Pada Maret 2008, garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran makanan adalah Rp141.597,00 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan totalnya adalah Rp194.830,00 per kapita per bulan (BPS Provinsi DIY, 2008). Berdasarkan pengolahan data penduduk miskin di antaranya dapat dihasilkan indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2) yang dapat menunjukkan sisi lain dari masalah kemiskinan. P_1 merupakan kesenjangan antara rata-rata standar hidup penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan terhadap garis kemiskinan. P_2 merupakan kesenjangan antarpenduduk miskin. Pada Maret 2008, angka P_1 dan P_2 relatif rendah, dibandingkan kondisinya pada Maret 2007, masing-

masing 3,35 dan 0,92 (Maret 2007: 3,80 dan 1,12). Artinya tingkat kesenjangan semakin menurun, sehingga diharapkan upaya pengentasannya akan lebih mudah.

Berdasarkan penyebaran secara spasial, penduduk miskin pada Maret 2008 tersebar hampir merata, yaitu 52,60% di perkotaan dan 47,40% di perdesaan (BPS Provinsi DIY, 2008). Sebagian besar penduduk miskin berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data sebanyak 472.082 rumah tangga petani di Provinsi DIY pada tahun 2007, 80,29% di antaranya adalah petani gurem, yaitu petani dengan skala usaha mikro kecil dan kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar. Jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di tingkat nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Kondisi ini dapat diperhatikan mulai tahun 2002, dimana penduduk miskin DIY mencapai 20,14% dari jumlah penduduk, sementara di tingkat nasional hanya 18,20%. Hingga Maret 2008, tingkat kemiskinan di DIY masih lebih tinggi, yaitu 18,32% dibandingkan angka nasional yaitu 15,42%.

Selama tahun 2003 – 2010 perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY cenderung berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 menurun 3,23%. Pada tahun 2005, jumlah ini kembali meningkat sebesar 1,56% seiring dengan kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang diperkirakan telah menyebabkan turunnya daya beli masyarakat DIY. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY kembali meningkat sebesar 3,87%. Laju kenaikan yang relatif lebih besar dari tahun sebelumnya ini diperkirakan disebabkan oleh dua faktor. Pertama, dampak kenaikan BBM Oktober 2005 diperkirakan masih berlanjut pada tahun 2006. Kedua, bencana alam gempa bumi Mei 2006. Tahun 2007 memberikan angin segar pada perekonomian Provinsi DIY. Salah satu indikatornya, jumlah penduduk miskin menurun 2,54%. Penurunan ini diperkirakan dimotori oleh program pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa bumi.

Pada Mei 2008 harga BBM kembali dinaikkan dengan besaran yang signifikan, rata-rata sekitar 26%. Namun demikian, dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi kelas bawah, diperkirakan dapat ditopang sementara oleh keberadaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sejak pertengahan tahun hingga akhir tahun 2008. Karenanya, di tahun 2008,

jumlah penduduk miskin kembali menurun 2,72%. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah penduduk miskin masing-masing menjadi 585.780 jiwa dan 577.300 jiwa. Selama kurun waktu 2003-2010, pertumbuhan penduduk miskin di Provinsi DIY rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,35%.

Tabel 2
PERKEMBANGAN DAN PERTUMBUHAN
PENDUDUK MISKIN
DI PROVINSI DIY, TAHUN 2003 – 2010

Tahun	Jumlah (jiwa)	Pertumbuhan (%)
2003	636.800	-
2004	616.200	-3.23%
2005	625.800	1.56%
2006	650.000	3.87%
2007	633.500	-2.54%
2008	616.300	-2.72%
2009	585.780	-4.95%
2010	577.300	-1.45%

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2008 dan 2011. Data diolah.

Berdasarkan perbandingan nilai nominal PDRB sebagai indikator ekonomi makro regional Provinsi DIY antarwaktu dan antardaerah, ternyata Kabupaten Sleman menghasilkan nilai PDRB terbesar secara relatif dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya, sedangkan Kabupaten Kulonprogo merupakan kabupaten dengan nilai PDRB terkecil. Selama kurun waktu 10 (sepuluh) tahun, kinerja perekonomian Kabupaten Sleman dan Kota Yogyakarta melampaui kabupaten lainnya di Provinsi DIY. Kondisi tersebut menunjukkan, bahwa kedua wilayah merupakan penopang perekonomian di Provinsi DIY. Kondisi ini selama kurun waktu tersebut bertahan tidak terjadi pergeseran, artinya tidak ada kabupaten/kota yang dapat melampaui wilayah lainnya.

Dilihat dari sisi kemampuan wilayah, perbedaan nilai PDRB antarkabupaten/kota sangat tergantung pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki serta ditunjang dengan teknologi yang tersedia. Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo dengan luas wilayah hampir sepertiga wilayah Provinsi DIY, ternyata pada kurun waktu tersebut (2001-2010) hanya menempati urutan keempat dan kelima dalam hal

besaran nilai PDRB yang dihasilkan. Hal ini disebabkan perekonomian Kabupaten Gunungkidul dan Kulon Progo masih ditopang oleh sektor pertanian, sedangkan lahan pertanian di daerah tersebut relatif tandus dengan produktivitas rendah. Sementara itu, Kota Yogyakarta dengan luas wilayah terkecil tetapi dengan banyaknya kegiatan ekonomi di setiap sektor dan ditunjang oleh sarana dan prasarana serta teknologi yang lebih memadai mampu mencapai nilai PDRB yang lebih besar (urutan kedua). Apabila dianalisis per sektor, Kabupaten Gunungkidul lebih dominan di sektor pertanian dan sektor penggalian dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Kabupaten Sleman lebih unggul di sektor industri pengolahan, sektor konstruksi, dan sektor perdagangan, hotel, dan restorans sedangkan Kota Yogyakarta lebih unggul di sektor listrik dan air bersih; sektor pengangkutan dan komunikasi; sektor keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; serta sektor jasa-jasa.

Salah satu hal yang menjadi masalah klasik dalam suatu perekonomian pada umumnya adalah pemerataan kesejahteraan. Dalam program MDGs disebutkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, artinya pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan dalam distribusi pendapatan, penurunan angka kemiskinan, dan lingkungan hidup yang menjamin bagi keberlangsungan hidup manusia pada masa mendatang. Oleh karena itu, pencapaian PDRB yang tinggi tanpa disertai pemerataan pendapatan akan menimbulkan kesenjangan ekonomi. Untuk melihat seberapa jauh pemerataan pendapatan yang diperoleh masyarakat sangatlah sulit. Indikator yang cukup mendukung untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat adalah dengan PDRB per kapita. Angka tersebut diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB yang dihasilkan oleh suatu daerah/wilayah dengan jumlah penduduknya. Hanya melihat PDRB perkapita individu memang tidak dapat diketahui seberapa jauh disparitas pendapatan dalam suatu region, tetapi perlu membandingkan dengan daerah/wilayah lain sehingga disparitas antar region dapat diketahui. Perbandingan nilai PDRB per kapita antar kabupaten/kota di Provinsi DIY dapat menunjukkan terjadinya kesenjangan antardaerah.

Pertumbuhan ekonomi yang ingin dicapai oleh masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY adalah

pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang mendukung pencapaian pembangunan manusia. Korelasi positif pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tercermin dalam wujud perbaikan kualitas kehidupan seluruh masyarakat. Oleh karena itu, pembangunan secara prinsipil harus berfokus pada seluruh aset bangsa, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh masyarakat secara lebih merata, dan pelaksanaannya harus mengedepankan kerangka kerja kelembagaan. Indikator yang digunakan dalam pencapaian pembangunan manusia tersebut adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Berikut ini disajikan IPM masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY dan IPM Provinsi DIY tahun 2001-2009 pada Tabel 3.

Berdasarkan Tabel 3, nampak angka IPM semua Kabupaten dan Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengalami kenaikan. Hal lain yang dapat dilihat dari Tabel 3 adalah IPM untuk Kota selalu lebih tinggi daripada IPM untuk Kabupaten. Hal ini dapat dipahami bahwa fasilitas yang lebih lengkap untuk kota seperti fasilitas fisik, fasilitas pendidikan, dan fasilitas kesehatan karena faktor belanja modal dari pemerintah kota yang lebih banyak daripada belanja modal pemerintah kabupaten. Apabila dikaitkan lebih lanjut antara indikator IPM kabupaten/kota di Provinsi DIY (Tabel 3) yang selalu meningkat di sepanjang tahun 2001-2009 dengan indikator Rasio Gini (Tabel 1) dan Angka Pertumbuhan Penduduk Miskin (Tabel 2) yang semakin menurun maka nampak ada benang merah bagaimana mengukur keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan. Namun begitu, situasi kemiskinan yang terungkap dalam sajian angka-angka

tersebut hanyalah ukuran kemiskinan yang didasarkan atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Pengukuran kemiskinan yang dapat dipercaya dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Data kemiskinan yang baik dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terhadap kemiskinan, membandingkan kemiskinan antarwaktu dan daerah, serta menentukan target penduduk miskin dengan tujuan untuk memperbaiki kondisinya. Di samping tersedianya data makro yang akurat, ketersediaan profil kemiskinan menjadi sangat penting agar kebijakan program penanggulangan kemiskinan menjadi tepat sasaran dan dapat difokuskan sesuai dengan kebutuhan penduduk miskin tersebut. Profil kemiskinan diharapkan dapat mengungkap persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi oleh penduduk miskin dan akar persoalan yang selalu menjerat penduduk miskin sehingga tidak mampu terbebas dari kemiskinan dari waktu ke waktu.

Profil kemiskinan semestinya menyajikan informasi mengenai akar permasalahan yang dihadapi oleh berbagai segmen penduduk miskin dan sasaran geografis. Profil kemiskinan diharapkan mampu menjawab tentang apakah permasalahan lebih berakar pada orangnya, masalah infrastruktur/struktural atau masalah keterampilan, dan sebagainya. Informasi yang tersedia dalam Susenas tidak dapat mengungkapkan persoalan tersebut secara tuntas, karena lebih merupakan informasi tentang karakteristik rumah

Tabel 3
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
PROVINSI DIY, TAHUN 2001-2009

Kabupaten/Kota	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Kabupaten Bantul	65.8	68.4	69.9	71.5	71.9	71.97	72.78	73.38	73.75
Kabupaten Gunung Kidul	63.6	67.1	68.1	68.9	69.3	69.44	69.68	70.00	70.20
Kabupaten Kulon Progo	66.4	69.4	70.2	70.9	71.5	72.01	72.76	73.26	73.77
Kabupaten Sleman	69.8	72.7	74.9	75.1	75.6	76.22	76.70	77.24	77.70
Kota Yogyakarta	73.4	75.3	76.3	77.4	77.7	77.81	78.14	78.95	79.30
Provinsi DIY	68.7	70.8	71.8	72.9	73.5	73.7	74.15	74.88	75.23

Sumber: BPS. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia. Tahun 2001-2009.*

tangga miskin. Namun demikian, perbedaan karakteristik rumah tangga miskin dan rumah tangga tidak miskin dapat mengungkap beberapa catatan mengenai persoalan mendasar kemiskinan.

Setiap daerah mempunyai corak pembangunan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh karena itu, dalam perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertama-tama perlu mengenali karakter ekonomi, sosial, dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian, tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah termasuk strategi penanggulangan kemiskinan yang berlaku untuk semua daerah. Secara umum dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan yang diprakarsai pemerintah pusat mempunyai ciri-ciri 1) Kebijakan terpusat dan seragam; 2) Lebih bersifat karitatif; 3) Memposisikan masyarakat sebagai obyek, yaitu tidak melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses penanggulangan kemiskinan; 4) Memandang masalah kemiskinan hanya dari segi ekonomi; 5) Menganggap bahwa permasalahan dan penanggulangan kemiskinan bersifat sama; 6) Kurang memperhatikan keragaman budaya; 7) Pendekatannya *top down*; 8) Terdapat tumpang-tindih kelompok sasaran antara program yang satu dan program lainnya; dan 9) Kebijakannya bersifat sektoral.

Pelibatan berbagai potensi dan peluang daerah dan berhubungan dengan kapasitas para *stakeholders* telah digagas oleh Pemerintah Provinsi DIY dan telah diujicobakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menangani program penanggulangan kemiskinan terpadu berlabel “Semangat Gotong Royong Agawe Majune Ngayogyakarta” atau *Segoro Amarto*. *Pilot Project* program ini telah diterapkan di 3 kelurahan di Kota Yogyakarta, yaitu di Kricak, Tegalpanggung, dan Sorosutan selama 2 tahun dan berhasil menurunkan angka kemiskinan lebih cepat daripada 45 kelurahan yang lain. *Segoro Amarto* merupakan sebuah gerakan bersama seluruh komponen masyarakat untuk penanggulangan kemiskinan. Gerakan ini lebih menekankan pada perubahan nilai yang tercermin pada sikap, perilaku, gaya hidup, dan wujud kebersamaan dalam kehidupan menjadi lebih baik mencakup semua aspek fisik dan non fisik (Kompas, 17/1/2011). Kemiskinan juga berkaitan erat dengan nilai, oleh karenanya perlu *sharing* dari berbagai komponen masyarakat untuk saling mengisi dengan berbagai

potensinya, dengan harapan akan membangun nilai saling kepedulian (<http://www.antaranews.com>). Berdasarkan uraian tersebut, tujuan penelitian ini ingin menganalisis pengaruh kriteria miskin terhadap pilihan strategi penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY.

Manfaat penelitian ini untuk pengembangan ilmu pengetahuan (teori ekonomi pembangunan dan teori kemiskinan) khususnya yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota di Provinsi DIY, sebagai sumbangan bagi pemerintah kabupaten/kota dalam menanggulangi kemiskinan di kabupaten/kota, sebagai sumbangan bagi DPRD kabupaten/kota untuk mengetahui wewenang legislatif dalam penanggulangan kemiskinan di kabupaten/kota dengan menggunakan APBD yang sesuai peraturan perundangan yang berlaku untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat, dan sebagai sumbangan bagi pemerintah pusat untuk mengetahui dampak penanggulangan kemiskinan secara nasional di kabupaten/kota di Provinsi DIY, dan sebagai sumbangan referensi bagi peneliti berikutnya secara lebih luas dan rinci.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Menurut (Arsyad, 2004:45), Adam Smith menjelaskan dua aspek utama pertumbuhan ekonomi yaitu pertumbuhan output total dan pertumbuhan penduduk. Unsur pokok dalam pertumbuhan output total adalah sumberdaya alam yang tersedia (faktor produksi tanah), sumberdaya insani (jumlah penduduk), dan stok barang modal yang ada. Sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Artinya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output. Artinya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya

sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal sampai “batas maksimum” dari sumber alam. Pengaruh stok modal terhadap tingkat output total dapat secara langsung dan tak langsung. Pengaruh langsung adalah karena penambahan modal (sebagai input) akan langsung meningkatkan output, sedang pengaruh tak langsung adalah meningkatkan produktivitas per kapita yang dimungkinkan karena adanya spesialisasi dan pembagian kerja yang lebih tinggi. Semakin besar stok modal, semakin besar kemungkinan dilakukannya spesialisasi dan pembagian kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas per kapita.

Simon Kuznets, mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai peningkatan kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi bagi penduduknya. Pertumbuhan kemampuan ini disebabkan oleh kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan. Ada tiga komponen pokok penting, yaitu kenaikan output nasional secara terus menerus, kemajuan teknologi sebagai prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi, dan penyesuaian kelembagaan, sikap, dan ideologi. Simon Kuznets, memisahkan enam karakteristik proses pertumbuhan pada hampir semua negara maju, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan output per kapita dan penduduk, tingginya tingkat kenaikan produktivitas faktor produksi secara keseluruhan terutama produktivitas tenaga kerja, tingginya tingkat transformasi struktur ekonomi, tingginya tingkat transformasi sosial dan ideologi, kecenderungan negara-negara maju secara ekonomis untuk menjangkau seluruh dunia untuk mendapatkan pasar dan bahan baku, dan pertumbuhan ekonomi ini hanya terbatas pada sepertiga populasi dunia.

Menurut Kuncoro (1997) penyebab kemiskinan adalah 1) secara mikro, kemiskinan karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah, 2) kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia yang rendah, berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau

karena keturunan, dan 3) kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi yang berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya.

United Nations Development Program (UNDP) pada tahun 1990, memperkenalkan formula *human development index* (HDI) atau disebut pula dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM disusun dari tiga komponen yaitu lamanya hidup (angka harapan hidup), tingkat pendidikan (kombinasi antara angka melek huruf pada penduduk 15 tahun ke atas dengan dan rata-rata lamanya sekolah), dan tingkat kehidupan yang layak yang diukur dengan pengeluaran per kapita yang telah disesuaikan (*purchasing power parity*). Dengan demikian, konsep kesejahteraan masyarakat dengan memasukkan aspek kesehatan dan pendidikan bersama dengan aspek pangan, sandang, dan perumahan menjadi kesatuan dengan tingkat pendapatan telah memadukan antara pendekatan kuantitas dan kualitas hidup.

World Bank pada tahun 2000 merumuskan indikator kesejahteraan masyarakat sebagai indikator pembangunan ekonomi, khususnya pembangunan manusia dan kemiskinan. Rumusan indikator pembangunan itu disebut sebagai *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu penghapusan kemiskinan, pendidikan untuk semua, persamaan gender, perlawanan terhadap penyakit menular, penurunan angka kematian anak, peningkatan kesehatan ibu, pelestarian lingkungan hidup, dan kerjasama global. Keberhasilan pembangunan manusia dapat diukur dalam beberapa dimensi utama. Menurut World Bank, tingkat pencapaian pembangunan manusia dapat diamati melalui dimensi pengurangan kemiskinan (*decrease in poverty*), peningkatan kemampuan baca tulis (*increase in literacy*), penurunan tingkat kematian bayi (*decrease in infant mortality*), peningkatan harapan hidup (*life expectancy*) dan penurunan dalam ketimpangan pendapatan (*decrease income inequal-*

ity).

Obyek penelitian adalah semua kabupaten/kota di Propinsi DIY karena berdasarkan pertimbangan bahwa Propinsi DIY mempunyai masalah kemiskinan yang paling berat di antara Provinsi lainnya di Pula Jawa-Bali. Waktu penelitian adalah dari tahun 2001 sampai dengan 2008 karena tahun 2001 sampai dengan 2008 merupakan pelaksanaan 8 tahun pertama Otonomi Daerah per 1 Januari 2001. Secara umum, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam pemerintahan selama 8 tahun adalah hal yang seharusnya dilakukan sehingga akan diperoleh hasil monitoring dan evaluasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan pada waktu-waktu mendatang. Di samping itu, otonomi daerah telah memberikan wewenang kebijakan ekonomi termasuk penanggulangan kemiskinan sebagai dampak pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas di kabupaten/kota yang lebih besar kepada daerah sehingga dapat dilihat keberhasilan kebijakan penanggulangan kemiskinan di daerah, khususnya kabupaten/kota di Provinsi DIY.

Menurut Santosa dkk. (2003), telah dilakukan penelitian tentang evaluasi program penanggulangan kemiskinan di Yogyakarta secara kuantitatif dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan penerima program yang dilakukan mulai September 2002 sampai dengan Januari 2003. Pengambilan sampel dilakukan secara acak. Jumlah responden program kerja mandiri (PKM) dalam penelitian ini adalah 80 responden. yang berasal dari 3 jenis program yaitu program IDT, program PPK, dan program P2KP, masing-masing sebesar 38 responden, 32 responden, dan 10 responden. Responden ini diambil dari 6 desa di 4 kabupaten dan 1 kota di DIY. Empat lokasi pertama berada di lingkungan perdesaan di empat kabupaten di propinsi DIY, yaitu desa Karangawen di kabupaten Gunungkidul, desa Srikayangan di kabupaten Kulonprogo, desa Selopamioro di kabupaten Bantul, dan desa Sambirejo di kabupaten Sleman, sedangkan dua lokasi terakhir adalah kelurahan Purwokinanti dan kelurahan Mantrijeron yang berada di kota Yogyakarta. Simpulan penelitian ini adalah 1) Pendapatan peserta Program Kerja Mandiri meningkat sebesar 32,33% untuk rumahtangga atau 3,87% untuk individu penerima program, sedangkan pendapatan peserta Program Padat Karya menurun sebesar 2%. Jumlah peserta program kerja mandiri yang miskin

menurun sebesar 26,1%, sedangkan jumlah peserta program padat karya yang miskin tetap. Nilai total Program kerja Mandiri sebesar 68,34%, sedangkan nilai total Program Padat Karya sebesar 20,38%; 2) Efisiensi penyaluran program dari Program kerja Mandiri lebih tinggi dibanding efisiensi penyaluran program dari Program Padat Karya. Tingkat yaitu sebesar 192,1%, sedangkan tingkat efisiensi penyaluran program Program Padat Karya sebesar 78,9%; dan 3) dan Kelangsungan dana untuk pelaksanaan Program Kerja Mandiri lebih tinggi dibanding kelangsungan dana untuk Program Padat Karya. Tingkat kelangsungan dana Program Kerja Mandiri sebesar 88,4%, sedangkan kelangsungan dana Program Padat Karya sebesar 54%.

Menurut Sahdan (2005), selama ini kebijakan penanggulangan kemiskinan, didesain secara sentralistik oleh pemerintah pusat yang diwakili BAPPENAS. BAPPENAS merancang program penanggulangan kemiskinan dengan dukungan alokasi dan distribusi anggaran dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan utang kepada Bank Dunia serta lembaga keuangan multinasional lainnya. Berkat alokasi anggaran yang memadai, pemerintah pusat menjalankan kebijakan sentralistik dengan program-program yang bersifat karitatif.

Suryanto meneliti tentang Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Kajian Teoritis dan Aplikasi Anggaran (2005). Menurut Suryanto (2005:13), pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kebijakan yang didasarkan temuan terdahulu maupun gambaran umum yang dialami di wilayah penelitian. Gambaran terhadap kondisi desentralisasi fiskal dan kesejahteraan masyarakat dijelaskan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian Suryanto menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi fiskal belum banyak bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam mengurangi tingkat kemiskinan penduduk karena adanya kesenjangan antara perencanaan dengan kebutuhan masyarakat di daerah (Suryanto dkk., 2005:67).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1a: Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.

- H1b:** Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY.
- H2a:** Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
- H2b:** Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Sleman Provinsi DIY.
- H3a:** Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.
- H3b:** Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY.
- H4a:** Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul Provinsi DIY.
- H4b:** Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Bantul Provinsi DIY.
- H5a:** Ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta Provinsi DIY.
- H5b:** Ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di

Kota Yogyakarta Provinsi DIY.

Mengingat seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, maka prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara data dikumpulkan dari instansi terkait antara lain Bappeda kabupaten/kota dan Provinsi DIY, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut diperoleh dari berbagai laporan/buku/*compact disk* yang dipublikasikan oleh instansi terkait. Artikel pendukung studi dikumpulkan melalui *website* yang berupa referensi dari terbitan berkala, buku, makalah, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian. Data sekunder yang tersedia dikumpulkan, diteliti, didiskusikan, dan diolah dengan berbagai pihak yang berkompeten agar data tersebut valid. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji ANOVA 2 arah. Dalam penelitian ini a ditetapkan sebesar 5%.

HASIL PENELITIAN

Menurut Bappeda DIY (2008), berdasarkan *Survey Pendataan Program Perlindungan Sosial (PPLS)* tahun 2008 dan Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi DIY Tahun 2008, diperoleh data Rumah Tangga Miskin per Kabupaten/Kota di Provinsi DIY seperti yang ditunjukkan pada Tabel 4 sampai dengan Tabel 8 berikut ini:

Tabel 4
RINCIAN RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN KULON PROGO, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir		Kategori		% FakirMiskin	% Jumlah	Jumlah
		Miskin	%	Miskin	%			
Temon	15	1,209	45.73	1,108	41.91	327	12.37	2,644
Wates	8	1,635	51.08	1,324	41.36	242	7.56	3,201
Panjatan	11	1,469	41.95	1,608	45.92	425	12.14	3,502
Galur	7	1,416	54.38	1,035	39.75	153	5.88	2,604
Lendah	6	1,714	49.68	1,386	40.17	350	10.14	3,450
Sentolo	8	1,108	27.65	2,201	54.93	698	17.42	4,007
Pengasih	7	2,011	42.05	2,115	44.23	656	13.72	4,782
Kokap	5	1,179	24.41	2,747	56.87	904	18.72	4,830
Girimulyo	4	572	16.00	2,053	57.44	949	26.55	3,574
Nanggulan	6	925	38.13	1,146	47.24	355	14.63	2,426
Kalibawang	4	1,276	33.68	1,994	52.63	519	13.70	3,789
Samigaluh	7	1,622	35.76	1,864	41.09	1,050	23.15	4,536
Jumlah	88	16,136	37.23	20,581	47.48	6,628	15.29	43,345

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, III1 – III4).

Tabel 5
RINCIAN RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN SLEMAN, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir Miskin	%	Kategori Miskin	% FakirMiskin	%	Jumlah
Moyudan	4	549	26.74	1,267	61.71	237	2,053
Minggir	5	508	16.08	2,125	67.27	526	3,159
Seyegan	5	713	18.65	2,246	58.73	865	3,824
Godean	7	898	27.87	2,071	64.28	253	3,222
Gamping	5	1,283	38.39	1,698	50.81	361	3,342
Mlati	5	1,599	36.41	2,198	50.05	595	4,392
Depok	3	1,191	47.45	1,154	45.98	165	2,510
Berbah	4	1,070	43.20	1,167	47.11	240	2,477
Prambanan	6	777	20.88	2,156	57.94	788	3,721
Kalasan	4	972	27.71	2,044	58.27	492	3,508
Ngemplak	5	757	26.05	1,748	60.15	401	2,906
Ngaglik	6	713	31.89	1,245	55.68	278	2,236
Sleman	5	1,145	22.61	2,805	55.39	1,114	5,064
Tempel	8	620	15.54	2,496	62.57	873	3,989
Turi	4	418	19.90	1,322	62.95	360	2,100
Pakem	5	411	30.35	766	56.57	177	1,354
Cangkringan	5	561	17.99	2,063	66.14	495	3,119
Jumlah	86	14,185	26.78	30,571	57.71	8,220	52,976

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, III7 – III9).

Tabel 6
RINCIAN RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir Miskin	%	Kategori Miskin	% FakirMiskin	%	Jumlah
Panggung	11	1,877	46.58	1,546	38.36	607	4,030
Purwosari	5	1,060	60.40	420	23.93	275	1,755
Paliyan	7	2,679	51.52	1,893	36.40	628	5,200
Sapto Sari	7	1,557	26.01	2,894	48.34	1,536	5,987
Tepus	9	1,624	35.69	1,452	31.91	1,474	4,550
Tanjungsari	5	1,483	59.27	150	6.00	869	2,502
Rongkop	16	1,971	47.36	1,447	34.77	744	4,162
Girisubo	8	1,502	48.83	1,066	34.66	508	3,076
Semanu	5	3,862	53.88	2,438	34.01	868	7,168
Ponjong	11	3,323	51.87	1,943	30.33	1,140	6,406
Karangmojo	9	3,773	46.00	2,950	35.97	1,479	8,202
Wonosari	14	3,714	57.18	1,720	26.48	1,061	6,495
Playen	13	3,671	47.92	2,617	34.16	1,373	7,661
Paluk	11	2,783	73.84	783	20.77	203	3,769
Gedang Sari	7	3,212	53.99	2,060	34.63	677	5,949
Nglipar	7	2,316	48.81	1,744	36.75	685	4,745
Ngawen	6	2,918	55.93	1,279	24.52	1,020	5,217
Semin	10	2,975	39.68	2,689	35.87	1,833	7,497
Jumlah	161	46,300	49.06	31,091	32.95	16,980	94,371

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, III13 – III16).

Tabel 7
RINCIAN RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN BANTUL, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir Miskin	%	Kategori Miskin	% FakirMiskin	%	Jumlah	
Srandakan	2	863	35.24	1,392	56.84	194	7.92	2,449
Sanden	4	856	28.61	1,702	56.89	434	14.51	2,992
Kretek	5	316	19.24	945	57.55	381	23.20	1,642
Pundong	3	878	34.23	1,444	56.30	243	9.47	2,565
Bambang Lipuro	3	883	29.88	1,657	56.07	415	14.04	2,955
Pandak	4	1,291	27.01	2,916	61.00	573	11.99	4,780
Bantul	5	1,176	30.53	2,218	57.58	458	11.89	3,852
Jetis	4	990	30.44	1,784	54.86	478	14.70	3,252
Imogiri	8	1,723	30.31	3,145	55.32	817	14.37	5,685
Dlingo	6	566	17.22	2,469	75.14	251	7.64	3,286
Pleret	5	1,504	40.41	1,947	52.31	271	7.28	3,722
Piyungan	3	1,562	37.22	2,042	48.65	593	14.13	4,197
Banguntapan	8	2,955	53.48	2,279	41.25	291	5.27	5,525
Sewon	4	2,445	41.18	3,110	52.37	383	6.45	5,938
Kasihani	4	1,992	33.46	3,301	55.44	661	11.10	5,954
Pajangan	3	753	32.71	1,319	57.30	230	9.99	2,302
Sedayu	4	735	22.34	2,027	61.61	528	16.05	3,290
Jumlah	75	21,488	33.37	35,697	55.44	7,201	11.18	64,386

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, III20 – III22).

Tabel 8
RINCIAN RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KOTA YOGYAKARTA, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir Miskin	%	Kategori Miskin	% FakirMiskin	%	Jumlah	
Mantrijeron	3	710	47.75	759	51.04	18	1.21	1,487
Kraton	3	389	41.87	514	55.33	26	2.80	929
Mergangsan	3	775	46.94	835	50.58	41	2.48	1,651
Umbulharjo	7	1,328	46.16	1,467	50.99	82	2.85	2,877
Kotagede	3	656	49.14	665	49.81	14	1.05	1,335
Gondokusuman	5	756	45.57	884	53.29	19	1.15	1,659
Danurejan	3	553	39.25	807	57.27	49	3.48	1,409
Pakualaman	2	237	47.88	254	51.31	4	0.81	495
Gondomanan	2	350	34.21	638	62.37	35	3.42	1,023
Ngampilan	2	315	39.67	448	56.42	31	3.90	794
Wirobrajan	3	459	41.92	619	56.53	17	1.55	1,095
Gedong Tengen	2	602	49.71	599	49.46	10	0.83	1,211
Jetis	3	458	33.07	899	64.91	28	2.02	1,385
Tegalrejo	4	894	38.35	1,401	60.10	36	1.54	2,331
Jumlah	45	8,482	43.10	10,789	54.82	410	2.08	19,681

Sumber: Bappeda Provinsi DIY, (2008, III26 – III27).

Apabila data Rumah Tangga Miskin (RTM) masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY sebagai hasil studi Bappeda Provinsi DIY Tahun 2008 (Tabel 4 sampai dengan Tabel 8) diringkas maka akan diperoleh Tabel 9 dan Gambar 1. Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 1, nampak jumlah RTM untuk kategori hampir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul (46.300), kategori miskin terbanyak di Kabupaten Bantul (35.697), dan kategori fakir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul (16.980). Apabila dilihat pada

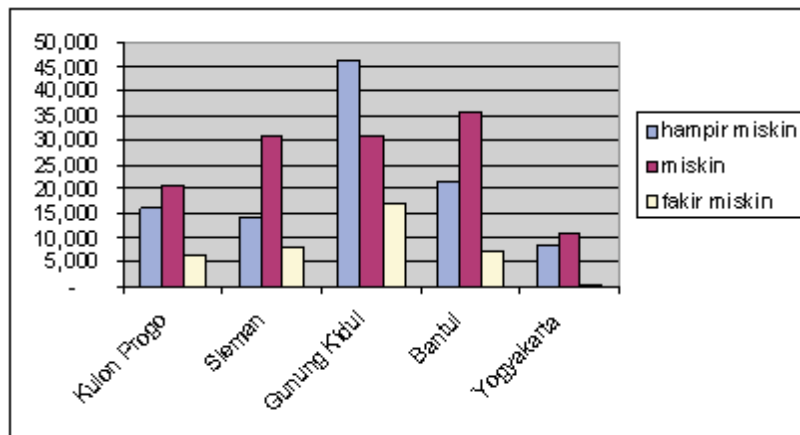
Tabel 9, nampak penduduk di Provinsi DIY dalam kategori miskin merupakan jumlah terbesar terbesar karena 46,85% (hampir 50%) RTM di Provinsi DIY merupakan kategori miskin.

Berdasarkan data pada Tabel 4 sampai dengan Tabel 8 tentang Rincian Rumah Tangga Miskin di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY, maka dapat dilakukan analisis statistik ANOVA 2 arah yang hasilnya disajikan sebagai berikut:

Tabel 9
RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DIY, TAHUN 2008

Kecamatan	Desa/ Kelurahan	Hampir Miskin	%	Kategori Miskin	%	Fakir Miskin	%	Jumlah
Kulon Progo	88	16.136	37,23%	20.581	47,48%	6.628	15,29%	43.345
Sleman	86	14.185	26,78%	30.571	57,71%	8.220	15,52%	52.976
Gunung Kidul	161	46.300	49,06%	31.091	32,95%	16.980	17,99%	94.371
Bantul	75	21.488	33,37%	35.697	55,44%	7.201	11,18%	64.386
Yogyakarta	45	8.482	43,10%	10.789	54,82%	410	2,08%	19.681
Provinsi DIY	455	106.591	38,79%	128.729	46,85%	39.439	14,35%	274.759

Sumber: Bappeda (2008), data diolah.



Gambar 1
RUMAH TANGGA MISKIN (RTM) DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI DIY, TAHUN 2008
Sumber: Bappeda (2008), data diolah.

Tabel 10
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN KULON PROGO PROVINSI DIY

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	4728896.991	35	135111.3426	1.000986509	0.485649612	1.590645406
Columns	34547565.69	2	17273782.84	127.9746263	4.15128E-24	3.127675601
Error	9448472.981	70	134978.1854			
Total	48724935.66	107				

Sumber: Tabel 4. Data diolah.

Tabel 11
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN SLEMAN PROVINSI DIY

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	7925136.562	50	158502.7312	0.998194087	0.492052957	1.477231314
Columns	36299494.21	2	18149747.1	114.3006818	1.46734E-26	3.087295893
Error	15878949.12	100	158789.4912			
Total	60103579.9	152				

Sumber: Tabel 5. Data diolah.

Tabel 12
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL PROVINSI DIY

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	17698615.11	53	333936.1342	1.002868911	0.484648001	1.461182126
Columns	109228403.4	2	54614201.72	164.016048	3.56905E-33	3.082014501
Error	35295969.22	106	332980.8417			
Total	162222987.8	161				

Sumber: Tabel 6. Data diolah.

Tabel 13
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KABUPATEN BANTUL PROVINSI DIY

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	13324593.57	50	266491.8714	1.002909316	0.484407528	1.477231314
Columns	53720401.53	2	26860200.76	101.0850554	9.7146E-25	3.087295893
Error	26571881.14	100	265718.8114			
Total	93616876.24	152				

Sumber: Tabel 7. Data diolah.

Tabel 14
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPIR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DI KOTA YOGYAKARTA PROVINSI DIY

ANOVA						
Source of Variation	SS	df	MS	F	P-value	F crit
Rows	2236747.873	41	54554.82617	0.995080315	0.495219287	1.536882272
Columns	6024902.587	2	3012451.294	54.94712735	7.25817E-16	3.107891302
Error	4495612.746	82	54824.54568			
Total	12757263.21	125				

Sumber: Tabel 8. Data diolah.

Berdasarkan Tabel 10 sampai dengan Tabel 14 maka dapat diringkas hasil uji statistik ANOVA 2 arah seperti yang disajikan pada Tabel 15.

PEMBAHASAN

Hasil uji ANOVA 2 arah menunjukkan bahwa ada tidak perbedaan jumlah orang miskin menurut kecamatan di masing-masing Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY dan ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Artinya, faktor wilayah beserta permasalahan dalam masing-masing wilayah dalam Kabupaten/Kota yang sama tidak berpengaruh terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY tetapi kriteria miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin

berpengaruh terhadap jumlah orang miskin di Kabupaten Kulon Progo, Sleman, Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Dengan demikian, strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY tidak akan bersifat seragam dan massif yang berlaku untuk seluruh kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin tetapi akan bersifat selektif yang tergantung dari jenis masing-masing kriteria miskin. Strategi penanggulangan kemiskinan di Provinsi DIY yang seragam dan massif yang berlaku untuk seluruh kriteria miskin yang meliputi hampir miskin, miskin, dan fakir miskin hanya akan menimbulkan kegagalan dalam upaya menanggulangi kemiskinan karena mengabaikan faktor jenis kriteria miskin tersebut.

Selama tahun 2003 – 2010 perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY cenderung berfluktuasi. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2004 menurun 3,23%. Pada tahun 2005, meningkat sebesar 1,56% seiring dengan kenaikan harga BBM Oktober 2005 yang diperkirakan telah menyebabkan turunnya

Tabel 15
HASIL UJIANOVA 2 ARAH, UNTUK KRITERIA HAMPİR MISKIN, MISKIN, DAN FAKIR MISKIN
DIMASING-MASING KABUPATEN/KOTA PROVINSI DIY

Hipotesis	Source of Variation	F test	P value	Pengujian
H1a	Rows	1.000986509	0.485649612	Tidak Signifikan
H1b	Coloms	127.9746263	4.15128E-24	Signifikan *)
H2a	Rows	0.998194087	0.492052957	Tidak Signifikan
H2b	Coloms	114.3006818	1.46734E-26	Signifikan *)
H3a	Rows	1.002868911	0.484648001	Tidak Signifikan
H3b	Coloms	164.016048	3.56905E-33	Signifikan *)
H4a	Rows	1.002909316	0.484407528	Tidak Signifikan
H4b	Coloms	101.0850554	9.7146E-25	Signifikan *)
H5a	Rows	0.995080315	0.495219287	Tidak Signifikan
H5b	Coloms	54.94712735	7.25817E-16	Signifikan *)

Sumber: Tabel 10 sampai dengan Tabel 14. Data diolah.

*) Signifikan pada alpha 5%.

daya beli masyarakat DIY. Pada tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi DIY kembali meningkat sebesar 3,87% karena kelanjutan dampak kenaikan BBM Oktober 2005 dan dampak bencana alam gempa bumi Mei 2006. Tahun 2007 memberikan angin segar pada perekonomian Provinsi DIY dengan turunnya penduduk miskin sebesar 2,54% karena program pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa bumi. Pada Mei 2008 harga BBM kembali dinaikkan dengan besaran yang signifikan, rata-rata sekitar 26%. Namun demikian, dampaknya terhadap daya beli masyarakat, khususnya masyarakat ekonomi kelas bawah, diperkirakan dapat ditopang sementara oleh keberadaan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada rumah tangga miskin sejak pertengahan tahun hingga akhir tahun 2008. Karenanya, di tahun 2008, jumlah penduduk miskin kembali menurun 2,72%. Pada tahun 2009 dan 2010, jumlah penduduk miskin masing-masing menurun sebesar 4,95% dan 1,45%. Selama kurun waktu 2003-2010, pertumbuhan penduduk miskin di Provinsi DIY rata-rata mengalami penurunan sebesar 1,35%.

Berdasarkan Tabel 9 dan Gambar 1, nampak jumlah RTM untuk kategori hampir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul (46.300), kategori miskin terbanyak di Kabupaten Bantul (35.697), dan kategori fakir miskin terbanyak di Kabupaten Gunung Kidul (16.980). Apabila dilihat pada Tabel 9, nampak penduduk di Provinsi DIY dalam kategori miskin merupakan jumlah

terbesar terbesar karena 46,85% (hampir 50%) RTM di Provinsi DIY merupakan kategori miskin. Pada tahun 2003–2008, nilai Rasio Gini dan ukuran ketimpangan Kriteria Bank Dunia menunjukkan pola yang hampir sama, dimana distribusi pendapatan di Provinsi DIY cenderung semakin merata. Nilai Rasio Gini Provinsi DIY berada pada kisaran 0,3 – 0,5 (kisaran sedang) yaitu 0,3440; 0,3727; 0,3867; 0,3684; 0,3263; dan 0,3159.

Jumlah penduduk miskin pada tahun 2008 (Maret 2008) berdasarkan data BPS Provinsi DIY menurun 17,2 ribu jiwa atau 2,71% menjadi 616,3 ribu jiwa, dari posisinya pada tahun 2007 yaitu 633,5 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin oleh BPS dihitung berdasarkan kebutuhan dasar individu yang dinilai dalam bentuk rupiah. Pada Maret 2008, garis kemiskinan berdasarkan pengeluaran makanan adalah Rp141.597,00 per kapita per bulan, sementara garis kemiskinan totalnya adalah Rp194.830,00 per kapita per bulan (BPS Provinsi DIY, 2008). Pada Maret 2008, angka P_1 dan P_2 relatif rendah, dibandingkan kondisinya pada Maret 2007, masing-masing 3,35 dan 0,92 (Maret 2007: 3,80 dan 1,12). Artinya tingkat kesenjangan semakin menurun, sehingga diharapkan upaya pengentasannya akan lebih mudah. Berdasarkan penyebaran secara spasial, penduduk miskin pada Maret 2008 tersebar hampir merata, yaitu 52,60% di perkotaan dan 47,40% di perdesaan (BPS Provinsi DIY, 2008). Sebagian besar penduduk miskin berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan data sebanyak 472.082 rumah tangga petani di Provinsi DIY pada tahun 2007, 80,29% di antaranya adalah petani gurem, yaitu petani dengan skala usaha mikro kecil dan kepemilikan lahan kurang dari setengah hektar. Jika dibandingkan dengan kondisi kemiskinan di tingkat nasional, tingkat kemiskinan di Provinsi DIY masih lebih tinggi dari tingkat kemiskinan nasional. Hingga Maret 2008, tingkat kemiskinan di DIY masih lebih tinggi, yaitu 18,32 % dibandingkan angka nasional yaitu 15,42%.

Apabila dikaitkan lebih lanjut antara indikator IPM kabupaten/kota di Provinsi DIY yang selalu meningkat di sepanjang tahun 2001-2009 dengan indikator Rasio Gini dan Angka Pertumbuhan Penduduk Miskin yang semakin menurun maka nampak ada benang merah bagaimana mengukur keberhasilan dalam menanggulangi kemiskinan. Namun begitu, situasi kemiskinan yang terungkap dalam sajian angka-angka tersebut hanyalah ukuran kemiskinan yang didasarkan atas permasalahan pendapatan atau ekonomi belaka. Lebih lanjut daripada itu, permasalahan kemiskinan perlu dilihat dari aspek kegagalan dalam pemenuhan hak dasar, serta ketidakadilan dan ketidaksetaraan.

Program penanggulangan kemiskinan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi DIY berdasarkan penelitian Bappeda DIY (2008) dalam jangka menengah mampu meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan. Untuk peningkatan pendapatan, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling tinggi (126,51%) dan Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang paling rendah (19,95%). Untuk peningkatan kesempatan kerja, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling tinggi (11,87%) dan Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang paling rendah (4,24%). Untuk peningkatan kecukupan pangan, Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang paling tinggi (16,1%) dan Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling rendah (4,2%). Untuk peningkatan pendidikan, Kabupaten Gunung Kidul merupakan kabupaten yang paling tinggi (100%) dan Kabupaten Bantul dan Sleman merupakan kabupaten yang paling rendah (0%). Untuk peningkatan kesehatan, Kabupaten Sleman merupakan kabupaten yang paling tinggi (-0,08%) dan Kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten yang paling rendah

(-19%).

Berdasarkan analisis mengenai kondisi kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi DIY yang ditunjukkan dengan penurunan angka Rasio Gini; penurunan jumlah penduduk miskin; penurunan indeks kedalaman kemiskinan (*poverty gap index*, P_1) dan indeks keparahan kemiskinan (*poverty severity index*, P_2); dampak positif program penanggulangan kemiskinan dalam jangka menengah yang mampu meningkatkan pendapatan, kesempatan kerja, kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan, maka Program Penanggulangan Kemiskinan yang berasal dari pusat tersebut dapat dikatakan berhasil walaupun belum sempurna. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan di Provinsi DIY yang masih lebih tinggi, yaitu 18,32% dibandingkan tingkat kemiskinan angka nasional, yaitu 15,42%. Oleh karena itu, menjadi sangat penting adanya pedoman dalam penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan dengan memperhatikan perspektif keterkaitan multidimensional secara menyeluruh. Strategi Penanggulangan Kemiskinan harus memperhatikan berbagai potensi dan peluang daerah dan berhubungan dengan kapasitas para aparat daerah, wakil rakyat, pengusaha, dan masyarakat secara umum. Strategi Penanggulangan Kemiskinan merupakan kebijakan dan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, serta pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil. Strategi Penanggulangan Kemiskinan tersebut dapat dilaksanakan melalui 3 tahapan, yaitu:

1. Tahapan perbantuan untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat miskin yang bersifat simptomatik.
2. Tahapan perbantuan dengan cara memberdayakan masyarakat melalui pemberian umpan dan pancing dalam upaya meningkatkan kemauan, keterampilan masyarakat miskin dalam berusaha meningkatkan diri dalam pendapatan, kesempatan kerja, kecukupan pangan, pendidikan, dan kesehatan.
3. Tahapan perbantuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat miskin melalui pengembangan usaha mikro kecil yang telah

dilaksanakan kelompok swadaya masyarakat.

ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 1) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY; 2) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Kulon Progo Provinsi DIY; 3) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Sleman Provinsi DIY; 4) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Sleman Provinsi DIY; 5) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY; 6) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY; 7) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kabupaten Bantul Provinsi DIY; 8) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kabupaten Bantul Provinsi DIY; 9) tidak ada perbedaan jumlah orang miskin di masing-masing kecamatan di Kota Yogyakarta Provinsi DIY; dan 10) ada perbedaan jumlah orang miskin menurut kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di Kota Yogyakarta Provinsi DIY. Simpulan ini mendukung penelitian Santosa dkk. (2003); Sahdan (2005), dan Suryanto (2005:13), yang menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan dalam suatu wilayah tidak akan bersifat seragam dan massif yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota tetapi akan bersifat geografis atau kewilayahan yang tergantung dari kondisi wilayah masing-masing kabupaten/kota. Strategi penanggulangan kemiskinan yang seragam dan massif yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota hanya akan menimbulkan ketidakberhasilan dalam upaya menanggulangi kemiskinan karena mengabaikan faktor geografis wilayah, kinerja ekonomi wilayah yang diukur dengan PDRB, dan faktor sosial budaya masing-masing wilayah seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat selama

Saran

Oleh karena berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan disimpulkan bahwa ada perbedaan jumlah kriteria hampir miskin, miskin, dan fakir miskin di masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi DIY maka saran yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota/Provinsi DIY adalah sebagai berikut: 1) perlu memilih Strategi Penanggulangan Kemiskinan yang sesuai dengan kondisi masing-masing kabupaten/kota di Provinsi DIY. Saran ini disampaikan karena masing-masing kabupaten/kota mempunyai kekhasan wilayah yang bersangkutan (*endogenous development*) berdasarkan karakteristik penduduk miskin; 2) Perlu meningkatkan koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi/kabupaten/kota untuk mendukung Strategi Penanggulangan Kemiskinan. Saran ini disampaikan karena semenjak pemberlakuan otonomi daerah, kebijakan stabilisasi ekonomi makro menjadi lebih sulit diimplementasikan karena kebijakan stabilisasi ekonomi makro di tingkat daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) dapat mengcounter kebijakan stabilisasi ekonomi makro dari jenjang pemerintahan yang lebih tinggi (Pusat) apalagi ketika Gubernur/Bupati/Walikota tidak berasal dari Partai Politik yang sama dengan Partai Politik yang mengusung Presiden terpilih sehingga terjadi kesenjangan antara perencanaan dari pusat dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Edisi 4. Bagian Penerbitan STIE YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2008a. *Analisis Penghitungan dan Tingkat Kemiskinan 2008*. Jakarta.
- _____. 2008b. *Susenas Panel Modul Konsumsi Maret 2008*. Jakarta.
- _____. 2009. *Indeks Pembangunan Manusia Indonesia Tahun 2001-2009*. Jakarta.

_____. 2010. *Provinsi DIY dalam Angka Tahun 2010*. Yogyakarta.

Badan Perencanaan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2008. *Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Istimewa Yogyakarta (RPJP DIY) Tahun 2005–2025*. Yogyakarta.

_____. 2008. *Penyusunan Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah di Provinsi DIY, Tahun 2008*. Yogyakarta.

_____. 2009. *Analisis Data Penduduk Miskin di Provinsi DIY, Tahun 2009*. Yogyakarta.

Kaban, Yeremias T., *Kerjasama Antar Pemerintah Daerah dalam Era Otonomi: Isu Strategis, Bentuk dan Prinsip*. Yogyakarta.

Kompas, 17 Januari 2011.

Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta..

Mubyarto, 2003. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 2, No. 2, April 2003.

Sahdan, Gregorius, 2005. "Menanggulangi Kemiskinan Desa". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 4, No. 2, Maret 2005.

Sekretariat Pemerintah Provinsi DIY. *Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009-2029*. Yogyakarta.

Sulekale, Dalle Daniel. 2003. "Pemberdayaan Masyarakat Miskin di Era Otonomi Daerah". *Jurnal Ekonomi Rakyat*. Vol. 2, No. 2, April 2003.

Susila, Wayan R. dan Robin Bourgeois. 2008. "Effect of Trade Liberalization And Growth Poverty And Inequity: Empirical Evidences and Policy

Options". *Forum Penelitian Agro Ekonomi*. Vol. 26, No. 2, Desember 2008: 71-81.

[<http://www.antaraneews.com/>]

PENGARUH KAPABILITAS MANAJERIAL PARA MANAJER PENDIDIKAN TERHADAP KUALITAS PEMBELAJARAN AKUNTANSI

Oding Supriadi

Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Setia Budhi Rangkasbitung
Jalan Budi Utomo Nomor 22 L, Rangkasbitung, Banten 42314

Telepon +62 252 206715

Email: odinng_s_oding@yahoo.co.id

ABSTRACT

Being quality minded in education means caring about the goals, needs, desires and interests of customers and making sure they are met. Applying this principle to education means that the learning process needs to be assessed to determine the quality as defined by the learner. This will determine whether learners' needs have been met. This study examined structural equation models, and the effect of education managers capability on quality of accounting learning process that based on Juran's theory. The analyses show that structural equation models of education managers capability can be used for estimates the quality of accounting learning process. The result of further analyses indicate that education managers capability influences positively to the quality of accounting learning process.

Keywords: managerial capability, educational management, accounting learning

PENDAHULUAN

Aplikasi manajemen kualitas terpadu yang dalam ekonomika dan bisnis dikenal dengan nama *total quality management* (TQM) di bidang pendidikan di Indonesia belum berjalan lama. Di negara-negara Eropa dan

Amerika Serikat, manajemen mutu terpadu di bidang pendidikan (MMTP) terus menerus dikembangkan secara berkelanjutan karena dampak dan impaknya baru dapat dirasakan belasan tahun kemudian (Arcaro, 2002; Sallis, 2003). Salah satu kebijakan pendidikan yang mengadopsi inovasi MMTP dan dirintis sejak 2001 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) adalah manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS) (Depdikbud, 2001). Kebijakan MPMBS diluncurkan guna menjawab problem kualitas pendidikan yang dikeluhkan oleh berbagai pihak berkepentingan, seperti masyarakat luas, kalangan bisnis, dan dunia usaha.

Menjadikan kualitas sebagai agenda pendidikan berarti peduli terhadap tujuan, kebutuhan, keinginan, dan kepentingan pelanggan atau klien dan memastikannya terpenuhi (Whitaker dan Musa, 1994). MMTP berfokus pada pencapaian kualitas yang dapat didefinisikan sebagai filosofi atau prinsip-prinsip yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan, baik internal maupun eksternal (Bradley, 1993; Herman, 1993; Pike dan Barnes, 1994; Greenwood dan Gaunt, 1994). Berbagai kajian mengungkapkan bahwa ada minat yang besar dalam mengaplikasikan filosofi manajemen kualitas dibidang pendidikan. Kualitas pendidikan perlu ditingkatkan terus menerus. Semua proses dalam organisasi apapun (termasuk organisasi pendidikan, misalnya sekolah) berkontribusi langsung atau tidak langsung terhadap kualitas sebagaimana didefinisikan pelanggan (Swift, dkk.,

1998). Menerapkan prinsip kualitas untuk pendidikan berarti bahwa *proses pembelajaran* perlu dinilai untuk menentukan kualitas seperti yang didefinisikan oleh peserta didik; hal itu akan menentukan apakah kebutuhan peserta didik telah terpenuhi atau belum (Arcaro, 2002).

Proses pembelajaran sebagaimana dimaksudkan Arcaro, tentu saja meliputi berbagai bidang mata pelajaran, termasuk di dalamnya mata pelajaran Akuntansi. Perihal pembelajaran akuntansi di sekolah menengah umum (SMU), kreativitas dan prestasi yang dicapai peserta didik setelah mengikutinya, pada umumnya dijadikan sebagai parameter keberhasilan akuntansi itu sendiri. Sebagaimana dikatakan Nanang (2006) dalam Luluk (2009), para ahli akuntansi menyadari, bahwa mutu pendidikan akuntansi sangat tergantung pada kualitas guru dalam praktik mengajar, sehingga peningkatan kualitas pembelajaran merupakan *isu mendasar* bagi peningkatan prestasi belajar akuntansi. Bahkan, Calvert dkk. (2009), menyampaikan kritik tajam bahwa dalam penelitian pendidikan akuntansi, banyak pihak mengabaikan persepsi anak didik baik dalam konteks pembelajaran dan belajar. Sesuatu yang sulit untuk menentukan variabel yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Jika mengikuti alur "model pembelajaran di kelas" sebagaimana lazim dianut, maka terdapat variabel penanda, variabel konteks, variabel proses, dan variabel hasil (Dunkin dan Biddle, 1974; Arends, 1989; Wittrock, 1986).

Hasil-hasil penelitian tentang pembelajaran akuntansi di sekolah dengan variabel-variabel tersebut beragam. Hasil penelitian Schulman (1986) yang meneliti pengaruh variabel penanda yang juga disebut sebagai variabel input, dalam hal ini variabel tingkat pendidikan dan pelatihan, motivasi, intelegensi, keterampilan mengajar, dan kepribadian guru berpengaruh signifikan terhadap hasil pembelajaran. Daigle dkk. (2007), meneliti kompetensi fungsional hasil belajar akuntansi sesuai standar *Accounting Informations Course American Institute of Certified Public Accountants' (AICPA's) Core Competency Framework for Entry into the Accounting Profession*. Melalui studi kasus, triangulasi, pengukuran langsung bukti belajar siswa, dan pengukuran tidak langsung seperti penilaian diri siswa, menunjukkan bahwa siswa menjadi lebih kompeten dalam kompetensi fungsional akuntansi. Artinya,

kursus tentang pengantar Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang diberikan dinyatakan berhasil mewujudkan kompetensi akuntan profesional, meskipun masih perlu dimodifikasi.

Variabel konteks yang diteliti juga beragam. Hasil penelitian Steyn (2000), menunjukkan bahwa persepsi peserta didik tentang kualitas dan modul manajemen kualitas berpengaruh signifikan terhadap kualitas hasil pembelajaran akuntansi. Arcaro (2002), menunjukkan bahwa prinsip-prinsip kualitas, apabila diterapkan secara serius dan berkelanjutan, akan berhasil meningkatkan kualitas hasil pembelajaran, termasuk pembelajaran akuntansi. Demikian pula hasil penelitian Sallis (2003) yang menerapkan instrumen uji kualitas di sejumlah sekolah di Inggris menghasilkan kualitas pembelajaran berkelanjutan.

Hasil penelitian Lestari dan Dharma Tintri (2010), menunjukkan bahwa variabel motivasi belajar dan minat belajar berpengaruh secara nyata terhadap pencapaian prestasi akademik akuntansi. Namun variabel *adversity quotient* berpengaruh tidak nyata terhadap peningkatan prestasi akademik akuntansi, sedang secara bersama-sama, variabel motivasi belajar, minat belajar dan *adversity quotient* berpengaruh nyata terhadap pencapaian prestasi akademik akuntansi.

Hasil penelitian terhadap variabel proses dalam pembelajaran akuntansi juga beragam. Menggunakan instrumen delapan langkah yang dikembangkan McCarthy, sintesis pengalaman belajar model Dewey, empat gaya belajar model Kolb, tipe kepribadian Jung, serta modus preferensi pengolahan otak model Bogen, penelitian Lee dan Hung (2009), menghasilkan simpulan bahwa retensi belajar akuntansi meningkat dan model ini efektif dalam mempertahankan informasi pembelajaran akuntansi sebagai memori jangka panjang. Secara khusus, ketika Lee dan Hung (2009) meneliti efektivitas tingkat skor siswa (tinggi, median, dan rendah), hasilnya menunjukkan bahwa ada peningkatan retensi di semua tingkatan dalam kelompok perlakuan, sementara pada kelompok kontrol hasil tidak konsisten. Ketika meneliti prestasi akademik dan sikap, interaksi faktor dari kedua sekolah dan metode dalam pembelajaran akuntansi, hasilnya menunjukkan perbedaan yang signifikan.

Hasil penelitian Astuti (2009), menunjukkan bahwa penggunaan teknik T3C (Tugas Terprogram Tipe Crowder) dalam pembelajaran akuntansi di SMA

dapat meningkatkan hasil pembelajaran akuntansi, sedang penelitian Mediawati (2011), menunjukkan bahwa penggunaan media komik dalam pembelajaran akuntansi di sekolah pengaruhnya relatif signifikan terhadap variabel hasil, yakni kualitas pembelajaran akuntansi.

Penelitian tentang variabel hasil dilakukan oleh Abraham (2006) yang meneliti tentang persepsi siswa dalam pembelajaran akuntansi dalam hubungannya dengan konteks pengajaran, pendekatan pembelajaran, dan hasil pembelajaran. Hasilnya menunjukkan bahwa lima bidang utama, yaitu lingkungan belajar yang positif, cara mengajar yang baik, tujuan pengajaran yang jelas dan standar, beban kerja guru (instruktur) yang sesuai, penggunaan sistem penilaian yang tepat, dan penekanan pada kemerdekaan peserta didik, apabila diadaptasi melalui gaya mengajar, memberi efek positif terhadap hasil pembelajaran akuntansi.

Implikasi dan aplikasi hasil-hasil penelitian tersebut faktanya belum mampu mendongkrak kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Sintesis terhadap hasil-hasil penelitian tersebut mendorong perlunya modifikasi “model pembelajaran di kelas” (Dunkin dan Biddle, 1974) yang hingga kini banyak dianut dengan memasukkan variabel manajemen, yakni kapabilitas manajerial para manajer pendidikan (Juran, 1989; Gibson, dkk., 1995; Armstrong, 2003). Rasionalitasnya sangat prinsip, sebaik apa pun variabel penanda, konteks, dan proses, tidak akan menghasilkan produk pembelajaran yang berkualitas apabila tidak dimanajementi dengan baik.

Manajemen yang baik sudah barang tentu hanya bisa dilakukan secara unggul oleh para manajer pendidikan yang memang memiliki kapabilitas tinggi. Dimasukkannya variabel manajemen dalam “model pembelajaran di kelas” sejalan dengan kebijakan MPMBS dan Peraturan Mendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang *Standar Kepala Sekolah/Madrasah* yang salah satu syaratnya adalah memiliki *kompetensi manajerial* di samping kompetensi kepribadian, kewirausahaan, supervisi, dan kompetensi sosial.

Berdasarkan logika atau alur berpikir tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk 1) menguji kesesuaian model persamaan struktural antara variabel kapabilitas manajerial manajer pendidikan dan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah dengan data dan 2) mengungkap pengaruh kapabilitas manajerial manajer

pendidikan terhadap kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Penelitian dilakukan dalam kancah SMA dan SMK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dalam wilayah Provinsi Banten.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Manajer pendidikan adalah seseorang yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan usaha-usaha pencapaian tujuan organisasi pendidikan. Salah satu jenis organisasi pendidikan adalah sekolah (Knecevich, 1990; Lunenburg dan Ornstein, 2004). Berdasarkan definisi tersebut, kepala sekolah dapat disebut sejajar dengan manajer pendidikan. Manajer memainkan peran yang sangat penting dalam organisasi. Manajer diharapkan oleh organisasi untuk mengarahkan kegiatan, menghasilkan keputusan, dan mengalokasikan sumber daya (manusia, bahan baku, modal, dan peralatan) dalam usaha-usaha mencapai tujuan organisasi. Selain itu, manajer juga dipandang sebagai pemicu perubahan (*change driver*), koordinasi, dan kontrol dalam organisasi.

Sebagaimana dikatakan Stoner dan Freeman (2000), peranan manajer itu muncul karena adanya pemberian otoritas formal berupa surat keputusan, sekaligus dengan status atau kedudukannya. Guna melaksanakan otoritas formal dan status tersebut, setiap manajer minimal mempunyai tiga peranan, yaitu peranan in-terpersonal, informasional, dan pengambil keputusan (Mintzberg dalam Harsono, 2010). Jadi, Sebagai manajer pendidikan, kepala sekolah, dengan demikian, memiliki matra tugas manajerial yang sama dengan manajer pada umumnya. Salah satu di antaranya ialah menjalankan fungsi-fungsi manajemen dan pengambilan keputusan. Hal yang membedakan hanyalah cakupan atau lingkup tugas manajerial yang menjadi beban dan tanggung jawabnya dibanding dengan manajer pendidikan pada tingkatan di atasnya.

Menurut pandangan Gibson dkk. (1995), di negara mana pun di seluruh dunia, pada dasarnya setiap manajer menghadapi tiga tugas manajerial yang sama, yaitu 1) mengelola organisasi dan kerja, 2) mengelola orang, dan 3) mengelola produksi dan sistem operasi. Apabila ketiganya diterjemahkan, maka tugas *pertama* berkaitan dengan bidang atau studi baru yang dikenal sebagai perilaku organisasi (*organizational behavior*) (Ivancevich dkk., 2005). Memahami perilaku manusia

dalam organisasi kini dianggap penting karena perhatian manajemen. Fokus pengelolaan organisasi dan kerja dalam manajemen pendidikan antara lain adalah produktivitas guru dan karyawan, kualitas kehidupan kerja, tekanan pekerjaan, kemajuan karir, pendelegasian (Armstrong, 2003a), kontrak psikologis (Guzzo dan Noonan, 1994), hubungan dalam hal pekerjaan (Kessler dan Undy, 1996), kontrak transaksional dan relasional (MacNeil, 1985; Rousseau dan Wade-Benzoni, 1994), dan sebagainya.

Tugas *kedua* adalah mengelola tenaga kependidikan (guru dan non guru) serta sejumlah anak manusia yang dititipkan oleh orangtuanya kepada sekolah untuk dididik dan diajar tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan religiusitas. Kapabilitas vital yang diperlukan untuk tugas ini adalah kemampuan berkomunikasi. Sebagaimana diajarkan Armstrong (2003), para manajer menggunakan sebagian besar waktu untuk ber-bicara dengan karyawan dan mendengarkan gagasan-gagasannya, sedang seorang manajer yang baik adalah manajer yang lebih banyak mendengar daripada bicara.

Tugas *ketiga* adalah mengelola pembelajaran. Kegiatan pembelajaran merupakan suatu proses yang bersifat unik dan kompleks (Wittrock, 1986). Dikatakan unik karena kegiatan pembelajaran berkenaan dengan kegiatan dua kelompok manusia, yakni antara guru dan siswa dalam upaya mengembangkan serta meningkatkan kualifikasi kemanusiaannya secara manusiawi. Dikatakan kompleks karena kegiatan pembelajaran senantiasa melibatkan berbagai aspek dan komponen yang mendasari dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu kemampuan dalam mengelola seluruh aspek dalam komponen tersebut, sehingga mampu menciptakan kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, baik secara teoritis maupun dalam tataran praktis (Supriadi, 2010).

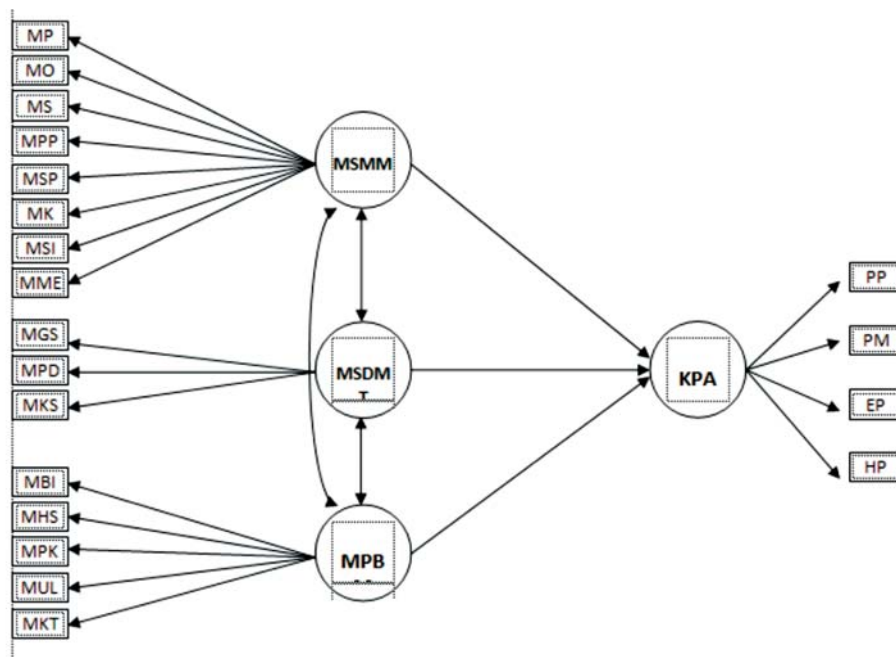
Tugas-tugas manajer pendidikan tersebut memerlukan kapabilitas atau kemampuan. Ditematkannya kapabilitas sebagai variabel bebas dalam penelitian ini dituntun oleh teori Juran (1989) tentang pola relasional antara kepemimpinan manajerial dan kualitas yang dihasilkan. Teori Juran terkenal dengan sebutan “Kaidah 85/15.” Juran, adalah pelopor lain revolusi manajemen kualitas. Juran adalah “guru”

manajemen pertama dalam menghadapi isu-isu manajemen kualitas yang lebih luas (Arcaro, 2002; Sallis, 2003; Bogue dan Saunders, 1999). Juran yakin bahwa kebanyakan masalah kualitas dapat dikembalikan pada keputusan manajemen. Saat mempertimbangkan peran kepemimpinan dalam kualitas, kaidah 85/15 dari Juran menjadi sesuatu yang dibutuhkan. Juran menyatakan bahwa 85% masalah kualitas dalam sebuah organisasi adalah hasil dari desain dan proses yang kurang baik, sehingga penerapan sistem yang benar akan menghasilkan kualitas yang benar. Artinya, menurut Juran 85% masalah kualitas merupakan tanggungjawab manajemen, karena manajemen memiliki 85% kendali terhadap sistem organisasi.

Elaborasi antara pemikiran Gibson (1995) mengenai tugas manajerial dan teori Juran (1989) tentang tanggungjawab manajemen dan kemampuan berkomunikasi bagi manajer (Armstrong, 2003), menghasilkan sintesis kapabilitas manajer pendidikan dengan tiga label variabel utama, yakni, kapabilitas dalam mengelola sekolah dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen (MSMM) terdiri atas 8 konstruk/variabel laten, mengelola sumber daya manusia dan tenaga kependidikan (MSDMT) terdiri atas 3 konstruk/variabel laten, dan mengelola proses pembelajaran (MPBM) terdiri atas 5 konstruk/variabel laten. Oleh karena objek penelitian adalah kualitas pembelajaran akuntansi (KPA) terdiri atas 4 konstruk/variabel laten, maka model persamaan struktural antarvariabel penelitian dapat divisualisasikan sebagaimana nampak pada Gambar 1.

Keterangan:

- MSMM : Mengelola sekolah dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen.
- MP : Mengelola perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- MO : Mengelola organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan.
- MS : Memimpin sekolah dan pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal.
- MPP : Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- MSP : Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.



Gambar 1
Model Teoritis Hubungan Struktural Variabel Kapabilitas Manajerial dan Kualitas Pembelajaran Akuntansi di Sekolah

MK : Mengelola keuangan sekolah sesuai prinsip akuntabel, transparan, dan efisien.
MSI : Mengelola sistem informasi dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.
MME : Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.
MSDMT : Mengelola sumber daya manusia dan tenaga kependidikan.
MGS : Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM secara optimal.
MPD : Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan, penempatan, dan pengembangan kapabilitas.
MKS : Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah.
MPBM : Mengelola proses pembelajaran.
MBI : Menciptakan budaya dan iklim sekolah

yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
MHS : Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan, ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah.
MPK : Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
MUL : Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.
MKT : Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen.
KPA : Kualitas pembelajaran akuntansi.
PP : Perencanaan pembelajaran.
PM : Pemilihan metode pembelajaran.
EP : Manajemen evaluasi pembelajaran.
HP : Hasil pembelajaran.

Responden penelitian ini ada dua kelompok, yaitu Kepala SMA (441 orang), Kepala SMK (406 orang), total populasi kepala sekolah 847 orang; guru ekonomi/akuntansi SMA (488 orang), guru ekonomi/akuntansi SMK (634 orang), total populasi guru 1.122 orang. Penelitian ini menggunakan teknik *probability sampling* dengan metode *proportional random* menggunakan bilangan random (Cochran, 1991) berdasarkan asal sekolah (SMA dan SMK. Oleh karena jumlah populasi tidak melebihi 2.000 orang, maka dipilih metode Nomogram Harry King (Leedy, 1980) guna menentukan ukuran sampel yang representatif. Metode Nomogram Harry King setara dengan formula penentuan ukuran sampel representatif dari Scheaffer dkk. (1990) sebagai berikut.

$$S = \frac{\lambda^2.N.P.Q}{d^2 \cdot (N - 1) + \lambda^2.N.P.Q}$$

λ^2 dengan dk = 1, taraf kesalahan bisa 1%, 2%, 5%, 10%
 P = Q = 0,5. d = 0.05. s = jumlah sampel

Berdasarkan metode tersebut dengan tingkat kesalahan pengambilan sampel sebesar 0,02, maka sampel representatif kepala SMA sebanyak 80 orang; kepala SMK sebanyak 84 orang; guru ekonomi/akuntansi SMA 77 orang; dan guru ekonomi/akuntansi SMK 73 orang. Jadi, total sampel kepala sekolah 164 orang dan total sampel guru 150 orang. Untuk kepentingan analisis, kedua kelompok disamakan jumlahnya, yakni masing-masing 150 orang.

Instrumen penelitian terdiri atas dua kuesioner, satu kuesioner untuk menjangkau tingkat kapabilitas manajerial manajer pendidikan (ditujukan pada kepala sekolah) dan satu kuesioner untuk menjangkau tingkat kualitas pembelajaran akuntansi (ditujukan pada guru ekonomi/akuntansi). Validitas instrumen, yakni validitas muka (*face validity*) dilakukan berdasarkan pendapat ahli (*expert judgement*), sedang validitas isi (*content validity*) dan validitas konstruk (*construct validity*) didasarkan atas analisis faktor konfirmatorik melalui program LISREL yang ringkasan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Ringkasan Hasil Analisis Faktor

Variabel dan Faktor	<i>factor loading</i>	p (<i>á error</i>)	t - score
MSMM			
MP	0,68	0,05	17,8**
MO	0,81	0,01	18,69*
MS	0,70	0,01	18,88*
MPP	0,62	0,05	16,45**
MSP	0,78	0,01	17,55*
MK	0,66	0,05	10,03**
MSI	0,57	0,05	9,84**
MME	0,55	0,05	9,83**
MSDMT			
MGS	0,58	0,05	9,87**
MPD	0,61	0,05	10,01**
MKS	0,59	0,05	10,01**
MPBM			
MBI	0,61	0,05	16,30**
MHS	0,77	0,01	16,87*
MPK	0,59	0,05	9,67**
MUL	0,52	0,05	7,42**
MKT	0,67	0,05	10,03**

KPA			
PP	0,83	0,01	21,25*
PM	0,73	0,01	14,87*
EP	0,65	0,05	10,01**
HP	0,81	0,01	19,91**

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Keterangan:

* signifikan pada $p < 0,01$

** signifikan pada $p < 0,05$

Reliabilitas instrumen dalam arti konsistensi internalnya diukur dengan menggunakan teknik statistik *Cronbach Alpha*. Namun, oleh karena analisis data menggunakan analisis regresi ganda model persamaan struktural (*Structural Equation Model*) (James dkk., 1990) dengan bantuan perangkat lunak *software* program LISREL (*Linear Structural Relation*) versi 8 dari Joreskog dan Sorbom (2000), maka sebetulnya reliabilitas masing-masing instrumen sampai ke taraf butir/item, yaitu koreksi terhadap atenuasi (*under estimated*) yang diakibatkan oleh tidak sempurnanya reliabilitas pengukuran dengan sendirinya telah dilakukan.

Dalam analisis data, variabel utama diposisikan sebagai konstruk (faktor), sedang butir-butir item berfungsi sebagai indikator dari konstruk yang diukur. Dengan demikian, koefisien regresi yang akan dihasilkan berada dalam skala *true score* yang sudah “terbebas” dari pengaruh kurang reliabelnya instrumen pengukuran. Sebab pengukuran pendidikan tidak sama dengan pengukuran volume, moneter, harga saham, dan lain-lain dalam ekonomika bisnis yang sifatnya langsung, melainkan hanya manifes atau indikatornya saja (Umar, 1995). Berdasarkan dugaan teoritis dan hasil empiris sebagaimana yang dikemukakan tersebut, maka dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H1a: Terdapat kesesuaian model (*model fit*) persamaan struktural variabel kapabilitas manajerial manajer pendidikan dan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah.

H1b: Kapabilitas manajerial manajer pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah.

Data yang digunakan untuk kepentingan analisis dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersumber dari kuesioner laik analisis yang

dikembalikan oleh kepala sekolah dan guru ekonomi/akuntansi sebagai sampel.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan hasil penyekoran dan analisis data terhadap 150 responden yang laik analisis menghasilkan data terpilah manajer pendidikan yang memiliki kapabilitas manajerial tinggi sebanyak 65% (97,5, dibulatkan 98 orang); manajer pendidikan yang memiliki kapabilitas manajerial rendah 35% (52,5, dibulatkan 52 orang). Rentang skor teoretik kualitas pembelajaran akuntansi yang diperoleh dari 150 responden laik analisis, terendah 35, tertinggi 175. Analisis data deskriptif menunjukkan bahwa terdapat variasi data yang unik. Berdasarkan kelompok manajer yang memiliki kapabilitas manajerial tinggi, data kualitas pembelajaran akuntansi tinggi secara empirik menunjukkan, terendah 95, tertinggi 134; data kualitas pembelajaran akuntansi rendah secara empirik menunjukkan, terendah 85, tertinggi 103, sedang pada kelompok manajer yang memiliki kapabilitas manajerial rendah, data kualitas pembelajaran akuntansi tinggi menunjukkan, terendah 72, tertinggi 109; data kualitas pembelajaran akuntansi rendah secara empirik menunjukkan, terendah 79, tertinggi 121.

Variasi data tersebut tentu saja akan berpengaruh terhadap pengujian hipotesis apabila ternyata perbedaannya signifikan. Untuk mengetahui perbedaan variasi antarsel digunakan uji *Tukey*. Nilai hasil uji *Tukey* (Q) menunjukkan koefisien 0,93, harga kritis $Q = 2,26$. H_0 diterima, sehingga variasi yang unik dinyatakan tidak berbeda secara signifikan.

Tahap pertama untuk mengetahui hasil penelitian ini ialah menguji hipotesis alternatif a (H1a), yaitu menguji kesesuaian model (*model fit*) persamaan

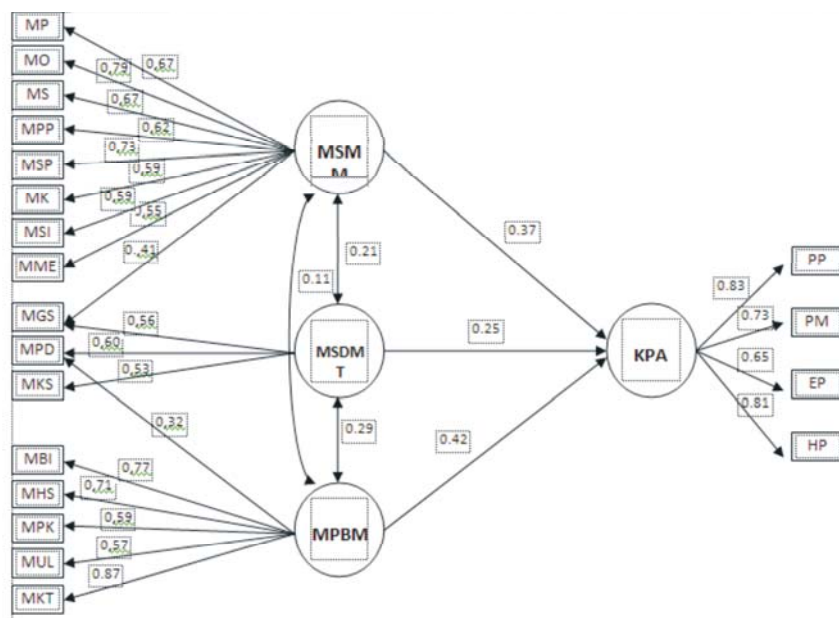
struktural variabel kapabilitas manajerial manajer pendidikan dan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Kesesuaian model teoritik dengan data dapat diketahui dengan menggunakan uji *goodness of fit* yang rujukannya adalah nilai *chi square* (χ^2). Apabila nilai *chi square* (χ^2) lebih kecil dibandingkan nilai kritis sesuai derajat kebebasan sehingga *probability of alpha error*-nya lebih besar dari 0,05 ($p > 0,05$), maka berarti H_0 diterima. Artinya, ada kesesuaian antara model persamaan struktural yang diajukan dengan data yang diperoleh (Joreskog dan Sorbom, 2000). Ringkasan hasil *chi square* (χ^2) untuk penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2
Hasil Pengujian Hipotesis Alternatif a (H1a)

NOMOR	VARIABEL	<i>chi square</i> (χ^2)	<i>p</i> (α error)
1	MSMM	11,67	0,097
2	MSDMT	11,67	0,097
3	MPBM	17,88	0,128
4	KPA	17,88	0,128

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Apabila model telah sesuai, tahap kedua menguji parameter model sehingga dapat diambil keputusan bahwa variabel independen (kapabilitas manajerial manajer pendidikan) mempengaruhi variabel dependen (kualitas pembelajaran akuntansi). Hasil analisis tahap pertama menunjukkan bahwa nilai *chi square* (χ^2) = 67,87 dengan p (α error) = 0,097 tidak signifikan, sehingga H_0 yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan *matrix covarians* yang didapat dari data dengan model yang diharapkan secara teoritik diterima. Artinya, model teoritik persamaan struktural antarvariabel kapabilitas manajerial manajer pendidikan, yaitu mengelola sekolah dan fungsi-fungsi manajemen (MSMM), mengelola sumber daya manusia dan tenaga kependidikan (MSDMT), dan mengelola proses pembelajaran (MPBM) diterima dan dapat digunakan untuk mengestimasi atau memprediksi dan menjelaskan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah (KPA). Model teoritis tersebut terkoreksi (termodifikasi) karena adanya dua faktor yang juga menjadi indikator dua variabel utama, yaitu, faktor MGS yang selain menjadi indikator variabel MSDMT juga menjadi indikator variabel MSMM; faktor MPD yang selain menjadi indikator variabel MSDMT juga menjadi indikator



Gambar 2
Model Empiris Hubungan Struktural Variabel Kapabilitas Manajerial dan Kualitas Pembelajaran Akuntansi di Sekolah

variabel MPBM. Hasil koreksi model tanpa mengubah model teoritis yang asli divisualisasikan pada Gambar 2.

Tahap kedua untuk mengetahui hasil penelitian ini ialah menguji hipotesis alternatif b (H1b), yaitu menguji apakah secara simultan variabel kapabilitas manajerial manajer pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas hasil pembelajaran akuntansi di sekolah. Berdasarkan keluaran LISREL, pengaruh simultan variabel dependen terhadap variabel independen dapat dilihat dari beberapa hal, antara lain signifikansi koefisien jalur ($\hat{\alpha}$) masing-masing variabel, koefisien regresi (*beta matrix*), koefisien kontingensi *chi square* (χ^2), atau dari koefisien parameter struktural yang menghubungkan satu variabel endogenus dengan variabel lain ($\hat{\alpha}$). Ringkasan hasil uji hipotesis 1b dapat dilihat pada Tabel 3.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian hipotesis alternatif a (H1a) menunjukkan bahwa model persamaan struktural antara kapabilitas manajerial para manajer pendidikan dapat digunakan untuk menjelaskan tingkat kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Model tersebut sama sekali tidak bertentangan dengan “model pembelajaran di kelas” (Dunkin dan Biddle, 1974; Schulman, 1986; dan Wittrock, 1986), melainkan melengkapi “model pembelajaran di kelas” yang sudah lazim digunakan dengan memasukkan variabel manajemen sebagai korelat yang signifikan diperhitungkan. Hal itu berarti, variabel apa pun yang berusaha dibenahi dalam konteks peningkatan mutu pendidikan melalui pembelajaran belum akan menampakkan hasil kualitas yang diharapkan apabila faktor manajemen, terutama kapabilitas atau kompetensi manajerial para manajer pendidikan (kepala sekolah) tidak mendapat perhatian. Pentingnya faktor

manajemen dalam pembelajaran dan dalam lingkup yang lebih besar, yakni sekolah, selain konsisten dengan kebijakan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang hingga kini masih terus dikembangkan, juga konsisten dengan Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007.

Hasil pengujian hipotesis alternatif b (H1b) menunjukkan bahwa kapabilitas manajerial para manajer pendidikan (kepala sekolah), yaitu kemampuannya dalam hal mengelola sekolah dan menjalankan fungsi-fungsi manajemen; mengelola sumber daya manusia dan tenaga kependidikan; serta mengelola proses pembelajaran berpengaruh positif terhadap kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Artinya, semakin tinggi kapabilitas manajerial para manajer pendidikan, semakin tinggi pula kualitas pembelajaran akuntansi di sekolahnya. Demikian sebaliknya. Hasil pengujian hipotesis ini konsisten dengan teori Juran (1989) tentang tanggungjawab manajemen, teori Gibson dkk. (1995) tentang tugas utama seorang manajer, teori Armstrong (2003) tentang kemampuan berekomunikasi yang diperlukan oleh seorang manajer; dan didukung oleh hasil penelitian Steyn (2000) tentang modul manajemen kualitas dalam pembelajaran. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sejenis yang memfokuskan pengaruh variabel penanda (input), variabel konteks, variabel proses, dan variabel hasil (*outcomes*) sebagaimana dikutip dalam artikel ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Sebetulnya penelitian tentang pembelajaran akuntansi sudah banyak dilakukan, terutama dari sisi kapabilitas guru dan inovasinya dalam mengajar, dengan hasil yang sangat beragam. Namun, penelitian yang menempatkan kapabilitas manajerial sebagai korelat

Tabel 3
Hasil Pengujian Hipotesis Alternatif b (H1b)

Y_t	β_1	β_2	β_3	F	Prob	R ²	γ	Keputusan
MSMM (X1)	15,010	3,678	0,340	30,111	0,000	0,525	0,370	Diterima
MSDMT (X2)	13,621	1,903	0,525	9,960	0,000	0,318	0,253	Diterima
MPBM (X3)	7,693	1,881	0,23	66,494	0,000	0,137	0,421	Diterima

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah belum banyak dilakukan. Hasil penelitian ini berhasil membuktikan bahwa 1) model persamaan struktural kapabilitas manajerial para manajer pendidikan dapat digunakan untuk mengestimasi, memprediksi, atau menjelaskan kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah; 2) kapabilitas manajerial para manajer pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kualitas pembelajaran akuntansi di sekolah. Hal itu berarti, variabel manajemen dapat dimasukkan dalam “model pembelajaran di kelas” sebagaimana lazim diteorikan para ahli.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka disarankan agar penguatan kapabilitas manajerial para manajer pendidikan terutama kepala sekolah dilakukan secara terprogram dan berkelanjutan, baik oleh pemerintah secara umum, maupun oleh para manajer pendidikan yang tingkatannya berada di atas kepala sekolah, yaitu para Kepala Dinas Pendidikan dan para Pengawas. Penelitian ini hanya berfokus pada kapabilitas manajerial dengan tiga variabel utama, yakni mengelola sekolah dan fungsi-fungsi manajemen, mengelola sumber daya manusia dan tenaga kependidikan, dan mengelola proses pembelajaran. Agar ke depan semakin memperkaya khasanah kajian manajemen pendidikan, maka kapabilitas manajerial dengan label variabel lain seperti kemampuan kewirausahaan dan pengawasan (pengendalian) relevan dilakukan di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, A. 2006. “Teaching and Learning in Accounting Education: Students’ Perceptions of the Linkages between Teaching Context, Approach to Learning and Outcomes.” *Research Online University of Wollongong*. morgan@uow.edu.au. Diakses 20 Mei 2009.
- Arcaro, J. S. 2002. *Quality in Education: An implementation handbook*. Delary Beach, Florida: St Lucie Press.
- Arends, I.R. 1989. *Learning to Teach*. New York: Mc.Graw Hill Company.
- Armstrong, M. 2003a. *Managing People: A Practical Guide for Line Managers*. London: Kogan Page Limited.
- Armstrong, M. 2003b. *Strategic Human Resource Management: A Guide to Action*. London: Kogan Page Limited.
- Bogue, E.G. and Saunders, R.L. 1999. *The Evidence for Quality*. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
- Bradley, L. H. 1993. *Total Quality Management for Schools*. Lancaster, Pennsylvania: Technomic Publishing Company.
- Calvert, V., Kurji, R., and Kurji, S. 2009. “Service Learning for Accounting Students: What is Faculty Role?” *Research in Higher Education Journal*, 7. 1-11.
- Cochran, W.G. 1991. *Sampling Techniques*. New York: John Wiley & Sons, Inc.
- Daigle, R.J., Hayes, D.C. and Hughes II, K.E. 2007. “Assessing Student Learning Outcomes in the Introductory Accounting Information Systems Course Using the AICPA’s Core Competency Framework.” *Journal of Information Systems*, Spring, 21, 1. 149-169.
- Depdikbud, 2001. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Jakarta: Ditjen Dikdasmen.
- Dunkin, M.J. and Biddle, B.J. 1974. *The Study of Teaching*. New York: Holt, Rinehart, and Winston.
- Mediawati, Elis. 2011. “Pembelajaran Akuntansi Keuangan Melalui Media Komik untuk Meningkatkan Prestasi Mahasiswa.” *Jurnal Penelitian Pendidikan*. 12, 1. 68-76.
- Gibson, J.L., J.H. Donnelly, Jr. and J.M. Ivancevich. 1995. *Fundamentals of Management*.

- Homewood, IL: Richard D. Irwin, Inc.
- Greenwood, M.S. and Gaunt, H.J. 1994. *Total Quality Management for Schools*. London: Cassell.
- Guzzo, R.A. and Noonan, K.A. 1994. "Human Resource Practices as Communication and Psychological Contract." *Human Resource Management*. Fall.
- Harsono (ed.). 2010. *Manajemen Pengantar*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN.
- Herman, J. J. 1993. *Holistic Quality: Managing, Restructuring, and Empowering Schools*. Newbury Park: Corwin Press, Inc.
- Lestari, Ayu Indah dan Dharma Tintri. 2010. "Effect of Learning Motivation, Learning Interest, and Adversity Quotient Accounting Students Learning on Academic Achievement (Case Study Prodi S1 Accounting Faculty of Economics in One Private Universities in Jakarta)." <http://www.gunadarma.ac.id>. Diakses 16 Desember 2010.
- Ivancevich, J.M., R. Konopaske and M.T. Matteson. 2005. *Organizational Behavior and Management*. 7th ed. New York: The McGraw-Hill Companies.
- James, L.R., Mulaik, S.A., and Brett, J.M. 1990. *Causal Analysis: Assumptions, Models, and Data*. Beverly Hills: Sage Publications.
- Joreskog, K. and Sorbom, D. 2000. *LISREL 8: User's Reference Guide*. Chicago: Scientific Software International, Inc.
- Juran, J.M. 1989. *Jurn lon Leadership for Quality*. New York: Macmillan.
- Kessler, S. and Undy, R. 1996. *The New Employment Relationship: Examming the Psychological Contract*. London: Institute of Personnel and Development.
- Knezevich, S.J. 1990. *Administration of Public Education*. 5th ed. New York: Harper & Row.
- Lee, Li-Tze. And Hung, J.C. 2009. "Effect of Teaching Using Whole Brain Instruction on Accounting Learning." *Journal of Distance Education Technologies*, 7, 3. 63-65.
- Leedy, P. 1980. *Practical Research*. New York: Macmillan Publishing, Co. Inc.
- Astuti, Dwi Luluk. 2009. Membangun Kreativitas Siswa dalam Pembelajaran Akuntansi melalui Model T3C Di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. *Skripsi*. FKIP-Universitas Muhammadiyah, Surakarta.
- Lunenburg, F.C. and Ornstein, A.C. 2004. *Educational Administration*. Belmont, CA: Wadsworth Thomson Learning.
- MacNeil, R. 1985. "Relational Contract: What We Do and Do Not Know." *Wisconsin Law Review*. 483-525.
- Supriadi, Oding. 2010. *Rahasia Sukses Kepala Sekolah*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Pike, J. and Barnes, R. 1994. *TQM in Action: A Practical Approach to Continuous Performance Improvement*. London: Chapman & Hall.
- Rousseau, D.M. and Wade-Benzoni, K.A. 1994. "Linking Strategy and Human resource Practices: How Employee and Customer Contract are Created." *Human Resource Management*. 33, 3. 463-489.
- Scheaffer, C.L., Mendenhall, I. And Ott, M. 1990. *Elementary Survey Sampling*. 3rd ed. Boston: Duxbury Press.
- Schulman, L.S. 1986. "Paradigms and Research Programs in the Study of Teaching: A Contemporary Perspective." Dalam Wittrock, M.C. *Handbook of Research on Teaching*. 3rd edition. New York: Macmillan Publishing Company.

- Steyn, G.M. 2000. "Applying Principles of Total Quality Management to a Learning Process: a Case Study." *South African Journal of Higher Education*, 14, 1. 174-184.
- Stoner, J.A.F. and Freeman, R.E. 2000. *Management*. 5th ed. London: Prentice Hall.
- Swift, J. A., Ross, J. E. and Omachonu, V. K. 1998. *Principles of Total Quality*. (2nd edition.) Boca Raton, Florida: St. Lucie Press.
- Whitaker, K.S. and Moses, M.C. 1994. *The Restructuring Handbook: A Guide to School Revitalization*. Needham Heights: Allyn and Bacon.
- Wittrock, M.C. 1986. *Handbook of Research on Teaching*. 3rd edition. New York: Macmillan Publishing Company.
- Umar, Jahja. 1995. "Peranan Psikometrika dalam Pengembangan Ilmu Psikologi dan Sumber Daya Manusia." *Makalah*, disampaikan sebagai pidato Dies Lustrum VI Fakultas Psikologi UGM, Yogyakarta, 7 Januari 1995.

SUMBER PEMBIAYAAN PEDAGANG DI SALATIGA

Birgitta Dian Saraswati, Sotya Fevriera, dan Sally Dwijayanti

Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana

Jalan Diponegoro, Nomor 52-60, Salatiga 50711

Telepon +62 298321212

E-mail: birgitta.saraswati@staff.uksw.edu

ABSTRACT

The purpose of this research is to know funding resources that are utilized by Salatiga merchants, constraints that are faced by Salatiga merchants, and factors that are influenced Salatiga merchants' decision in utilized loan from formal financial institution. Sample in this research are micro merchants taken with stratified sampling method. Descriptive statistics method and logistic regression model are used for analysis. The result of this research showed that Salatiga micro merchants use private financial resources, loans from formal and non formal financial institution, loans from family and friends, trade by consignment method, and funding from cities' poverty reduction program as financial resources. Constraints that were often told by the merchants in accessing formal financial institution are worries that they will not be able to pay and that they have no appropriate loan guarantees. This research also found that female gender and education level of a merchant have positive effect on opportunity in taking loan from formal financial institution, while age of a merchant and motor cycle ownership has negative effect on opportunity in taking loan from formal financial institution.

Keywords: micro merchant, financial resources, formal financial institution

PENDAHULUAN

Data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa jumlah penduduk Salatiga yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami penurunan dari 15.600 orang tahun 2007 menjadi 14.950 orang tahun 2008 dan kemudian menjadi 14.050 orang di tahun 2009. Namun demikian, kemiskinan masih menjadi perhatian pemerintah Kota Salatiga, karena penurunannya yang terjadi secara lambat dan tidak disertai dengan pemerataan. Problem utama yang dihadapi kaum miskin adalah akses terhadap sumber daya produktif, seperti tanah maupun fasilitas permodalan (Suara Pembaharuan, 2010). Salah satu tindakan yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengurangan disparitas pendapatan adalah dengan membantu kaum miskin untuk mengakses fasilitas permodalan. Bantuan untuk mempermudah akses terhadap fasilitas permodalan ini sangat penting untuk pengembangan usaha kecil.

Sebenarnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang bertujuan memberikan kemudahan akses kredit bagi kelompok penduduk miskin, yaitu dengan adanya program subsidi bunga melalui Kredit Usaha Rakyat. Namun kebijakan itu belum memberikan hasil optimal dikarenakan menurut data Bank Dunia, 50% rumah tangga di Indonesia tidak memiliki akses terhadap lembaga perbankan¹. Selain itu hasil penelitian Sutikno (2004) menunjukkan akses kredit pedagang informal Salatiga ke lembaga keuangan perbankan di

¹ <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/reducingpoverty.pdf>

Salatiga hanya 58%. Artinya, sebanyak 42% pedagang informal mengakses kredit dari sumber lainnya, baik itu lembaga keuangan non perbankan maupun lembaga informal.

Sementara itu, mata pencaharian penduduk Salatiga sebagai buruh industri menempati urutan pertama (14,77%) dan urutan kedua adalah pedagang sebanyak 10,48% (Badan Pusat Statistik, 2006). Perdagangan merupakan sektor yang terus berkembang di Salatiga. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya ruko dan pedagang kali lima (PKL) baru. Melihat besarnya peran sektor perdagangan terhadap perekonomian Salatiga, maka salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat pengurangan disparitas pendapatan masyarakat Salatiga adalah dengan memfasilitasi akses permodalan bagi para pedagang.

Untuk itu perlu diketahui sumber pendanaan yang saat ini digunakan oleh para pedagang dan kendala yang dihadapi dalam akses kredit. Dengan latar belakang tersebut maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah dari mana sajakah pedagang memperoleh sumber pembiayaan? Melalui penelitian ini ingin diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan pedagang, kendala-kendala yang dihadapi pedagang dalam mengakses kredit dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan penggunaan kredit perbankan oleh pedagang di Salatiga.

MATERI DAN METODE PENELITIAN

Modal usaha dapat diperoleh dari tiga sumber utama, yaitu sumber dana internal yang berasal dari laba atau simpanan, utang dagang yaitu fasilitas yang diberikan oleh pemasok di mana pemasok mengirimkan barang tetapi tidak mewajibkan untuk membayar pada saat yang bersamaan (pembayaran dilakukan dengan tempo waktu dan tidak dikenai beban bunga), dan pinjaman atau utang, baik dari lembaga keuangan formal yaitu bank maupun non bank dan melalui lembaga keuangan non formal, sedang hasil penelitian Bates (1997) mengenai imigran Cina dan Korea yang menjadi wirausahawan di Amerika menunjukkan selain dari lembaga keuangan, sumber pinjaman sebagai modal ketika awal menjalankan usaha juga dapat berasal dari keluarga dan teman. Dalam studi Akyüz, *et al.* (2004), pembiayaan UMKM di sektor industri produk hasil-

hasil hutan di Turkey untuk mempelajari pola pengambilan kredit, selain dari lembaga keuangan, keluarga, teman dan relasi, kredit juga dapat bersumber dari tabungan pemilik usaha. SMERU (2002) dalam penelitiannya menemukan beberapa sumber keuangan non bank yang biasa diakses masyarakat kota Yogyakarta antara lain adalah pegadaian, Badan Usaha Kredit Pedesaan, arisan RT/RW/dasawisma, kelompok paguyuban serta kredit program. Mukbar (2008) dalam penelitian mengenai dinamika kerja dan kehidupan rumah tangga perdesaan di Jawa Tengah menunjukkan sumber kredit informal antara lain adalah rentenir dan kredit barang (*mindring*).

Keputusan seorang pedagang untuk mengambil kredit atau pinjaman dari bank tentunya dipengaruhi oleh banyak faktor. Abor (2008) menguji beberapa faktor yang mempengaruhi struktur modal pada perusahaan-perusahaan di Ghana. Khusus untuk kelompok usaha kecil, faktor yang diuji meliputi faktor konvensional atau tradisional (umur usaha, ukuran usaha, struktur aset, profitabilitas, pertumbuhan, dividen, risiko, pajak, dan *ownership*) serta jenis industri, lokasi, tingkat pendidikan, gender, bentuk kepemilikan, dan orientasi pasar. Temuan penting dalam penelitian tersebut adalah bahwa pengusaha laki-laki lebih banyak memanfaatkan sumber pembiayaan dari pinjaman jangka panjang melalui perbankan dibanding dengan pengusaha wanita. Hal ini bukan berarti pengusaha wanita tidak berminat memanfaatkan sumber pembiayaan dari pinjaman jangka panjang perbankan, tetapi karena wanita dianggap memiliki *risk aversion* yang lebih besar daripada laki-laki sehingga pengusaha wanita enggan mengakses ke lembaga perbankan.

Dalam penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal pada 299 usaha kecil dan menengah di Irlandia, diketahui struktur modal dipengaruhi oleh umur usaha, skala usaha dan kepemilikan aset agunan (Mac). Pengusaha dengan kepemilikan aset yang bisa digunakan untuk agunan akan lebih memilih memanfaatkan sumber pembiayaan dengan pinjaman jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa pengusaha yang tidak memiliki aset untuk agunan akan sulit untuk akses pinjaman jangka panjang. Kondisi inilah yang mendorong munculnya kredit informal².

² http://doras.dcu.ie/4529/2/Mac_An_Bhaird_SBEJ573_Doras.pdf

Kredit informal berkembang karena seringkali kredit formal sulit diakses. Beberapa kelemahan lembaga kredit formal untuk dapat diakses menurut Komisi Ekonomi dan Sosial untuk Asia Pasifik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah 1) kredit formal biasanya membutuhkan sejumlah agunan, 2) administrasi pengajuan permohonan kredit seringkali rumit dan membutuhkan waktu lama, dan 3) biaya administrasi relatif mahal. Kredit informal umumnya diakses karena tidak membutuhkan agunan dan lebih mengandalkan pada komitmen debitur. Menurut Avery, *et al.* (1998) keberhasilan untuk mengakses kredit sering ditentukan oleh kemampuan pengusaha dalam menunjukkan komitmennya. Mayoritas kredit untuk usaha kecil mengandalkan komitmen perorangan yang hanya dapat menutup 10% dari total investasi pengusaha. Sekitar 20% dari usaha yang memiliki kredit, umumnya tidak memerlukan komitmen yang tinggi. Avery juga menemukan tidak ada hubungan antara kredit berdasarkan komitmen dengan kekayaan pengusaha. Komitmen perorangan merupakan substitusi untuk agunan usaha, sementara agunan perorangan dan komitmen perorangan tidak saling mensubstitusi.

Hasil penelitian Abor (2008) menunjukkan bahwa umur perusahaan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap hutang jangka panjang di usaha kecil. Semakin lama usia perusahaan diasumsikan kontinyuitas usahanya semakin terjamin, sehingga meningkatkan kapasitas penggunaan kredit. Hal serupa diduga juga terjadi pada pedagang mikro di Salatiga, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis: *Umur perusahaan berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.*

Keputusan pihak bank untuk mengucurkan kredit ditentukan oleh kemampuan aset berwujud yang dimiliki perusahaan dalam menjamin kredit tersebut. Abor (2008) juga menyatakan bahwa banyak penelitian lain yang menemukan hubungan positif antara struktur aset dengan hutang jangka panjang dan hubungan negatif antara struktur aset dengan hutang jangka pendek. Penelitian ini tidak menggunakan struktur aset mengingat obyek penelitian adalah pedagang dengan skala mikro. Sebagai gantinya digunakan variabel jenis aset yang dapat dijadikan jaminan. Aset yang sering digunakan sebagai jaminan untuk usaha skala mikro adalah kendaraan bermotor roda dua, mengingat

besaran kredit yang dibutuhkan relatif kecil sehingga dapat dirumuskan hipotesis:

Kepemilikan kendaraan bermotor roda dua berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Menurut Abor (2008), latar belakang pendidikan seorang pengusaha diyakini memiliki hubungan positif dengan tingkat utang yang digunakan. Penelitian ini juga menggunakan tingkat pendidikan sebagai faktor yang diduga berpengaruh terhadap pengajuan kredit. Semakin tinggi tingkat pendidikan, seorang pedagang diduga memiliki kemampuan yang lebih baik dalam mencari dan mengolah informasi sehingga akan meningkatkan peluang penggunaan kredit dari lembaga keuangan formal, sehingga hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Tingkat pendidikan berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Jenis kelamin pengusaha berpengaruh terhadap struktur modal yang digunakan dalam sebuah usaha. Pengusaha wanita dinilai lebih menghindari risiko (*risk averse*) dibanding laki-laki. Menurut Abor (2008), selain itu jaringan (*network*) pengusaha wanita juga dianggap tidak seluas laki-laki sehingga akses informasi juga terbatas. Hal tersebut akan mengakibatkan pengusaha wanita akan cenderung menggunakan sumber dana non formal, seperti sumber keuangan perorangan, sehingga dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

Pedagang yang berjenis kelamin perempuan berpeluang lebih kecil untuk mengambil kredit dari lembaga keuangan formal.

Dalam penelitian ini ada beberapa variabel yang berbeda dari variabel dalam penelitian Abor (2008), yaitu jenis dagangan dan usia pedagang. Semakin tua usia pedagang, diduga akan semakin menghindari risiko dari keputusan finansial yang akan membebani keluarganya. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan hipotesis sebagai berikut:

Usia berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Jenis dagangan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga, yaitu 1) makanan dan minuman siap saji, 2) bahan makanan, dan 3) non makanan. Perputaran modal dalam perdagangan makanan dan minuman siap saji lebih cepat, sehingga

kebutuhan modal juga tidak terlalu besar. Hal ini diduga menyebabkan pedagang makanan dan minuman siap saji tidak menggunakan kredit dari lembaga keuangan formal. Sedangkan kebutuhan modal dalam perdagangan bahan makanan relatif lebih besar sehingga diduga pedagang bahan makanan akan menggunakan kredit dari lembaga keuangan formal. Oleh karena itu, dua rumusan hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

Jenis dagangan makanan dan minuman siap saji berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Jenis dagangan bahan makanan berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

Populasi dari penelitian ini adalah para pedagang di Salatiga. Sampel penelitian ini diambil dengan metode stratifikasi (*stratified sampling method*) menurut data pedagang di tiap pasar di Salatiga. Dengan asumsi proporsi populasi pedagang di Salatiga yang mengambil kredit perbankan adalah 50% dan dengan toleransi kesalahan 0,1 (a), maka ukuran sampel minimal yang harus diambil berdasarkan Levine, *et al.* (2006) adalah 67,64 pedagang. Sampel dalam penelitian ini adalah 104 pedagang dalam skala mikro. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan mensurvei para pedagang melalui *indepth interview* dengan menggunakan kuesioner sebagai panduan.

Analisis dalam penelitian ini akan menggunakan metode statistika deskriptif dan analisis regresi logistik (*logistic regression*). Metode statistika deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik pedagang di Kota Salatiga serta mengidentifikasi berbagai sumber pembiayaan pedagang dan kendala-kendala yang dihadapi pedagang dalam mengakses kredit. Analisis regresi logistik digunakan untuk membangun model yang dapat digunakan untuk mengestimasi keputusan pengambilan kredit berdasarkan berbagai faktor yang diduga dapat mempengaruhi keputusan tersebut.

Adapun model yang akan diestimasi mengacu pada model Abor (2008), namun hanya variabel yang dianggap relevan yang akan diestimasi dan ditambah temuan penelitian di Irlandia sehingga model yang akan diestimasi adalah:

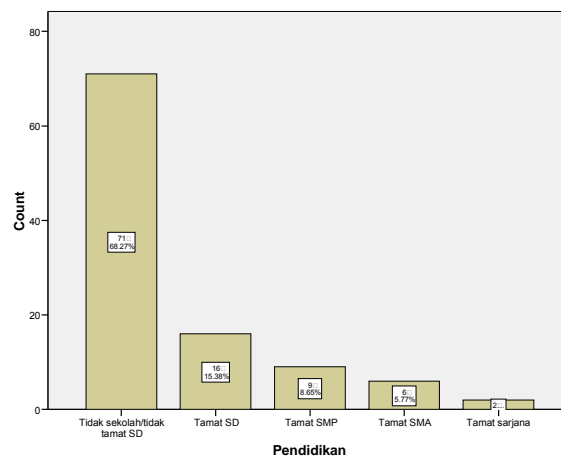
$$\ln = \frac{P(X_1, \dots, X_7)}{1 - (X_1, \dots, X_7)} b_0 + b_1 \cdot X_1 + b_2 \cdot X_2 + b_3 \cdot X_3 + b_4 \cdot X_4 + b_5 \cdot X_5 + b_6 \cdot X_6 + b_7 \cdot X_7$$

di mana: X_1 = pedagang wanita, X_2 = umur pedagang, X_3 = tingkat pendidikan, X_4 = dagangan makanan dan minuman siap saji, X_5 = dagangan bahan makanan, X_6 = umur usaha, X_7 = kepemilikan aset kendaraan roda dua, b_0 = koefisien regresi konstan, b_i = koefisien regresi dari variabel bebas ke- i ($i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7$), $P(X_1, \dots, X_k)$ = peluang pedagang mengambil kredit di lembaga keuangan formal dan $1 - P(X_1, \dots, X_k)$ = peluang pedagang tidak mengambil kredit di lembaga keuangan formal.

HASIL PENELITIAN

Mayoritas responden adalah pedagang wanita (84,62%), sedang rata-rata usia responden adalah 52,37 tahun sehingga wajar apabila mayoritas responden sudah menikah (79,8%). Selain itu mayoritas pedagang pasar tidak memiliki latar pendidikan formal yang tinggi. Hal ini terlihat dari data yang menunjukkan hampir 70% pedagang tidak sekolah/tidak tamat SD. Hampir 90% responden hanya memiliki satu jenis dagangan saja, sisanya memiliki lebih dari satu jenis barang dagangan. Makanan dan minuman siap saji serta bahan makanan adalah yang paling banyak diperdagangkan. Ditinjau dari umur usaha, sebagian besar responden (80,8%) telah berdagang sedikitnya lima tahun. Sebagian pedagang yang umur usahanya kurang dari lima tahun, menyatakan bahwa usaha yang dijalannya saat ini adalah usaha warisan. Beberapa pedagang juga menyatakan usahanya masih kurang dari lima tahun karena mengalami penggantian jenis dagangan. Pergantian jenis dagangan tersebut disebabkan antara lain karena kebakaran pasar atau renovasi pasar yang bermasalah. Bentuk kepemilikan usaha yang teridentifikasi seluruhnya merupakan usaha sendiri. Hal ini diduga disebabkan oleh skala usaha yang kecil (mikro).

Sebanyak 73% dari responden memiliki aset. Sebenarnya responden dapat memiliki lebih dari satu aset, namun dalam hal ini hanya diperhitungkan satu aset, yaitu yang dapat digunakan untuk usaha skala



Gambar 1
Distribusi Responden Menurut Tingkat Pendidikan

mikro. Adapun jenis-jenis aset yang dimiliki dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Distribusi Responden Menurut Jenis Aset yang Dimiliki

Pemilikan Aset	Frekuensi	Persentase (%)
Tidak punya asset	28	26,9
Kendaraan bermotor	17	16,3
Tanah dan/atau rumah	56	53,8
Hewan	2	1,9
Kios	1	1,0
Total	104	100,0

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

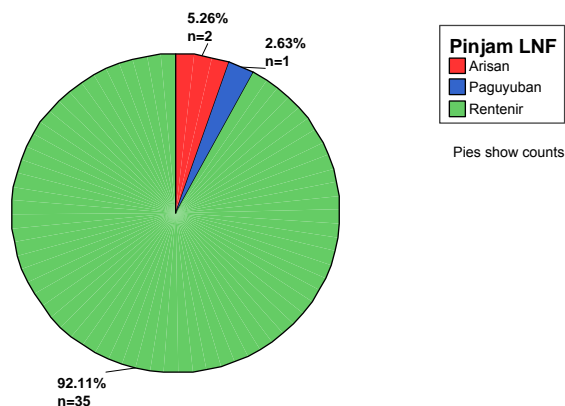
Seorang pedagang dapat menggunakan lebih dari satu sumber pendanaan. Sumber pendanaan yang paling banyak digunakan adalah modal sendiri. Hal ini wajar, mengingat skala usaha yang kecil (mikro) sehingga kebutuhan modal dirasa tidak terlalu besar. Bahkan ada beberapa pedagang yang menjual hasil kebun sendiri, seperti sayur mayur dan bunga tabur.

Tabel 2
Jumlah Responden Menurut Sumber Pendanaan

Sumber Pendanaan	Frekuensi
Modal sendiri	64
Lembaga non formal	36
Lembaga keuangan	25
Hutang dagang	22
Pinjam saudara	7
Pinjam teman	4
Program Pengentasan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP)	1

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Sumber pendanaan dari lembaga non formal yang diakses oleh pedagang terdiri dari tiga sumber, yaitu arisan, paguyuban dan rentenir. Rentenir merupakan sumber pendanaan non formal yang paling banyak (92,11%) dimanfaatkan oleh pedagang pasar. Beberapa alasan penggunaan rentenir sebagai sumber pendanaan dapat dilihat dalam Tabel 3.



Gambar 2
Distribusi Responden Menurut Jenis Lembaga Keuangan Non Formal

Tabel 3
Jumlah Responden Menurut Alasan Penggunaan Rentenir

Alasan	Frekuensi
Tanpa agunan	11
Kemudahan administrasi	6
Dapat diundur waktu pembayarannya	5
Nilai angsuran fleksibel	4

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Semua alasan tersebut sebenarnya mengindikasikan bahwa pedagang cenderung mengakses sumber pendanaan yang sederhana pengurusannya. Bahkan, pedagang tidak menyadari tingginya tingkat bunga yang harus dibayar. Hasil penelitian di lapangan terungkap bahwa tingkat bunga yang dikenakan oleh rentenir rata-rata 20% untuk jangka waktu sekitar satu bulan. Fenomena tersebut diperkuat oleh terungkapnya alasan pedagang yang tidak mengakses lembaga keuangan formal sebagai sumber pendanaan. Beberapa alasan yang terlontar dari pedagang mengapa mereka khawatir tidak dapat mengangsur adalah sedang mengalami penurunan omset, baru merintis usaha, bunga dirasa tinggi, masih mempunyai tanggungan (anak), sedang sebagian pedagang mengemukakan alasan skala usaha yang masih kecil, merasa masih mampu memenuhi kebutuhan modal menggunakan modal sendiri.

Alasan tidak mengakses lembaga keuangan formal lainnya yang terungkap adalah tidak memiliki aset yang dapat dijadikan sebagai agunan. Namun ada juga yang memiliki aset tetapi merasa nilainya tidak sesuai (terlalu besar) dengan nilai kredit yang hendak diajukan. Hal ini terjadi aset yang dimiliki oleh sebagian besar responden berupa rumah dan/atau tanah. Selain itu ada juga responden yang mungkin memiliki aset yang nilainya setara dengan kebutuhan modal, tetapi mereka tidak terbiasa menjaminkan aset, atau mereka tidak berani mengambil risiko kehilangan aset.

Berdasarkan hasil estimasi model logit diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\ln = \frac{P(X_1, \dots, X_7)}{1 - (X_1, \dots, X_7)} - 1,94 + 2,04X_1 + 0,05X_2 + 0,82X_3 - 0,66X_4 + 0,09X_5 + 0,05 \cdot X_6 - 1,38X_7$$

PEMBAHASAN

Model logit di atas mampu menjelaskan 21,3% (*Nagelkerke R-Square*) keputusan pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal, sisanya ditentukan oleh faktor lain. Kemampuan model yang terbentuk untuk memprediksi peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan dengan tepat adalah 76,9%. Nilai signifikansi uji *Hosmer and Lemeshow* sebesar 0,58 (> 0,1)

Tabel 4
Koefisien dan Nilai Signifikansi Model Regresi

Variabel	B	SE	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Pedagang wanita	2,041	1,037	3,875	1	0,049*	7,696
Usia	-0,042	0,025	2,791	1	0,095*	0,959
Pendidikan	0,821	0,359	5,224	1	0,022*	2,273
Dagang Makanan	-0,661	0,761	0,755	1	0,385	0,516
Dagang Bahan Makanan	0,088	0,756	0,014	1	0,907	1,092
Umur Usaha	0,052	0,300	0,030	1	0,863	1,053
Aset Motor	-1,379	0,984	1,961	1	0,161*	0,252
Constant	-1,944	2,241	0,753	1	0,386	0,143

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Catatan: * signifikan pada $\alpha = 10\% = 0,1$

menunjukkan model mampu mewakili hubungan antara variabel-variabel bebas dengan variabel tak bebas.

Nilai signifikansi *omnibus tests* dari model dalam penelitian ini adalah 0,025 ($< 0,1$) sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas secara bersama-sama mampu menjelaskan peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal. Selanjutnya dilakukan uji *wald* untuk melihat pengaruh pengaruh variabel bebas secara individu terhadap keputusan kredit. Berdasarkan uji *wald* (Tabel 4) didapat nilai signifikansi uji pengaruh pedagang dengan jenis kelamin perempuan adalah sebesar 0,0245 ($< 0,1$). Artinya terbukti bahwa pedagang perempuan memiliki peluang yang lebih besar untuk mengambil kredit di lembaga keuangan formal dibandingkan pedagang laki-laki. Temuan ini tidak sesuai dengan temuan Abor (2008). Hal ini diduga karena mayoritas pedagang adalah perempuan yang notabene lebih selektif dalam memilih sumber pembiayaan. Dengan nilai signifikansi sebesar 0,0475 ($< 0,1$), faktor usia pedagang juga mempengaruhi secara negatif peluang pengambilan kredit di lembaga keuangan formal, sedang tingkat pendidikan pedagang berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit di lembaga keuangan formal karena nilai signifikansi variabel ini 0,011 ($< 0,1$). Kepemilikan kendaraan bermotor roda dua juga terbukti berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal. Hal ini terlihat dari nilai signifikansi sebesar 0,08 ($< 0,1$). Perbedaan arah pengaruh kepemilikan kendaraan bermotor dengan

hipotesis yang diajukan, diduga karena penggunaan kendaraan bermotor tak terletak pada pedagang secara langsung, mengingat sebagian besar responden adalah pedagang perempuan berusia tua dan kebutuhan modal para pedagang jauh lebih kecil daripada nilai kredit yang dapat dijamin menggunakan motor sehingga penggunaan motor sebagai agunan kredit dinilai tidak seimbang. Sisa tiga variabel lainnya dalam model terbukti tidak berpengaruh terhadap peluang pengambilan kredit dari lembaga keuangan formal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Faktor yang terbukti berpengaruh negatif terhadap peluang pengambilan kredit di lembaga keuangan formal adalah kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan usia pedagang, sedang faktor-faktor yang terbukti berpengaruh positif terhadap peluang pengambilan kredit di lembaga keuangan formal adalah jenis kelamin wanita dan tingkat pendidikan dengan tingkat pendidikan sebagai faktor utama. Tingkat pendidikan ini mempengaruhi kemampuan mengakses dan menganalisis informasi sehingga pedagang dengan tingkat pendidikan yang relatif rendah cenderung menggunakan sumber pendanaan informal (perorangan) yang dirasa sederhana yang tidak perlu dicari informasinya.

Saran

Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat bunga bukan merupakan faktor utama yang menentukan seorang pedagang dalam mengambil kredit. Bahkan, sebagian besar dari responden menggunakan kredit dari rentenir yang tingkat bunganya lebih tinggi. Oleh karena itu, faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah pada saat akan memberikan bantuan permodalan bagi pedagang adalah kemudahan administrasi, dengan meniru strategi yang digunakan khususnya oleh rentenir yaitu adalah dengan pola jempot bola dan tanpa agunan. Untuk nilai kredit yang cukup tinggi tetap dapat menggunakan agunan yang berfungsi sebagai tanda pengikat tetapi tidak perlu sesuai dengan nilai kredit seperti ijasah terakhir, surat nikah, bukti kepemilikan kios, dan sebagainya.

Penyaluran kredit dari pemerintah sebaiknya juga tidak melalui lembaga keuangan formal karena akan mempengaruhi penilaian kinerja lembaga sehingga penyaluran kredit dilakukan dengan sangat hati-hati yang pada akhirnya akan menjadi terlalu sulit (kompleks) bagi pedagang skala kecil. Kredit dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga seperti KUD, LKD, BKD, dan BKK. Hal yang tidak kalah penting dalam rangka penyaluran kredit bagi pedagang skala kecil adalah memperbaiki *moral hazard*. Selama ini jika pemerintah memberikan dana, diasumsikan oleh penerima kredit bahwa dana tersebut tidak perlu dikembalikan. Pandangan seperti itu akan menghambat kontinuitas penyaluran kredit lunak dari pemerintah dan akhirnya akan menghambat upaya pemerintah mengurangi kemiskinan. Edukasi mengenai berbagai sumber pendanaan beserta kelebihan dan kekurangannya juga berperan dalam mensukseskan upaya pemerintah dalam menyalurkan kredit. Edukasi pasar penting karena latar belakang pendidikan para pedagang yang mayoritas rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Abor, Joshua. 2008. Determinants of the Capital Structure of Ghanaian Firms. *AERC Research Paper 176*. African Economic Research Consortium. Nairobi.

Akyüz, KC., *et al.* 2006. "The Financing Preferences and Capital Structure of Micro, Small, and Medium Sized Firm Owners in Forest Products Industry in Turkey", *Forest Policy and Economics*. Vol. 8:301-311.

Avery, RB., *et al.* 1998. "The Role of Personal Wealth in Small Business Finance". *Journal of Banking & Finance*. Vol. 22:1019-1061.

Badan Pusat Statistik. 2007. *Salatiga dalam Angka 2006*.

Bappeda dan BPS Kota Salatiga. 2008. *Produk Domestik Regional Bruto Kota Salatiga Tahun 2008*.

Bates, Timothy. 1997. "The Care of Chinese and Korean Immigrant Entrepreneurs". *Journal of Business Venturing*. Vol. 12:109-124.

Economic and Social Commission for Asia and the Pacific. 1979. *Guidelines for Rural Centre Planning*. United Nations. New York.

Hair *et al.* 2006. *Multivariate Data Analysis*. Pearson International Edition.

Kedaulatan Rakyat. *Sepi Ratusan Kios Ditinggal Penghuni*. 23 Februari 2008.

Levine, DM. *et al.* 2006. *Business Statistics*. Pearson Prentice-Hall.

Mac an Bhaird, C. and Lucey, B. 2010. "Determinants of Capital Structure in Irish SMEs". *Small Business Economics*. Vol. 35. Number 3.

Mukbar, Deni. 2008. *Apakah orang miskin layak dipercaya? Yakinkah memberikan pinjaman terhadap orang miskin?*

Suara Merdeka. *Penataan PKL Mesti Jadi Prioritas*. 24 Juli 2006

Suara Pembaruan. *Penurunan Kemiskinan Lambat*. 29 September 2010.

Sutikno, C. 2004. Akses Kredit Pedagang Informal ke Lembaga Keuangan Perbankan di Salatiga. *Tesis Magister Administrasi Publik*. Diakses dari [http://puspasca.ugm.ac.id/files/\(2389-H-2004\).pdf](http://puspasca.ugm.ac.id/files/(2389-H-2004).pdf).

Wibowo, P. dan Munawar, W. 2002. *Studi Kredit Kecil Perkotaan di Kota Yogyakarta*. SMERU.

[<http://www.bps.go.id>]

[<http://www.wirusaha.com>]

KEBIJAKAN DIVIDEN PADA PERUSAHAAN YANG DIKENDALIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PENGENDALI

Baldric Siregar

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telepon +62 274 486160, 486321, Fax. +62 274 486155
E-mail: siregar@accountant.com

ABSTRACT

The primarily agency problem for firms with ownership concentration is the conflict between controlling and minority shareholders. The concentration of corporate control in the hands of controlling shareholder creates powerful incentives and ability to expropriate minority shareholders. This paper is aimed to examine the evidence on expropriation of minority shareholders by the controlling shareholder through dividend payment. By using sample consists of firms listed in the Indonesia Stock Exchange for the period from 2000 to 2005, this paper proves that controlling shareholder expropriate minority shareholders through dividend policy. Moreover, when control rights exceed cash flow rights, the controlling shareholder has higher incentive to expropriate by participating in firm's management. The Cash flow rights, however, are important incentive sources to avoid expropriation.

Keywords: expropriation, dividend, controlling shareholder, ultimate ownership, immediate ownership, cash flow right, control right, cash flow right leverage

PENDAHULUAN

Fenomena bahwa berbagai perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama lazim di temukan di Indonesia. Pemegang saham pengendali tidak mudah diidentifikasi apabila hanya mengandalkan informasi kepemilikan imediat¹ dari laporan keuangan tahunan. Fenomena ini terjadi karena berbagai mekanisme kepemilikan tidak langsung, khususnya kepemilikan piramida, merupakan mekanisme kepemilikan yang umum ditemukan. Dengan konsep kepemilikan imediat yang selama ini digunakan, gambaran rangkaian kepemilikan secara komprehensif tidak dapat diketahui. Untuk itu dibutuhkan konsep baru, yaitu kepemilikan ultimat² agar rangkaian kepemilikan, konsentrasi kepemilikan, dan pemegang saham pengendali yang diidentifikasi lebih menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. La Porta *et al.* (1999) adalah peneliti pertama yang menginvestigasi struktur kepemilikan dengan konsep ultimat. La Porta *et al.* (1999) memperoleh bukti bahwa fenomena konsentrasi kepemilikan perusahaan terjadi di Asia, Eropa, Amerika, dan Australia. Claessens *et al.*

¹ Kepemilikan imediat (*immediate ownership*) adalah kepemilikan langsung terhadap perusahaan publik yang ditunjukkan oleh persentase kepemilikan saham. Dengan konsep kepemilikan ini klasifikasi kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi semata-mata ditentukan berdasarkan persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham atas nama dirinya masing-masing.

² Kepemilikan ultimat (*ultimate ownership*) adalah kepemilikan langsung dan tidak langsung terhadap perusahaan. Kepemilikan langsung adalah persentase saham yang dimiliki pemegang saham atas nama dirinya sendiri; kepemilikan tidak langsung adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan melalui perusahaan lain.

(2000a) serta Faccio dan Lang (2002) menindaklanjuti penelitian La Porta *et al.* (1999). Kedua penelitian menguatkan temuan sebelumnya bahwa kepemilikan perusahaan di Asia, termasuk Indonesia (Claessens *et al.*, 2000a) dan Eropa (Faccio dan Lang, 2002) terkonsentrasi.

Konflik kepentingan berkaitan dengan kepemilikan dan kontrol dibahas dalam kerangka teori keagenan. Konsentrasi kepemilikan yang sesungguhnya perlu diidentifikasi dengan tepat agar potensi konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan tergambar. La Porta *et al.* (2000) menyatakan bahwa konflik keagenan pada perusahaan dengan kepemilikan tersebar adalah konflik antara manajemen dan pemegang saham. Namun pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi, konflik keagenan bergeser menjadi konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Pemegang saham pengendali dapat menentukan secara efektif kebijakan yang dijalankan oleh manajemen. Bahkan manajer merupakan bagian dari pemegang saham pengendali itu sendiri. Pemegang saham pengendali dapat mengalihkan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi dan mengorbankan kepentingan pemegang saham nonpengendali.

Teori keagenan klasik Berle dan Means (1932) mendasarkan diri pada asumsi kepemilikan perusahaan publik yang tersebar. Dengan kepemilikan tersebar, kontrol berada di tangan manajer. Karena itu, masalah keagenan yang menonjol dalam hal ini adalah konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer. Gilson dan Gordon (2003) serta Villalonga dan Amit (2004) menamai konflik keagenan ini sebagai konflik keagenan klasik. Oleh Eisenhardt (1989) fenomena keagenan ini termasuk dalam kategori *positivist research*. Penelitian-penelitian sebelumnya masih menguji teori keagenan dengan fenomena konflik keagenan antara pemegang saham dengan manajer seperti Brickley *et al.* (1988), Jensen *et al.* (1992), Chen dan Steiner (1999), serta Crutchley *et al.* (1999). Fenomena konflik antara pemegang saham besar dengan pemegang saham nonpengendali merupakan

konflik keagenan yang secara kontekstual mungkin konflik utama di negara berkembang dengan perusahaan yang memiliki karakteristik kepemilikan terkonsentrasi, kepemilikan tidak langsung, dan pemegang saham yang terlibat dalam manajemen. Dengan karakteristik seperti itu, isu baru adalah pemisahan antara hak aliran kas dan hak kontrol antarpemegang saham; bukan lagi pemisahan kepemilikan di tangan pemegang saham dan kontrol di tangan manajemen.

Gilson dan Gordon (2003) mengidentifikasi ada dua sisi masalah keagenan. Pertama, masalah keagenan klasik yang sudah lazim dikenal, yaitu konflik antara prinsipal dan agen. Masalah keagenan ini muncul karena adanya pemisahan kepemilikan dan kontrol (Jensen dan Meckling, 1976). Kedua, masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Masalah keagenan ini muncul karena adanya potensi pemegang saham pengendali untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol yang dimilikinya. Manfaat privat atas kontrol tersebut tidak dimiliki oleh pemegang saham nonpengendali. Adanya pemegang saham pengendali menyebabkan masalah keagenan antara manajemen dan pemegang saham berkurang, namun muncul masalah keagenan lain antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali.

Masalah keagenan dalam kepemilikan terkonsentrasi berdasarkan konsep ultimatum muncul karena adanya dominasi kepemilikan pemegang saham pengendali, baik dominasi hak aliran kas, dominasi hak kontrol, maupun deviasi kedua jenis hak tersebut.³ Fenomena pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol terjadi karena adanya konsentrasi kepemilikan perusahaan dengan konsep ultimatum. Dalam kepemilikan terkonsentrasi yang ditentukan berdasarkan konsep ultimatum, konsentrasi kepemilikan dapat berupa konsentrasi hak aliran kas dan konsentrasi hak kontrol. Kedua konsentrasi tersebut dapat berbeda karena adanya mekanisme peningkatan kontrol yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali, seperti mekanisme kepemilikan piramida dan kepemilikan silang.

³ Hak aliran kas (*cash flow right*) adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan. Hak kontrol (*control right*) adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan perusahaan. Deviasi hak aliran kas dari hak kontrol dinamai *cash flow right leverage* (La Porta *et al.*, 1999).

Konsentrasi hak aliran kas, konsentrasi hak kontrol, dan dan *leverage* hak aliran kas tidak berjalan bersama-sama, tetapi masing-masing memiliki implikasi tersendiri terhadap kebijakan perusahaan. Hak kontrol merupakan insentif untuk melakukan ekspropriasi⁴ dalam rangka mendapatkan manfaat privat; hak aliran kas adalah insentif untuk menghindari ekspropriasi; sementara *leverage* hak aliran kas adalah peningkatan insentif untuk memanfaatkan dominasi kontrol dalam rangka melakukan ekspropriasi. Isu penelitian ini adalah sejauh mana implikasi pemisahan hak kontrol dan hak aliran kas terhadap kebijakan dividen di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peneliti bermaksud untuk menginvestigasi apakah pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi melalui dividen dengan mengkaji besaran dividen yang dibayar apabila terdapat pemisahan antara hak kontrol dengan hak aliran kas.

MATERI DAN BAHAN PENELITIAN

Kepemilikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai kepemilikan tersebar dan kepemilikan terkonsentrasi. Perusahaan dengan kepemilikan tersebar adalah perusahaan yang pada pisah batas hak kontrol tertentu tidak memiliki pemegang saham pengendali. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi adalah perusahaan yang pada pisah batas hak kontrol tertentu memiliki pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali adalah pemegang saham yang memiliki kontrol terbesar, baik kontrol langsung maupun kontrol tidak langsung, terhadap perusahaan. Kontrol langsung pemegang saham menggambarkan besaran persentase kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan atas nama sendiri tanpa melalui perusahaannya, sedang kontrol tidak langsung pemegang saham menggambarkan besaran kepemilikan saham terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan.

Keberadaan pemegang saham pengendali pada suatu perusahaan tergantung pada tingkat pisah batas hak kontrol yang digunakan. Semakin rendah pisah batas hak kontrol semakin mungkin suatu perusahaan

dikategorikan memiliki pemegang saham pengendali. Sebaliknya, semakin tinggi pisah batas hak kontrol semakin rendah kemungkinan suatu perusahaan dikategorikan memiliki pemegang saham pengendali. Sebagai contoh, pemilik PT A adalah Heru, Jony, Rahmat, dan masyarakat luas dengan kepemilikan masing-masing 8%, 18%, 29%, dan 45%. Pada pisah batas hak kontrol 10%, Jony dan Rahmat termasuk kategori pemegang saham pengendali. Pada pisah batas hak kontrol 20% hanya Rahmat yang termasuk kategori pemegang saham pengendali, sedang pada pisah batas hak kontrol 30% tidak ada pemegang saham pengendali pada PT A. Dengan demikian, perusahaan tersebut dikategorikan sebagai perusahaan dengan kepemilikan tersebar. Pada pisah batas hak kontrol 10%, sebanyak 76% perusahaan dunia memiliki pemegang saham pengendali (La Porta *et al.*, 1999) dan 93% perusahaan Asia memiliki pemegang saham pengendali (Claessens *et al.*, 2000a). Pemegang saham pengendali bisa berupa keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan tersebar, perusahaan dengan kepemilikan tersebar, dan pemegang saham pengendali lainnya (La Porta *et al.*, 1999; Claessens *et al.*, 2000a).

Keluarga menggambarkan seseorang atau beberapa orang dalam satu kesatuan famili sebagai pemegang saham pengendali perusahaan. Anggota keluarga dikategorikan sebagai satu kesatuan pemegang saham pengendali dengan asumsi mereka memberikan hak suara sebagai koalisi (Wiwattanakantang, 2000). La Porta *et al.* (1999), Claessens *et al.* (2000a), serta Faccio dan Lang (2002) mengidentifikasi keluarga berdasarkan kesamaan nama belakang dan hubungan perkawinan. Pada pisah batas hak kontrol 10%, sebanyak 35% perusahaan publik dunia dikendalikan oleh keluarga (La Porta *et al.*, 1999). Khusus di Asia, Claessens *et al.* (2000a) menemukan bahwa sebanyak 54% perusahaan publik dikendalikan oleh keluarga. Pada tingkat pisah batas hak kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan sebanyak 44% perusahaan publik Eropa dikendalikan oleh keluarga.

Pemerintah dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali apabila pemilik terbesar ultimat suatu

⁴ Ekspropriasi (*expropriation*) adalah proses penggunaan kontrol untuk memaksimalkan kesejahteraan sendiri dengan distribusi kekayaan dari pihak lain (Claessens *et al.*, 2000b).

perusahaan adalah pemerintah pada tingkat hak kontrol tertentu. Pemerintah dikategorikan sebagai pemegang saham pengendali tersendiri karena tujuan pemerintah mengendalikan perusahaan relatif berbeda dari tujuan pemegang saham pengendali lainnya. Umumnya pemerintah mengendalikan perusahaan untuk tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan tujuan politik (Shleifer dan Vishny, 1994). Untuk pisah batas hak kontrol 10%, sebanyak 20% perusahaan publik dunia dikendalikan oleh pemerintah (La Porta *et al.*, 1999). Di Asia, Claessens *et al.* (2000a) menemukan bahwa sebanyak 9% perusahaan publik dikendalikan oleh pemerintah. Pada tingkat pisah batas hak kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan sebanyak 4% perusahaan publik Eropa dikendalikan oleh keluarga.

Sebuah perusahaan publik dapat saja dimiliki oleh perusahaan publik lain. Apabila pada perusahaan pemilik tersebut tidak ada pemegang saham pengendali atau dimiliki oleh masyarakat secara tersebar, maka La Porta *et al.* (1999) dan Claessens *et al.* (2000a) mengidentifikasi kemungkinan pemegang saham pengendalinya sebagai “intitusi keuangan dengan kepemilikan tersebar” dan “perusahaan lain dengan kepemilikan tersebar.” Klasifikasi ini dibuat dengan alasan bahwa adanya kenyataan perusahaan publik tersebut dikendalikan oleh institusi keuangan atau perusahaan lain yang juga perusahaan publik. Pada tingkat pisah batas 10%, La Porta *et al.* (1999) menemukan bahwa 8% dan 5% perusahaan publik dunia masing-masing dikendalikan oleh institusi keuangan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan lain dengan kepemilikan tersebar. Pada tingkat pisah batas yang sama, Claessens *et al.* (2000a) melaporkan bahwa sebanyak 13% dan 17% perusahaan publik Asia masing-masing dikendalikan oleh institusi keuangan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan lain dengan kepemilikan tersebar, sedang pada pisah batas hak kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa sebanyak 2% dan 9% perusahaan publik Eropa masing-masing dikendalikan oleh institusi keuangan dengan kepemilikan tersebar dan perusahaan lain dengan kepemilikan tersebar.

Apabila pemegang saham pengendali bukan keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan tersebar, atau perusahaan publik lain dengan kepemilikan tersebar, La Porta *et al.* (1999) dan

Claessens *et al.* (2000a) menamainya pemegang saham pengendali lain. Pemegang saham yang termasuk kategori ini adalah investor asing, koperasi, dan karyawan. La Porta *et al.* (1999) melaporkan bahwa, pada pisah batas hak kontrol 10% terdapat 9% perusahaan publik dunia dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lain, sedang pada pisah batas hak kontrol 20%, Faccio dan Lang (2002) melaporkan bahwa terdapat 3% perusahaan publik Eropa yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali lain seperti investor asing, koperasi, dan karyawan.

Konsep untuk menentukan keberadaan pemegang saham pengendali ada dua, yaitu konsep kepemilikan imediat dan konsep kepemilikan ultimat. Berdasarkan konsep kepemilikan imediat, klasifikasi kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi semata-mata ditentukan berdasarkan persentase kepemilikan saham secara langsung oleh pemegang saham. Dalam hal ini, kemungkinan adanya kepemilikan terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain tidak dipertimbangkan. Karena informasi tentang kepemilikan langsung tersedia dalam laporan keuangan, pemilik imediat sebuah perusahaan publik mudah untuk diidentifikasi. Konsep kepemilikan imediat memiliki beberapa kelemahan mendasar. Kelemahan konsep kepemilikan imediat adalah konsep ini tidak dapat digunakan untuk menelusuri rantai kepemilikan, mengidentifikasi pemilik ultimat, dan mengkaji pemisahan kepemilikan dan kontrol. Sebagai ilustrasi, PT B dimiliki oleh PT C, Badu, dan masyarakat luas masing-masing 35%, 21%, 44%. Setelah diteliti lebih lanjut, pemilik PT C adalah PT D, Rahmat Abdullah, dan Rudy Feriyanto masing-masing 55%, 25%, dan 20%. Lebih lanjut diketahui bahwa pemilik PT D adalah Amir Abdullah dan Syamsudin masing-masing 60% dan 40%. Penelusuran lebih lanjut juga menunjukkan bahwa Amir Abdullah dan Rahmat Abdullah adalah keluarga. Apabila konsep kepemilikan imediat yang digunakan, maka pemilik terbesar PT B adalah PT C. Informasi bahwa siapa pemilik PT C dan apakah pemilik tersebut bisa mengendalikan PT B melalui PT C dan PT D tidak dapat diidentifikasi melalui kepemilikan langsung saja.

Setelah menyadari kelemahan konsep kepemilikan imediat, La Porta *et al.* (1999) mengenalkan konsep kepemilikan ultimat untuk menganalisis pola kepemilikan perusahaan publik. Penggunaan konsep kepemilikan ultimat menuntut penelusuran rantai

kepemilikan sejak lapisan pertama sampai dengan lapisan terakhir. Rantai kepemilikan yang menggambarkan kepemilikan tidak langsung yang lazim ditemukan adalah kepemilikan piramida dan kepemilikan silang. Kepemilikan piramida adalah kepemilikan terhadap suatu perusahaan melalui perusahaan lain (Claessens *et al.*, 2000a; Claessens *et al.*, 2000b). Kepemilikan piramida mulai dari pemilik imediat sampai dengan pemilik ultimat pada ujung rantai kepemilikan bisa berlapis-lapis. Sebagai ilustrasi, PT E dimiliki oleh PT F1, PT F2, Reny Susilawati, dan masyarakat luas masing-masing 35%, 25%, 10%, dan 30%. PT F1 dimiliki oleh PT G1, Reny Susilawati dan Heru Triyanto masing-masing 60%, 30%, dan 10%, sedang pemilik PT F2 adalah PT G2 dan Heru Triyanto masing-masing 75% dan 25%. Setelah ditelusuri lebih lanjut, pemilik PT G1 dan G2 adalah Reny Susilawati dan Iwan Arifin masing-masing 50%. Ilustrasi tersebut menggambarkan kepemilikan piramida Reny Susilawati melalui PT G1 dan G2, selanjutnya melalui F1 dan F2, dan pada akhirnya PT E yang berada di ujung rantai kepemilikan piramida. La Porta *et al.* (1999) melaporkan kepemilikan piramida merupakan kepemilikan yang banyak ditemukan di negara berkembang. Pada pisah batas hak kontrol 20%, sebanyak 26% perusahaan publik dunia (La Porta *et al.*, 1999), 39% perusahaan publik Asia (Claessens *et al.*, 2000a), dan 19% perusahaan publik Eropa memiliki struktur kepemilikan piramida. Khusus Indonesia, Claessens *et al.*, (2000a) menemukan sebanyak 67% struktur kepemilikan perusahaan publik adalah piramida.

Kepemilikan silang adalah kepemilikan terhadap dua atau lebih perusahaan yang saling memiliki satu dengan lainnya. Sebagai ilustrasi, PT G dimiliki oleh PT H, Suprayitno, dan masyarakat luas masing-masing 48%, 12%, dan 40%. PT H dimiliki oleh PT J dan Siswanto masing-masing 70% dan 30%. PT J dimiliki oleh PT K dan Suprayitno masing-masing 52% dan 48%. Selanjutnya PT K dimiliki oleh PT H, Suprayitno, Siswanto masing-masing 40%, 35%, dan 25%. Ilustrasi tersebut menunjukkan bahwa pemilik ultimat Suprayitno memiliki kepemilikan silang terhadap PT H dan PT K karena keduanya sebenarnya saling memiliki walaupun tidak langsung. Pada tingkat pisah batas hak kontrol 20%, La Porta *et al.* (1999) menyatakan bahwa sebanyak 3% kepemilikan perusahaan publik dunia adalah kepemilikan silang. Pada pisah batas hak kontrol

20%, sebanyak 10% kepemilikan perusahaan publik Asia (Claessens *et al.*, 2000a) dan 1% perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) adalah melalui kepemilikan silang.

Kepemilikan tidak langsung baik melalui kepemilikan piramida maupun kepemilikan silang dapat menghasilkan pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. Hak aliran kas adalah klaim keuangan pemegang saham terhadap perusahaan (La Porta *et al.*, 1999). Hak aliran kas terdiri atas hak aliran kas langsung (*direct cash flow right*) dan hak aliran kas tidak langsung (*indirect cash flow right*). Hak aliran kas langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali pada perusahaan publik atas nama dirinya sendiri. Hak aliran kas tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil perkalian persentase saham dalam setiap rantai kepemilikan (La Porta *et al.*, 1999).

Sebagai ilustrasi, PT K dimiliki oleh PT L, Berly, dan PT M masing-masing 15%, 10%, dan 20%. Selanjutnya PT L dan PT M dimiliki oleh Berly masing-masing 35% dan 40%. Hak aliran kas langsung Berly di PT K adalah 10%, yaitu besarnya persentase kepemilikan atas nama dirinya di PT K. Namun Berly memiliki hak aliran kas tidak langsung di PT K baik melalui PT L maupun melalui PT M. Melalui PT L, hak aliran kas tidak langsung Berly di PT K adalah 5,25% ($35\% \times 15\%$). Melalui PT M, hak aliran kas tidak langsung Berly di PT K adalah 8% ($40\% \times 20\%$). Jumlah hak aliran kas tidak langsung Berly di PT K adalah 13,25%. Jumlah hak aliran kas Berly di PT K adalah 23,25% yang terdiri atas 10% hak aliran kas langsung dan 13,25% hak aliran kas tidak langsung. Pada pisah batas hak kontrol 20%, Claessens *et al.* (2000a) menemukan bahwa rerata hak aliran kas pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia adalah 16%. Untuk perusahaan publik Eropa, Faccio dan Lang (2002) menemukan bahwa pada pisah batas hak kontrol 20%, hak aliran kas pemegang saham pengendali perusahaan publik Eropa adalah 35%.

Hak kontrol adalah hak suara untuk ikut serta dalam menentukan kebijakan penting perusahaan (La Porta *et al.*, 1999). Hak kontrol terdiri atas hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Dengan pengertian tersebut, maka hak kontrol langsung sama dengan hak aliran kas

langsung. Oleh karena itulah dalam konsep kepemilikan imediat tidak ada isu pemisahan hak aliran kas dengan hak kontrol. Hak kontrol tidak langsung adalah penjumlahan atas hasil kontrol minimum dalam setiap rantai kepemilikan (La Porta *et al.*, 1999). Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa hak kontrol adalah penjumlahan hubungan paling lemah dalam setiap rantai kepemilikan.

La Porta *et al.* (1999) memperkenalkan hak kontrol pemegang saham pengendali yang ditentukan sebesar jumlah kepemilikan minimum dalam rantai kepemilikan. Angka kepemilikan minimum (bukan maksimum) ditentukan sebagai ukuran kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi sebuah perusahaan yang ada pada ujung rantai kepemilikan (perlu diingat bahwa ini bukan kepemilikan langsung). Seorang pemegang saham pengendali tidak dapat mengendalikan perusahaan yang berada di ujung rantai kepemilikan apabila yang digunakan adalah kepemilikan maksimum karena kepemilikan tersebut bukanlah kepemilikan langsung. Sebagai contoh, Amir memiliki saham PT X sebesar 60% dan selanjutnya PT X memiliki saham PT Y sebesar 20%. Apabila Amir diasumsikan mampu mengendalikan PT X (karena kepemilikan yang besar), maka kemampuan Amir mengendalikan PT Y adalah sebesar 20%, bukan sebesar 60%. Amir memang mampu mengendalikan PT X sebesar 60%, tetapi tidak mampu mengendalikan PT Y sebesar 60% tersebut.

Dengan menggunakan contoh kepemilikan PT K, hak kontrol langsung Berly di PT K adalah 10%. Berly memiliki hak kontrol tidak langsung di PT K baik melalui PT L maupun melalui PT M. Melalui PT L, hak kontrol tidak langsung Berly di PT K adalah 15%, yaitu kepemilikan minimum dalam jalur ini antara 35% dan 15%. Melalui PT M, hak kontrol tidak langsung Berly di PT K adalah 20% yang menggambarkan kepemilikan minimum dalam jalur ini antara 40% dan 20%. Jumlah hak kontrol tidak langsung Berly di PT K adalah 35%. Jumlah hak kontrol Berly di PT K adalah 45% yang terdiri atas 10% hak kontrol langsung dan 35% hak kontrol tidak langsung. Claessens *et al.* (2000a) menemukan bahwa pada pisah batas hak kontrol 20%, rerata hak kontrol pemegang saham pengendali perusahaan publik Asia adalah 20%, sedang perusahaan publik di Eropa dikendalikan oleh pemegang saham pengendali dengan rerata hak kontrol sebesar

39% pada pisah batas hak kontrol 20% (Faccio dan Lang, 2002).

Ilustrasi tersebut menghasilkan hak aliran kas dan hak kontrol Berly di PT K masing-masing 23,25% dan 45%. Selisih kedua hak tersebut, sebesar 21,75%, menggambarkan besarnya pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol yang dinamai *leverage* hak aliran kas. Berly dapat mengendalikan PT K sebesar 45% tetapi klaim keuangannya di perusahaan tersebut hanya 23,25%. Semakin besar deviasi hak aliran kas dan hak kontrol menunjukkan semakin tinggi peningkatan kontrol pemegang saham pengendali melebihi hak aliran kasnya. Peningkatan hak kontrol atas hak aliran kas ini dilakukan oleh pemegang saham pengendali melalui berbagai mekanisme seperti kepemilikan piramida dan kepemilikan silang. Semakin besar *leverage* hak aliran kas menunjukkan semakin besar insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan. Pada pisah batas 20%, Claessens *et al.* (2000a) menemukan bahwa rerata *leverage* hak aliran kas pemegang saham pengendali di perusahaan publik Asia adalah 4%. Pada pisah batas hak kontrol yang sama, Faccio dan Lang (2002) juga menemukan bahwa rerata *leverage* hak aliran kas pemegang saham pengendali terbesar perusahaan publik Eropa adalah 4%.

Dividen merupakan salah satu unsur yang dapat digunakan untuk menjelaskan masalah keagenan. Penggunaan dividen sebagai sarana untuk menjelaskan masalah keagenan pertama kali diperkenalkan oleh Easterbrook (1984). Hipotesis yang kemukakan oleh Easterbrook (1984) adalah bahwa pemegang saham perusahaan yang menaikkan dividen dan utang untuk mendanai investasi secara simultan lebih sejahtera daripada pemegang saham perusahaan yang hanya menaikkan dividen saja. Membayar dividen menyebabkan pemegang saham lebih sejahtera dan hal ini merupakan implikasi dari konflik keagenan yang berkurang. Membayar dividen sekaligus pendanaan investasi melalui utang menyebabkan pemegang saham lebih sejahtera tidak hanya karena dividen dibayar tetapi juga karena manajemen didisiplinkan oleh kreditor melalui pendanaan utang. Konflik keagenan dalam situasi seperti ini dapat dikurangi.

Penelitian tentang dividen di lingkungan konsentrasi kepemilikan yang ditentukan berdasarkan konsep kepemilikan imediat lazim ditemukan. Sebagai

contoh, Noronha *et al.* (1996) menemukan bahwa pembayaran dividen relatif tinggi untuk perusahaan yang struktur kepemilikannya tersebar. Namun penelitian yang mengkaji kebijakan dividen dalam konsentrasi kepemilikan yang ditentukan berdasarkan konsep ultimat masih termasuk baru. Konsep ini baru pertama kali diperkenalkan oleh La Porta *et al.* (1999). Berbagai penelitian yang mengkaji konsep kepemilikan ultimat dan dividen yang dapat dijadikan referensi meliputi La Porta *et al.* (2000), Faccio *et al.* (2001), Gugler dan Yurtoglu (2003), Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004), Zhang (2005), serta Lefort dan Walker (2005).

Secara umum argumen yang berkembang adalah hak kontrol dan hak aliran kas memiliki implikasi yang berbeda terhadap dividen. Hak aliran kas dan hak kontrol yang terpisah tidak berjalan secara bersamaan dan karenanya masing-masing memiliki implikasi yang berbeda terhadap kebijakan dividen (Claessens *et al.*, 2000b). Hak aliran kas pemegang saham pengendali merupakan sumber insentif keuangan yang menyebabkan ekspropriasi tidak terjadi dalam perusahaan. Menurut La Porta *et al.*, (2002) hak aliran kas inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan Meckling (1976) yang menyatakan konsentrasi kepemilikan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Sebaliknya hak kontrol merupakan sumber power untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam rangka mendapatkan manfaat privat yang menyebabkan ekspropriasi terjadi dalam perusahaan. La Porta *et al.*, (2002) menyatakan bahwa hak kontrol inilah yang ditekankan oleh Shleifer dan Vishny (1997) dengan pernyataannya bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak negatif bagi perusahaan.

Gambaran konflik keagenan dividen diuraikan oleh La Porta *et al.* (2000) dengan mengilustrasikan konflik antara *insider* dan *outsider*. *Insider* merupakan pihak yang berperan langsung dalam manajemen; *outsider* merupakan pihak yang tidak berperan langsung dalam manajemen. Dalam kepemilikan yang terkonsentrasi secara ultimat, pihak yang dikategorikan *insider* adalah pemegang saham pengendali. Identifikasi pemegang saham pengendali sebagai *insider* semakin nyata karena umumnya di negara berkembang pemegang saham pengendali juga terlibat dalam manajemen. Sementara itu pihak yang diklasifikasi sebagai *outsider* adalah pemegang saham nonpengendali.

La Porta *et al.* (2000) menyatakan bahwa apabila laba tidak dibayar kepada pemegang saham maka laba tersebut diasumsikan digunakan untuk kepentingan pribadi *insider*. Implikasi dari peran sebagai *insider* yang berperan langsung dalam manajemen adalah bahwa pemegang saham lebih menginginkan dividen untuk tidak dibagi agar sumber daya lebih banyak tersedia di perusahaan yang dapat digunakan oleh *insider* sesuai dengan diskresinya. Dalam situasi seperti ini maka muncul kemungkinan terjadinya ekspropriasi atas sumber daya perusahaan. Apabila perusahaan tidak membayar dividen maka hal ini merupakan indikasi adanya ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Dalam pengujian empiris yang dilakukan, La Porta *et al.* (2000) menyatakan bahwa dividen dapat dipandang sebagai output efektivitas perlindungan hukum. Dividen sebagai output dan perlindungan hukum berarti bahwa pembayaran dividen akan lebih tinggi apabila perlindungan hukum terhadap pemegang saham nonpengendali lebih baik. Tingkat penegakan hukum dijadikan sebagai proksi atas biaya keagenan yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa peran dividen besar dalam situasi penegakan hukum rendah. Membayar dividen berarti bahwa pemegang saham pengendali memberikan laba kepada pemegang saham nonpengendali sehingga membatasi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi.

Argumentasi lain adalah bahwa selain sebagai output efektivitas perlindungan hukum, La Porta *et al.* (2000) menyatakan bahwa dividen dapat dipandang sebagai sarana untuk mendapatkan reputasi. Perusahaan membayar dividen untuk mendapatkan reputasi yang baik di mata pemasok dana di pasar modal. Salah satu cara untuk mempertahankan reputasi yang baik adalah dengan tetap membayar dividen. Pembayaran dividen ini merupakan indikasi bahwa tidak terjadi ekspropriasi di perusahaan. Namun bukti empiris yang diperoleh La Porta *et al.* (2000) adalah bahwa pembayaran dividen merupakan fungsi dari efektivitas perlindungan hukum terhadap investor daripada sarana untuk mendapatkan reputasi. Bukti empiris menunjukkan bahwa tingkat pembayaran dividen lebih tinggi apabila perlindungan hukum lebih baik.

Implikasi dividen atas konsentrasi kepemilikan di perusahaan Asia dan Eropa dicoba dikaji oleh Faccio *et al.* (2001). Ia menemukan bahwa sedikit perusahaan Asia dan Eropa yang benar-benar dimiliki secara luas

oleh masyarakat. Dengan kata lain, kepemilikan perusahaan Asia dan Eropa adalah terkonsentrasi di tangan pemegang saham pengendali. Sebagian besar kontrol pada perusahaan di Asia dan Eropa berada di tangan keluarga yang seringkali juga bagian dari manajemen perusahaan itu sendiri. Pada kepemilikan dengan karakteristik seperti itu, terkonsentrasi di tangan keluarga dan terlibat dalam manajemen, maka konflik keagenan yang menonjol adalah konflik antara pemegang saham pengendali dan pemegang saham nonpengendali.

Indikasi besarnya ekspropriasi melalui dividen yang dilakukan oleh pemegang saham pengendali dikaji oleh Faccio *et al.* (2001) melalui investigasi sejauh mana rangkaian kepemilikan yang dibentuk oleh perusahaan. Faccio *et al.* (2001) berargumen bahwa ekspropriasi lebih besar kemungkinan terjadi pada perusahaan yang berafiliasi dengan grup karena kepemilikan yang tidak langsung yang bertingkat-tingkat serta kontrol terhadap kelompok usaha yang sebesarnya dipegang oleh pemegang saham pengendali yang sama. Afiliasi dalam kelompok perusahaan dilakukan melalui tiga hal yaitu kepemilikan piramida, kepemilikan silang, dan kepemilikan resiprokal. Faccio *et al.* (2001) mengukur kemungkinan terjadinya ekspropriasi dari besarnya *leverage* hak aliran kas yang muncul karena kepemilikan piramida, silang, dan resiprokal. Semakin besar *leverage* hak aliran kas maka semakin besar potensi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Hal ini terjadi karena *leverage* hak aliran kas yang besar merupakan indikasi bahwa kemampuan pemegang saham pengendali untuk mengendalikan perusahaan lebih besar dari kepemilikannya dalam bentuk hak aliran kas.

Argumen Faccio *et al.* (2001) tentang kaitan antara *leverage* hak aliran kas dan dividen berimplikasi bahwa perusahaan membayar dividen lebih kecil apabila pemegang saham pengendali memiliki *leverage* hak aliran kas. Dividen yang dibayar kecil atau bahkan tidak dibayar menyebabkan sumber daya tersedia banyak diperusahkan untuk diekspropriasi; sementara apabila sumber daya tersebut dibagi dalam bentuk dividen jumlah yang terbesar tidak didapatkan oleh pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali menggunakan kontrol yang dimilikinya untuk memperoleh manfaat privat melalui dividen yang tidak dibagi. Sebaliknya, pembayaran dividen lebih

besar apabila pemegang saham pengendali tidak memiliki *leverage* hak aliran kas. Hal ini terjadi karena pemegang saham pengendali memperoleh proporsi yang lebih besar dibandingkan oleh pemegang saham lain karena hak aliran kasnya juga lebih besar; sementara ia tidak mampu mengontrol perusahaan untuk mendapatkan ekspropriasi karena kemampuannya mengendalikan perusahaan sama dengan kepemilikannya.

Bukti empiris mendukung argumen Faccio *et al.* (2001) bahwa *leverage* hak aliran kas yang besar menyebabkan perusahaan lebih kecil membayar dividen. Selain itu, Faccio *et al.* (2001) juga menemukan bahwa perusahaan publik Eropa membayar dividen lebih tinggi daripada perusahaan publik Asia. Pembayaran dividen yang lebih tinggi di Eropa dibandingkan dengan di Asia tersebut menunjukkan sejauh mana efektivitas perlindungan hukum terhadap investor. Efektivitas perlindungan hukum dipersepsi lebih tinggi di Eropa daripada di Asia yang karenanya pembayaran dividen lebih tinggi di Eropa daripada di Asia. Berdasarkan temuan ini, Faccio *et al.* (2001) menyimpulkan bahwa ekspropriasi lebih besar di Asia daripada di Eropa.

Gugler dan Yurtoglu (2003) mencoba meneliti pembayaran dividen dalam situasi kepemilikan terkonsentrasi dengan fokus pada penggunaan perusahaan publik Jerman sebagai sampel. Gugler dan Yurtoglu (2003) berargumen bahwa kepemilikan di negara Jepang, Amerika Serikat, dan Inggris relatif tersebar sehingga setiap pemegang saham secara individual memiliki insentif dan kemampuan terbatas untuk memonitor manajemen. Dalam situasi seperti itu, konflik keagenan yang menonjol adalah konflik antara manajemen dan pemegang saham luar. Namun untuk perusahaan Eropa pada umumnya, lebih khususnya lagi perusahaan Jerman, individu atau keluarga umumnya pemegang saham pengendali dalam kelompok bisnis dengan struktur piramida dan kepemilikan silang. Karena konsentrasi kepemilikan melalui kepemilikan tidak langsung terjadi dan pemegang saham pengendali juga mengendalikan manajemen, maka konflik keagenan klasik antara manajer dan pemegang saham luar relatif tidak terjadi. Konflik keagenan yang lazim terjadi justru konflik antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali.

Konflik keagenan dikaji oleh Gugler dan Yurtoglu (2003) melalui pengujian reaksi pasar terhadap pengumuman perubahan dividen. Gugler dan Yurtoglu (2003) berargumen bahwa pengumuman perubahan dividen mengandung informasi tentang konflik keagenan yang terjadi antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Kenaikan dividen menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali tidak berniat melakukan ekspropriasi; sebaliknya penurunan dividen menunjukkan pemegang saham pengendali berniat melakukan ekspropriasi. Gugler dan Yurtoglu (2003) memperoleh bukti empiris bahwa pasar bereaksi positif terhadap pengumuman kenaikan dividen dan bereaksi negatif terhadap pengumuman penurunan dividen. Reaksi negatif ini lebih banyak terjadi atas pengumuman penurunan dividen yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki konsentrasi hak kontrol serta tidak ada pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan. Namun tidak ada reaksi pasar terhadap pengumuman penurunan dividen yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hak kontrol di bawah 50% dan ada pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan. Pengujian lain, yaitu uji pengaruh, juga dilakukan oleh Gugler dan Yurtoglu (2003). Mereka mencoba menginvestigasi pengaruh hak aliran kas, hak kontrol, dan *leverage* hak aliran kas terhadap rasio pembayaran dividen. Bukti empiris menemukan bahwa konsentrasi hak kontrol dan *leverage* hak aliran kas berpengaruh negatif terhadap pembayaran dividen.

Konteks sebagai negara berkembang, konsentrasi kepemilikan melalui kepemilikan tidak langsung tinggi, dan perlindungan hukum yang lemah di Brazilia tepat untuk dijadikan sebagai dasar untuk mengkaji secara empiris kebijakan dividen. Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) melakukan riset yang bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pengaruh konsentrasi kepemilikan terhadap kebijakan dividen dan penilaian pasar terhadap perusahaan. Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) berargumen tidak ada konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali apabila tidak ada pemisahan antara hak aliran kas dan hak kontrol. Akan tetapi apabila pemegang saham pengendali mampu meningkatkan kontrol terhadap perusahaan melalui kemandirian kepemilikan, misalnya piramida, muncul konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan

pemegang saham nonpengendali.

Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) menyatakan bahwa apabila hak aliran kas dan hak kontrol terpisah, maka pemegang saham pengendali memiliki insentif dan kemampuan untuk menggunakan kepemilikannya untuk mendapatkan manfaat privat dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham nonpengendali. Namun apabila hak aliran kas sama dengan hak kontrol, pemegang saham pengendali memiliki insentif dan kemampuan untuk memonitor manajer agar memperhatikan kepentingan semua pemegang saham. Bukti empiris yang diperoleh oleh Carvalhal-da-Silva dan Leal (2004) bahwa hak aliran kas berhubungan positif dengan dividen. Temuan empiris juga menunjukkan bahwa hak kontrol dan *leverage* hak aliran kas berhubungan negatif dengan dividen. Mereka menyimpulkan bahwa terjadi ekspropriasi apabila hak aliran kas dan hak kontrol terpisah. Sebaliknya tidak terjadi ekspropriasi apabila hak aliran kas dan hak kontrol tidak terpisah.

Dengan menggunakan sampel dari perusahaan Asia dan Eropa, Zhang (2005) juga menemukan bukti empiris seperti pada temuan-temuan yang sudah diuraikan sebelumnya. Berbagai argumen di atas terbukti secara empiris bahwa terjadi ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham nonpengendali melalui dividen apabila perlindungan hukum lemah. Ada konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali apabila perlindungan hukum terhadap investor lemah. Ekspropriasi pemegang saham pengendali terhadap pemegang saham nonpengendali melalui dividen juga terjadi apabila ditemukan pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol dalam kepemilikan terkonsentrasi. Apalagi konsentrasi kepemilikan terjadi melalui rangkaian kepemilikan yang kompleks dan panjang. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali apabila terjadi pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol. Kelebihan hak kontrol atas hak aliran kas ini menunjukkan insentif yang kuat bagi pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Kelebihan hak kontrol di atas hak aliran kas menggambarkan adanya *leverage* hak aliran kas. *Leverage* hak aliran kas yang besar menunjukkan insentif yang besar pula untuk melakukan ekspropriasi.

Dominasi pemegang saham pengendali dapat berbentuk dominasi hak aliran kas atau dominasi hak kontrol. Hak aliran kas merupakan insentif yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali untuk memastikan bahwa perusahaan berjalan dengan baik. Keinginan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi dibatasi oleh adanya insentif keuangan yang dimilikinya. Sumber insentif keuangan tersebut adalah hak aliran kas pemegang saham pengendali. Ekspropriasi terlalu mahal untuk dilakukan, karena itu hak aliran kas yang tinggi seharusnya menyebabkan ekspropriasi yang lebih kecil. La Porta *et al.* (2002) menyatakan bahwa hak aliran kas inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa konsentrasi kepemilikan berdampak positif terhadap nilai perusahaan. Dividen dapat menjadi sarana yang ideal untuk membatasi kemungkinan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali karena dividen menunjukkan pembayaran terhadap pemegang saham secara pro-rata. Pembayaran dividen yang dilakukan secara pro-rata tersebut berlaku baik terhadap pemegang saham pengendali maupun pemegang saham nonpengendali.

Pembayaran dividen dapat menunjukkan komitmen bahwa tidak terjadi ekspropriasi dalam perusahaan. Namun sebaliknya, pengurangan dividen dapat menunjukkan bahwa terjadi ekspropriasi dalam perusahaan karena lebih banyak aliran kas yang tersedia di perusahaan untuk digunakan sesuai dengan keinginan pemegang saham pengendali. Pemegang saham pengendali berusaha untuk melakukan pembayaran dividen karena apabila dividen tidak dibayar, maka hal tersebut akan berdampak langsung lebih besar bagi pemegang saham pengendali itu sendiri. Hak aliran kas merupakan klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen. Karena itu semakin besar hak aliran kas maka akan semakin besar pula klaim pemegang saham pengendali terhadap dividen. Apabila dividen tidak dibayar maka pemegang saham pengendali akan merasakan dampak keuangan paling besar dibandingkan pemegang saham lainnya. Karena itu, hak aliran kas menunjukkan insentif pemegang saham pengendali untuk mendapatkan pembayaran melalui dividen. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H1: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali

yang memiliki hak aliran kas kecil daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran kas besar.

Hak kontrol memiliki implikasi yang berbeda dari hak aliran kas. Hak kontrol menunjukkan hak untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan dalam rangka memperoleh manfaat dari penggunaan kontrol tersebut. Pemegang saham pengendali tertarik untuk menggunakan hak kontrolnya untuk memperoleh manfaat pribadi dengan melakukan ekspropriasi. La Porta *et al.* (2002) menyatakan bahwa hak kontrol inilah yang sesungguhnya ditekankan oleh Jensen dan Meckling (1976) bahwa konsentrasi kepemilikan dapat berdampak negatif terhadap nilai perusahaan. Shleifer dan Vishny (1997), La Porta *et al.* (1999), dan Claessens *et al.* (2000a) menyatakan bahwa konsentrasi hak kontrol oleh pemegang saham pengendali berimplikasi pada ekspropriasi pemegang saham nonpengendali karena pemegang saham pengendali lebih tertarik mendapatkan keuntungan privat yang tidak diberikan kepada pemegang saham nonpengendali. Pada saat pemegang saham besar mengendalikan perusahaan, kebijakannya menyebabkan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali.

Kontrol mayoritas menyebabkan pemegang saham pengendali dapat menggunakan kekuasaan yang menguntungkan dirinya dalam berbagai keputusan penting, termasuk keputusan tentang pembayaran dividen. Apabila manfaat privat atas kontrol yang dimiliki besar, pemegang saham pengendali akan berusaha untuk mengalokasikan sumber daya perusahaan untuk menghasilkan manfaat privat tersebut. Misalnya pemegang saham pengendali memperkaya diri sendiri dengan tidak membayar dividen atau membayar dividen lebih rendah. Dalam hal ini pemegang saham pengendali menggunakan kebijakan dividen untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol. Insentif untuk mendapatkan manfaat privat atas kontrol meningkat karena pemegang saham pengendali hanya kehilangan pembayaran dividen proporsional dengan hak aliran kas, namun mendapatkan manfaat privat penuh atas tindakan ekspropriasi. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H2: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali

yang memiliki hak kontrol besar daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak kontrol kecil.

Seorang pemegang saham pengendali dapat mengendalikan sebuah perusahaan secara langsung atau melalui perusahaan lain. Apabila perusahaan mengendalikan perusahaan secara langsung, maka jumlah kemampuan pemegang saham pengendali tersebut untuk mengendalikan perusahaan digambarkan oleh jumlah saham yang dimilikinya (*one share one vote*). Apabila seorang pemegang saham pengendali memiliki saham sebesar 30%, maka kemampuannya untuk mengendalikan perusahaan adalah sebesar 30% tersebut. Dalam hal ini, hak kontrol sama dengan hak aliran kas. Namun kepemilikan piramida dan kepemilikan silang menyebabkan hak kontrol tidak sama dengan hak aliran kas. Selisih lebih antara hak kontrol dari hak aliran kas dinamai *leverage* hak aliran kas. *Leverage* hak aliran kas menunjukkan bahwa ada mekanisme yang diciptakan oleh pemegang saham pengendali untuk meningkatkan kemampuan mengendalikan perusahaan melebihi kepemilikan saham. Adanya *leverage* hak aliran kas menyebabkan satu saham satu suara (*one share one vote*) menjadi tidak sepenuhnya terjadi. Seorang pemegang saham dapat mengendalikan sebuah perusahaan lebih dari 30% terhadap sebuah perusahaan walaupun kepemilikannya pada perusahaan tersebut sebesar 30%. Misalnya seseorang memiliki PT A 60% dan selanjutnya PT A memiliki PT B sebesar 50%. Sebenarnya pemegang saham pengendali tersebut hanya memiliki saham di PT B 30% ($60\% \times 50\%$); namun mampu mengendalikan PT B sebesar 50% karena merupakan pengendali sepenuhnya pada PT A.

Pemegang saham pengendali menggunakan *leverage* hak aliran kas untuk kepentingan pribadi dengan melakukan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali. Dividen dibayar proporsional dengan hak aliran kas, sementara kontrol ditentukan oleh hak suara. Perbedaan hak kontrol di atas hak aliran kas menciptakan insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk mencari manfaat bentuk lain selain pembayaran dividen yang pro-rata. Manfaat privat lain tersebut akan lebih mudah diperoleh oleh pemegang saham pengendali apabila sumber daya tersedia di perusahaan. Sumber daya yang tersedia di perusahaan akan semakin besar apabila dividen tidak dibayar.

Karena itu, pemisahan hak aliran kas dan hak kontrol berdampak terhadap pembayaran dividen yang lebih rendah agar dana yang tersedia dalam perusahaan lebih banyak untuk digunakan sesuai kebijakan pemegang saham pengendali. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang tidak memiliki *leverage* hak aliran kas.

Leverage hak aliran kas dengan hak kontrol menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali meningkatkan kontrol di atas kepemilikan sahamnya. Semakin besar hak kontrol meningkat melebihi hak aliran kas menunjukkan semakin besar insentif dan kemampuan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi. Besarnya *leverage* hak aliran kas menunjukkan besarnya masalah keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali. Dengan kontrol yang melebihi hak aliran kas, apalagi dengan perlindungan hukum yang lemah, pemegang saham pengendali seringkali melakukan aktivitas untuk meningkatkan keuntungan privat dengan mengorbankan pemegang saham nonpengendali.

Konflik keagenan seperti ini semakin besar apabila pemegang saham pengendali memiliki hak kontrol melebihi hak aliran kas. Konflik keagenan akan semakin besar apabila pemegang saham pengendali memiliki *leverage* hak aliran kas yang besar. Pemegang saham pengendali tertarik untuk memanfaatkan kontrol untuk kepentingan pribadi. Manfaat atas tindakan ekspropriasi sepenuhnya diperoleh oleh pemegang saham pengendali, sedangkan dampak keuangan yang disebabkan pembayaran dividen atau peningkatan nilai perusahaan proporsional dengan hak aliran kas. Karena itu, pemegang saham pengendali lebih tertarik menggunakan hak kontrol untuk mendapatkan manfaat privat dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham nonpengendali. *Leverage* hak aliran kas yang sangat besar menyebabkan pemegang saham pengendali tertarik untuk tidak membayar dividen karena kemampuannya untuk mendapatkan manfaat privat dari sumber daya perusahaan juga besar. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis

alternatif sebagai berikut:

H4: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas besar daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas kecil.

Pada saat terjadi *leverage* hak aliran kas, pemegang saham pengendali mampu mengendalikan perusahaan melebihi hak aliran kasnya. Pada saat ini, insentif untuk melakukan ekspropriasi sudah besar. Namun konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali akan semakin tinggi apabila pemegang saham pengendali juga terlibat dalam manajemen. Keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen cukup tinggi, yaitu rerata terdapat pada 69% perusahaan publik Asia, Eropa, dan Amerika (La Porta *et al.*, 1999). Sebanyak 57% perusahaan publik Asia dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang juga terlibat dalam manajemen (Claessens *et al.*, 2000a). Bahkan keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen lebih tinggi di Eropa, yaitu terjadi pada 68% perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002). Selain memiliki *leverage* hak aliran kas, La Porta *et al.* (1999) menyatakan kemampuan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi meningkat apabila ia juga terlibat dalam manajemen.

Pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan juga terlibat dalam manajemen tidak lagi sekedar mampu mempengaruhi manajemen, melainkan sudah merupakan bagian dari manajemen itu sendiri yang leluasa untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya. Karena pemegang saham pengendali sudah bagian dari manajemen itu sendiri, pada saat pemegang saham pengendali tersebut memiliki *leverage* hak aliran kas, maka kemampuannya untuk mengeskpropriasi pemegang saham nonpengendali semakin efektif. Pada situasi seperti ini, pemegang saham pengendali tidak tertarik untuk memutuskan membayar dividen. Apabila dividen dibayar, pemegang saham pengendali hanya memperoleh dividen sebesar hak aliran kasnya. Pemegang saham pengendali tidak memperoleh dividen terbesar walaupun memiliki hak kontrol yang besar. Oleh karena itu, pemegang saham pengendali lebih tertarik untuk tidak membayar dividen atau memutuskan

membayar dividen lebih sedikit. Dengan tidak membayar dividen atau membayar dividen lebih sedikit, perusahaan masih memiliki sumber daya di perusahaan untuk diekspropriasi oleh pemegang saham pengendali yang juga merupakan bagian dari manajemen tersebut. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H5: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan terlibat dalam manajemen daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas tetapi tidak terlibat dalam manajemen.

Pemegang saham besar di sebuah perusahaan dapat jadi tidak hanya satu. Pada pisah batas hak kontrol tertentu bisa jadi ditemukan lebih dari satu pemegang saham besar. Apabila ada pemegang saham besar lain, maka kemungkinan pemegang saham pengendali untuk melakukan ekspropriasi semakin terbatas. Dengan demikian konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali juga terkait dengan apakah pemegang saham pengendali dalam perusahaan merupakan pemegang saham pengendali tunggal. Apabila hanya terdapat pemegang saham pengendali tunggal, maka kemampuannya untuk melakukan ekspropriasi tidak dapat dikendalikan secara efektif oleh pemegang saham lain. Namun kemampuan pemegang saham pengendali untuk mempengaruhi kebijakan perusahaan yang menguntungkan dirinya dapat dibatasi apabila dalam perusahaan terdapat pemegang saham pengendali kedua. Sebanyak 68% perusahaan publik Asia (Claessens *et al.*, 2000a) dan 54% perusahaan publik Eropa (Faccio dan Lang, 2002) dikendalikan oleh pemegang saham pengendali tunggal.

Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali berkurang apabila terdapat pemegang saham pengendali kedua dalam perusahaan. Gugler dan Yurtoglu (2003) serta Edwards dan Wichenrieder (2003) menyatakan bahwa pemegang saham besar lain memiliki insentif untuk membatasi tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali. Selain karena kepemilikan yang besar, keterwakilan pemegang saham kedua dalam komisaris dan direksi juga menyebabkan pengendalian terhadap kemungkinan ekspropriasi dapat dilakukan.

Pada saat *leverage* hak aliran kas ada di tangan pemegang saham pengendali, maka kemampuannya untuk mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali melalui dividen akan dibatasi oleh pemegang saham besar lainnya. Dengan demikian, usaha pemegang saham pengendali untuk memanfaatkan sumber daya yang tidak dibagi sebagai dividen akan berkurang. Berdasarkan uraian tersebut dirumuskan hipotesis alternatif sebagai berikut:

H6: Dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan tidak ada pemegang saham pengendali kedua di perusahaan daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan ada pemegang saham pengendali kedua di perusahaan.

Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode enam tahun mulai dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2005. Data yang diperlukan dari setiap perusahaan sampel adalah data dividen dan kepemilikan saham. Data dividen kas, laba bersih, dan persentase kepemilikan imediat diperoleh dari laporan keuangan tahunan. Sedangkan data kepemilikan ultimat diperoleh dari Departemen Keuangan RI, *website* perusahaan, dan Osiris.

Klasifikasi kepemilikan tersebar atau terkonsentrasi didasarkan pada pisah batas hak kontrol 20%. Penggunaan pisah batas hak kontrol 20% cukup beralasan karena penelitian-penelitian sebelumnya mampu menangkap efektivitas kontrol bahkan dengan hak kontrol 10% (La Porta *et al.*, 2002) dan 20% (Claessens *et al.*, 2000b). Pemegang saham pengendali diidentifikasi untuk perusahaan yang memiliki konsentrasi kepemilikan dengan hak kontrol 20% atau lebih. Pemegang saham pengendali tersebut bisa meliputi keluarga, pemerintah, institusi keuangan dengan kepemilikan luas, perusahaan dengan kepemilikan luas, dan pemegang saham pengendali lainnya. Pemegang saham pengendali lain bisa meliputi investor asing, koperasi, dan karyawan. Pemegang saham pengendali keluarga diidentifikasi berdasarkan kesamaan nama belakang, hubungan perkawinan, dan kesamaan alamat rumah.

Variabel utama penelitian ini yang akan diujibedakan adalah dividen. Variabel dividen diproksi sebagai rasio pembayaran dividen dibagi laba bersih (dividen/laba bersih). Uji beda dividen didasarkan pada berbagai klasifikasi seperti besar kecilnya hak aliran kas pemegang saham pengendali, besar kecilnya hak kontrol pemegang saham pengendali, keberadaan *leverage* hak aliran kas, keterlibatan pemegang saham pengendali pada saat pemegang saham pengendali memiliki *leverage* hak aliran kas dalam manajemen, serta

Tabel 1
Ringkasan Hipotesis

Hipotesis	Dividen Lebih Kecil Pada Saat	Dividen Lebih Besar Pada Saat
H1 Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali	Kecil	Besar
H2 Hak Kontrol Pemegang Saham Pengendali	Besar	Kecil
H3 <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali	Ada	Tidak Ada
H4 <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali	Lebih Besar	Lebih Kecil
H5 Ada <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali	Pemegang Saham Pengendali Terlibat dalam Manajemen	Pemegang Saham Pengendali tidak Terlibat dalam Manajemen
H6 Ada <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali	Tidak ada Pemegang Saham Pengendali Kedua	Ada Pemegang Saham Pengendali Kedua

keberadaan pemegang saham pengendali kedua pada saat pemegang saham pengendali memiliki *leverage* hak aliran kas.

Besar kecilnya hak aliran kas ditentukan dengan membagi sampel menjadi dua bagian berdasarkan tinggi rendahnya hak aliran kas. Sebanyak 50% dari sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki hak aliran kas tertinggi akan dikategorikan sebagai hak aliran kas pemegang saham pengendali yang besar. Sebaliknya sebanyak 50% dari sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki hak aliran kas terendah akan dikategorikan sebagai hak aliran kas pemegang saham pengendali yang kecil. Hak aliran kas merupakan penjumlahan hak aliran kas langsung dan hak aliran kas tidak langsung. Hak aliran kas langsung diukur sebesar persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali secara langsung atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Hak aliran kas tidak langsung diukur dengan menjumlahkan hasil perkalian persentase kepemilikan saham dalam setiap rantai kepemilikan.

Besar kecilnya hak kontrol ditentukan dengan membagi sampel menjadi dua bagian berdasarkan tinggi rendahnya hak kontrol. Sebanyak 50% dari sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki hak kontrol tertinggi akan dikategorikan sebagai hak kontrol pemegang saham pengendali yang besar. Sebaliknya sebanyak 50% dari sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki hak kontrol terendah akan dikategorikan sebagai hak kontrol pemegang saham pengendali yang kecil. Hak kontrol merupakan penjumlahan hak kontrol langsung dan hak kontrol tidak langsung. Hak kontrol langsung diukur sebesar persentase saham yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali secara langsung atas nama dirinya pada sebuah perusahaan. Hak kontrol tidak langsung diukur dengan menjumlahkan persentase kepemilikan saham yang minimum dalam setiap rantai kepemilikan.

Keberadaan *leverage* hak aliran kas ditentukan berdasarkan perbandingan antara hak kontrol dengan hak aliran kas. Apabila hak kontrol lebih besar dari hak aliran kas, maka dikategorikan bahwa terdapat *leverage* hak aliran kas. Sebaliknya, apabila hak kontrol tidak melebihi hak aliran kas, maka dikategorikan bahwa tidak terdapat *leverage* hak aliran kas.

Keterlibatan pemegang saham pengendali pada saat pemegang saham pengendali tersebut memiliki *leverage* hak aliran kas dalam manajemen ditentukan

dengan menelusuri apakah pemegang saham pengendali terlibat dalam manajemen. Sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki *leverage* hak aliran kas dibagi berdasarkan keterlibatan pemegang saham pengendali dalam manajemen. Sedangkan keberadaan pemegang saham pengendali kedua pada saat pemegang saham pengendali tersebut memiliki *leverage* hak aliran kas ditentukan dengan menelusuri apakah pemegang saham pengendali kedua terdapat di perusahaan. Sampel yang pemegang saham pengendalinya memiliki *leverage* hak aliran kas dibagi berdasarkan keberadaan pemegang saham pengendali kedua.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan t-test untuk menguji apakah terdapat perbedaan rerata dividen yang dibayar berdasarkan kategori yang ditentukan. Sampel penelitian adalah sampel yang independen. Karena itu uji beda rerata yang digunakan adalah t-test untuk sampel independen. Uji beda rerata adalah metode yang digunakan untuk menguji kesamaan rerata dari dua populasi yang bersifat independen. Independen maksudnya adalah bahwa populasi yang satu tidak dipengaruhi atau tidak berhubungan dengan populasi yang lain. Formula dalam uji beda rerata t-test ditentukan sebagai berikut:

$$t = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_{X_1}^2}{n_1} + \frac{S_{X_2}^2}{n_2}}}$$

Simpulan statistika ditentukan berdasarkan nilai *p-value*. Apabila *p-value* lebih besar dari alpha 5%, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan rerata dividen diterima. Sebaliknya apabila *p-value* lebih kecil dari alpha 5%, maka hipotesis nol yang menyatakan tidak terdapat perbedaan rerata dividen ditolak.

HASIL PENELITIAN

Tabel 2 menyajikan deskripsi variabel. Peraga tersebut menunjukkan bahwa rerata dividen yang dibayar oleh perusahaan dalam 6 tahun adalah 12,46% dari laba yang diperoleh. Angka rerata yang kecil ini menunjukkan bahwa perusahaan Indonesia enggan membayar dividen. Hak aliran kas minimum sebesar 0,39% merupakan indikasi bahwa pemegang saham

pengendali mampu mengendalikan sebuah perusahaan dengan hak kontrol minimum 20,55% melalui rangkaian kepemilikan tidak langsung. Pemegang saham pengendali mampu meningkatkan *leverage* hak aliran kas sebesar 11,29% di atas hak aliran kas yang mereka miliki. Selain itu, sebesar 33% pemegang saham pengendali terlibat dalam manajemen dan sebanyak 67% pemegang saham pengendali adalah pemegang saham pengendali tunggal tanpa pengawasan dari pemegang saham besar lainnya.

Pada Tabel 3 tampak hasil pengujian hipotesis. Hipotesis pertama menyatakan bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh

pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran kas kecil daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran kas besar. Rerata dividen pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran kas kecil adalah 8,99%. Sementara itu, rerata dividen pada perusahaan dengan pemegang saham pengendali yang memiliki hak aliran kas besar adalah 15,92%. Perbedaan rerata dividen signifikan secara statistik dan sesuai dengan prediksi dalam hipotesis.

Pernyataan dalam hipotesis kedua adalah bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak

Tabel 2
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maksimum	Rerata	Std Deviasi
DIV (Dividen)	1230	.00	397.18	12.4601	37.48347
CFR (Hak Aliran Kas)	1230	.39	99.36	49.6257	22.66292
CR (Hak Kontrol)	1230	20.55	99.87	60.8476	19.26725
CFRL (<i>Leverage</i> Hak Aliran Kas)	1230	.00	79.71	11.2858	15.91082
MAN (Keterlibatan CS di Manajemen)	1230	.00	1.00	.3424	.47469
CS2 (Keberadaan CS Kedua)	1230	.00	1.00	.1325	.33915

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

Tabel 3
Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Rerata Dividen	Signifikansi	Keterangan
H1 Hak Aliran Kas Pemegang Kecil Saham Pengendali Besar	8,99% 15,92%	0,000	Sesuai Prediksi
H2 Hak Kontrol Pemegang Besar Saham Pengendali Kecil	13,07% 11,84%	0,265	Tidak Sesuai Prediksi
H3 <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali Ada Tidak Ada	9,62% 16,57%	0,000	Sesuai Prediksi
H4 <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali Besar Kecil	8,53% 10,72%	0,213	Tidak Sesuai Prediksi
H5 Ada <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali CS Manajemen CS Nonmanajemen	0,01% 21,09%	0,000	Sesuai Prediksi
H6 Ada <i>Leverage</i> Hak Aliran Kas Pemegang Saham Pengendali Tidak Ada CS Kedua Ada CS Kedua	10,64% 5,91%	0,000	Tidak Sesuai Prediksi

Sumber: Hasil penelitian. Data diolah.

kontrol besar daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki hak kontrol kecil. Bukti empiris menunjukkan bahwa rerata dividen pada saat hak kontrol pemegang saham pengendali besar adalah 13,07% dan pada saat hak kontrol pemegang saham pengendali kecil adalah 11,84%. Selain perbedaan rerata dividen ini terbalik dari segi jumlah matematik, perbedaan ini juga tidak signifikan secara statistik. Bukti empiris ini menunjukkan bahwa hipotesis kedua tidak didukung.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang tidak memiliki *leverage* hak aliran kas. Rerata dividen pada saat *leverage* hak aliran kas ada adalah 9,62%; rerata dividen pada saat *leverage* hak aliran kas tidak ada adalah 16,57%. Perbedaan rerata dividen ini signifikan secara statistik dan sesuai dengan prediksi dalam hipotesis.

Hipotesis keempat tidak didukung secara empiris. Dalam hipotesis ini dinyatakan bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas besar daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas kecil. Walaupun secara matematik ada perbedaan rerata dividen, namun perbedaan ini tidak signifikan secara statistik.

Bukti empiris untuk pengujian hipotesis kelima sangat kuat. Pada saat pemegang saham pengendali terlibat dalam manajemen, perusahaan hampir tidak membayar dividen. Sebaliknya, pada saat pemegang saham pengendali tidak terlibat dalam manajemen, perusahaan membayar dividen cukup besar, yaitu sekitar 21,09%. Dengan bukti empiris yang diperleh ini dapat dinyatakan bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan terlibat dalam manajemen daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas tetapi tidak terlibat dalam manajemen.

Berbeda dari hipotesis kelima, bukti empiris terhadap pengujian hipotesis keenam justru menghasilkan arah yang terbalik. Hipotesis memprediksi bahwa dividen lebih kecil pada perusahaan yang

dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan tidak ada pemegang saham pengendali kedua di perusahaan daripada perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang memiliki *leverage* hak aliran kas dan ada pemegang saham pengendali kedua di perusahaan. Bukti empiris menunjukkan justru sebaliknya, yaitu dividen lebih besar pada saat perusahaan dikendalikan oleh pemegang saham pengendali tunggal dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali lebih dari satu.

PEMBAHASAN

Bukti empiris yang menunjukkan bahwa pembayaran dividen lebih besar apabila pemegang saham pengendali memiliki hak aliran kas yang besar menunjukkan adanya tindakan yang selaras antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham lain. Hak aliran kas merupakan insentif bagi pemegang saham pengendali untuk menyelaraskan kepentingannya dengan pemegang saham lainnya. Dengan hak aliran kas yang besar, pemegang saham pengendali tidak tertarik untuk melakukan ekspropriasi. Sejalan dengan temuan empiris oleh La Porta *et al.* (2002) bahwa ekspropriasi terlalu mahal untuk dilakukan oleh pemegang saham pengendali apabila ia memiliki hak aliran kas yang tinggi. Apabila pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi pada saat hak aliran kasnya tinggi, maka pemegang saham pengendali itu sendiri menanggung akibat buruk dari tindakan ekspropriasi yang dilakukannya. Karena tidak bersedia menanggung akibat buruk, maka pemegang saham pengendali memutuskan tidak melakukan ekspropriasi.

Hak aliran kas yang besar menunjukkan insentif untuk menghindari ekspropriasi. Namun hak kontrol yang besar tidak mesti secara otomatis berimplikasi pada tindakan ekspropriasi oleh pemegang saham pengendali melalui dividen terhadap pemegang saham nonpengendali. Hipotesis memprediksi bahwa pada saat pemegang pengendali mampu mengendalikan perusahaan, kebijakan mereka menyebabkan ekspropriasi terhadap pemegang saham nonpengendali. Prediksi ini sejalan dengan pernyataan Shleifer dan Vishny (1997), La Porta *et al.* (1999), dan Claessens *et al.* (2000a) bahwa konsentrasi hak kontrol oleh pemegang saham pengendali berimplikasi pada

ekspropriasi pemegang saham nonpengendali karena pemegang saham pengendali lebih tertarik mendapatkan keuntungan privat yang tidak diberikan kepada pemegang saham nonpengendali.

Hak kontrol tidak sepenuhnya mampu menangkap kemungkinan adanya tindakan ekspropriasi karena dalam hak kontrol belum sepenuhnya tergambar adanya peningkatan kontrol di atas hak aliran kas yang dimiliki oleh pemegang saham pengendali. Pada saat terdapat selisih lebih antara hak kontrol dari hak aliran kas, dinamai *leverage* hak aliran kas, bukti empiris yang kuat menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali melakukan ekspropriasi melalui dividen untuk memperoleh manfaat privat. Hal ini dapat diketahui dari bukti empiris bahwa perusahaan membayar dividen lebih kecil apabila pemegang saham pengendali memiliki *leverage* hak aliran kas. Sumber daya yang dapat diekspropriasi untuk memperoleh manfaat privat akan lebih besar apabila dividen dibagi lebih kecil kepada pemegang saham.

Leverage hak aliran kas merupakan insentif untuk melakukan ekspropriasi melalui dividen. Insentif tersebut semakin besar apabila pemegang saham pengendali juga merupakan bagian dari manajemen. Dengan memiliki *leverage* hak aliran kas dan juga terlibat dalam manajemen, pemegang saham pengendali semakin leluasa untuk melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya. Keleluasaan mengendalikan kebijakan perusahaan menjadi daya tarik bagi pemegang saham pengendali untuk memutuskan tidak membayar dividen. Apabila dividen tidak membayar, maka perusahaan memiliki sumber daya yang banyak untuk diekspropriasi oleh pemegang saham pengendali.

Keberadaan pemegang saham besar, pemegang saham pengendali kedua, di perusahaan diprediksi mampu membatasi tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali. Namun bukti empiris tidak mendukung dugaan ini. Ada dua kemungkinan penyebab hal ini. Pertama, jumlah perusahaan yang memiliki pemegang saham pengendali kedua cukup kecil, yaitu sekitar 13%. Jumlah yang kecil ini tidak mampu menunjukkan kekuatan yang signifikan dalam membatasi tindakan ekspropriasi pemegang saham pengendali. Kedua, ada kemungkinan pemegang saham pengendali berkoalisi dengan pemegang saham pengendali kedua. Koalisi yang terjadi adalah perolehan manfaat privat bagi semua pemegang saham besar

dengan mengekspropriasi pemegang saham nonpengendali. Dukungan terhadap dugaan ini terlihat dari pembayaran dividen yang lebih kecil apabila pemegang saham pengendali kedua ada di perusahaan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Konflik keagenan antara pemegang saham pengendali dengan pemegang saham nonpengendali merupakan realitas yang sulit dipungkiri. Hal ini terlihat dari bukti empiris bahwa *leverage* hak aliran kas digunakan oleh pemegang saham pengendali untuk memperoleh manfaat privat melalui kebijakan dividen. Insentif melakukan ekspropriasi semakin besar apabila pemegang saham pengendali juga terlibat dalam manajemen perusahaan. Namun di sisi lain, hak aliran kas membatasi tindakan ekspropriasi ini. Pemegang saham pengendali tidak tertarik melakukan ekspropriasi melalui dividen apabila ia memiliki hak aliran kas yang tinggi karena tindakan ekspropriasi tersebut dapat merugikan dirinya sendiri.

Saran

Dua keterbatasan penelitian ini yang dapat dijadikan perbaikan untuk penelitian selanjutnya terkait dengan identifikasi pemegang saham pengendali dan dokumentasi tindakan ekspropriasi. Identifikasi pemegang saham pengendali semata-mata dilakukan melalui identifikasi kesamaan nama belakang, kesamaan alamat rumah, dan adanya hubungan perkawinan. Identifikasi pemegang saham pengendali dapat ditingkatkan apabila data yang lebih komprehensif terkait dengan hubungan keluarga antar-pemegang saham tersedia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pengujian pembayaran dividen dengan konsentrasi kepemilikan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya ekspropriasi tanpa menggunakan data tentang tindakan ekspropriasi itu sendiri. Pengujian akan lebih *robust* apabila data tentang tindakan ekspropriasi benar-benar tersedia.

DAFTAR PUSTAKA

- Berle, Adolph dan Means, Gardiner. 1932. *The Modern Corporation and Private Property*. MacMillan, New York, N.Y.
- Brickley, J.A.; Lease, R.C., dan Smith, C.W. 1988. "Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amendments." *Journal of Financial Economics*. No. 20: 267-291.
- Carvalho-da-Silva, Andre dan Leal, Ricardo. 2004. "Corporate Governance, Market Valuation, and Dividend Policy in Brazil." Working Paper of COPPEAD Graduate Business School Federal University of Rio de Janeiro.
- Chen, C.R. dan Steiner, T.L. 1999. "Managerial Ownership and Agency Conflicts: A Nonlinear Simultaneous Equation Analysis of Managerial Ownership, Risk Taking, Debt Policy, and Dividend Policy." *Financial Review*. No. 34: 119-136.
- Claessens, Stijin, Djankov, Simeon, Fan, Joseph, dan Lang, Larry. 2000b. "Expropriation of Minority Shareholders: Evidence from East Asia. Policy Research Working Paper 2000, The World Bank.
- Claessens, Stijin, Djankov, Simeon, dan Lang, Larry H.P. 2000a. "The Separation of Ownership and Control in East Asian Corporations." *Journal of Financial Economics*. Vol. 58: 81-112.
- Crutchley, C.E., Jensen, M.R.H., Jahera, J.S., dan Raymond, J.E. 1999. "Agency Problem and the Simultaneity of Financial Decision Making: the Role of Institutional Ownership." *International Review of Financial Analysis*. No. 8/2: 177-197.
- Dyck, Alexander dan Zingales, Luigi. 2002. "Privat Benefits of Control: An International Comparison. NBER Working Paper No. 8711.
- Easterbrook, Frank. 1984. "Two Agency Cost Explanations of Dividends." *American Economic Review*. Vol. 74, No. 4: 650-659.
- Edwards, Jeremy S.S. dan Weichenrieder. 2003. "Ownership Concentration and Share Valuation: Evidence from Germany." CESifo Working Paper No. 193.
- Faccio, Mara; Lang, Larry H.P.; dan Young, Leslie. 2001. "Dividends and Expropriation." *American Economic Review*. Vol. 91, No. 1: 55-79.
- Faccio, Mara dan Lang, Larry H.P. 2002. "The Ultimate Ownership of Western European Corporations." *Journal of Financial Economics*. Vol. 65: 365-395.
- Gilson, Ronald J. dan Gordon, Jeffrey N. 2003. "Controlling Shareholders." Columbia Law School Working Paper No. 228.
- Gugler, Klaus dan Yurtoglu, Burcin. 2003. "Corporate Governance and Dividend Pay-out Policy in Germany." *European Economic Review*. No. 47: 731-758.
- Jensen, G.A., Solberg, D.P., dan Zorn, T.S. 1992. "Simultaneous Determination of Insider Ownership, Debt, and Dividend Policies." *Journal of Financial and Quantitative Analysis*. No. 27: 247-263.
- Jensen, Michael C. dan Meckling, William H. 1976. "Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics*. Vol. 3: 305-360.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio; Shleifer, Andrei. 1999. "Corporate Ownership Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 54, No. 2: 471-517.
- La Porta, Rafael; Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei; dan Vishny, Robert. 2000. "Agency Problems and Dividend Policies Around the World." *Journal of Finance*. Vol. 55: 1-33.
- La Porta, Rafael, Lopez-de-Silanes, Florencio, Shleifer, Andrei, dan Vishny, Robert. 2002. "Investor Protection and Corporate Valuation." *Journal of*

- Finance*. Vol. 57, No. 3: 3-27.
- Lefort, Fernando dan Walker, Eduardo. 2005. "The Effect of Corporate Governance Practice on Company Market Valuation and Payout Policy in Chile." Working Paper of Pontificia Universidad Catolica de Chile.
- Morck, Randall; Wolfenzon, Daniel; dan Yeung, Bernard. 2004. "Corporate Governance, Economic Entrenchment, and Growth." NBER Working Paper No. 10692.
- Noronha, G.M.; Shome, D.K.; dan Morgeran, G.E. 1996. "The Monitoring Rationale for Dividends and the Interactions of Capital Structure and Dividends Decision". *Journal of Banking and Finance*. April: 439-454.
- PSAK 4. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 4 tentang Laporan Keuangan Konsolidasi.
- PSAK 7. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 7 tentang Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- PSAK 22. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 22 tentang Akuntansi Penggabungan Usaha.
- PSAK 38. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 38 tentang Akuntansi Restrukturisasi Entitas Sepengendali.
- Shleifer, Andrei dan Vishny, Robert W. 1994. "Politicians and Firms." *Quarterly Journal of Economics*. No. 109: 995-1025.
- Shleifer, Andrei dan Vishny, Robert W. 1997. "A Survey of Corporate Governance." *Journal of Finance*. Vol. 52 No. 2: 737-783.
- Yurtoglu, B. Burci. 2003. "Corporate Governance and Implications for Minority Shareholders in Turkey." *Corporate Ownership & Control*. Vol. 1, No. 1: 72-86.
- Zhang, Rongrong. 2005. "The Effects of Firm and Country Level Governance Mechanisms on Dividend Policy, Cash Holding, and Firm Value: A Cross Country Study." Working Paper of The University of Tennessee.

INDEKS PENULIS DAN ARTIKEL JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

Vol. 16, No. 1, April 2005

Lo, Eko Widodo, pp. 1-10, Penjelasan Teori Prospek Terhadap Manajemen Laba

Tjahyono, Heru Kurnianto, pp. 11-24, Peran Kepemimpinan Sebagai Variabel Pemoderasian Hubungan Budaya Organisasional dengan Keefektifan Organisasional (Studi pada Perguruan Tinggi Swasta di Propinsi DIY)

Astuti, Sri dan M. Hanad Hainafi, pp. 250-34, Pengaruh Laporan Auditor Dengan Modifikasi *Going Concern* Terhadap *Abnormal Accrual*

Siregar, Baldric dan Twenty Selvia Sari Sianturi, pp. 35-49, ; Reaksi Pasar Modal Terhadap Hasil Pemilihan Umum dan Pergantian Pemerintahan Tahun 2004

Prajogo, Wisnu, pp. 51-65, Pengaruh Pemediasian *Trust* Dalam Hubungan Kepemimpinan Transformasional dan *Organizational Citizenship Behavior*

Widiastuti, Sri Wahyuni dan Sri Suryaningrum, pp. 67-77, Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA)

Vol. 16, No. 2, Agustus 2005

Heriningsih, Sucahyo, Sri Suryaningrum, Windyastuti, pp. 79-91, *Pengaruh Kecerdasan Emosional pada Pemahaman Pengetahuan Akuntansi di Tingkat Pengantar dengan Penalaran dan Pendekatan Sistem*

Susanto, Djoko dan Baldric Siregar, pp. 93-105, *Peran Saling Melengkapi Laba dan Arus Kas Operasi dalam Menjelaskan Variasi Return Saham*

Rahdi, Fahmy, pp. 107-119, *Industry Policy and Technology Transfer: Review and Analysis of The Indonesian Automotive Industry During New Orde Era*

Yudiarti, Fr. Ninik dan Eko Widodo Lo, pp. 121-127, *Pengaruh Framing; Pertanggungjawaban, dan Jenis Kelamin dalam Keputusan Investasi Tambahan: Keputusan Individual dan Grup*

Asakdiyah, Salamaton, pp. 129-139, *Analisis Hubungan Antara Kualitas Pelayanan dan Kepuasan Pelanggan dalam Pembentukan Intensi Pembelian Konsumen Matahari Group di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Saputro, Julianto Agung, pp. 141-152, *Konsep dan Pengukuran Investment Opportunity Set Serta Pengaruhnya pada Proses Kontrak*

Vol. 16, No. 3, Desember 2005

Ciptono, Wakhid Slamet, pp. 153-171, *The Critical Success Factors Of Tqm Underlying The Deming Management Method: Evidence From The Indonesia's Oil and Gas Industry*

Lo, Eko Widodo, pp. 173-181, *Manajemen Laba: Suatu Sistesa Teori*

Sanjaya, I Putu Sugiarta, pp. 183-193, *Analisis Pengaruh Akrua Diskresioner Terhadap Return Saham Bagi Perusahaan-Perusahaan yang Diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four dan Non-Big Four*

Sudarini, Sinta dan Silisia Mita Alloy, pp. 195-207, *Penggunaan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Laba Pada Masa yang Akan Datang (Studi Kasus di Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)*

Winarso, Beni Suhendra, pp. 209-218, *Analisis Empiris Perbedaan Kinerja Keuangan Antara Perusahaan yang Melakukan Stock Split dengan Perusahaan yang Tidak Melakukan Stock Split Pengujian The Signaling Hypothesis*

Siregar, Baldric, pp. 219-230, *Hubungan antara Dividen, Leverage Keuangan, dan Investasi*

Vol. 17, No. 1, April 2006

Nurim, Yavida, pp. 1-10, *Pengaruh Karakteristik Pembuat Judgment dalam Prediksi Failure Perusahaan*

Kusuma, Deden Iwan, pp. 11-24, *Studi Empiris Pemilihan Metode Akuntansi pada Perusahaan yang Melaksanakan Akuisisi di Indonesia*

Yunani, Akhmad, pp. 25-40, *Perancangan Model Sales Force Automation (SFA) dalam Rangka Menunjang Customer Relationship Management (CRM): Studi Kasus pada PT Pos Indonesia (Persero)*

Suripto, Bambang, pp. 41-56, *Praktik Pelaporan Keuangan dalam Web Site Perusahaan Indonesia*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 57-78, *Kajian Usaha Ternak Kambing dalam Rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Sleman*

Dongoran, Johnson, pp. 79-92, *Pengaruh Sikap Kerja Terhadap Kinerja pada Hotel Bintang di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta*

Vol. 17, No. 2, Agustus 2006

Sri Darma, Gede, pp. 93-117, *Employee Perception of The Impact of Information Technology Investment in Organizations: A Survey of The Hotel Industry*

Hapsoro, Dody, pp. 119-135, *Pengaruh Transparansi Terhadap Konsekuensi Ekonomik: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Indahwati, Weliana dan Erni Ekawati, pp. 137-152, *Relevansi dan Reliabilitas Nilai Informasi Akuntansi Goodwill di Indonesia*

Rahmawati, pp. 153-169, *Hubungan Nonlinier antara Earnings dan Nilai Buku dengan Kinerja Saham*

Siswanti, Yuni, pp. 171-180, *Alliance Experience, Alliance Capability, Function Alliance Dedicated dan Alliance Learning dalam Aliansi Strategik untuk Meraih Kesuksesan Jangka Panjang di Era Kompetisi Global*

Widjaya, NH Setiadi, pp. 181-196, *Pengaruh Komponen Komitmen Organisasi pada Hubungan Persepsi Kaitan Kinerja-Gaji dan Organizational Citizenship Behavior*

Vol. 17, No. 3, Desember 2006

Arsyad, Lincoln, pp. 197-218, *A Process of Creating Business Plan for Microfinance Institution: Case Study of LPD Mas, Gianyar, Bali*

Hapsoro, Dody, pp. 219-234, *Pengaruh Struktur Pengelolaan Korporasi Terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Sri Darma, Gede, pp. 235-255, *The Impact of Information Technology Investment on The Hospitality Industry*

Sulistiyani, Tina, pp. 257-267, *Analisis Perilaku Brand Switching Produk Air Minum Mineral di Daerah Istimewa Yogyakarta*

Siregar, Baldric, pp. 269-282, *Determinan Risiko Ekspropriasi*

Bawono, Icuk Rangga, dkk., pp. 283-294, *Persepsi Mahasiswa S1 Akuntansi Reguler Tentang Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) (Studi Kasus Pada Perguruan Tinggi Negeri di Purwokerto, Jawa Tengah)*

Vol. 18, No. 1, April 2007

Kartikasari, Lisa, pp. 1-9, *Pengaruh Variabel Fundamental terhadap Risiko Sistematis pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEJ*

Norpratiwi, Agustina M.V., pp. 9-22, *Analisis Korelasi Investment Opportunity Set terhadap Return Saham pada Saat Pelaporan Keuangan Perusahaan*

Rahmawati, pp. 23-34, *Model Pendeteksian Manajemen Laba pada Industri Perbankan Publik di Indonesia dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Perbankan*

Dewi, Sherly Friska dan Eko Widodo Lo, pp. 35-42, *Hubungan Sinyal-Sinyal Fundamental dengan Harga Saham*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 43-50, *Analisis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD): Kasus APBD Kabupaten Sleman dan Kulonprogo Tahun 2004 dan 2005*

Suranto, Anto, pp. 51-64, *Hubungan Antara Sikap dan Perilaku Pejabat Public Relations dengan Efeknya dalam Kinerja (Studi Hubungan antara Sikap Terhadap Penerapan Budaya Korporat dan Perilaku Penerapan Budaya Korporat dengan Efeknya dalam Kinerja Pejabat Public Relations Perbankan Swasta Nasional Anggota Perbanas)*

Vol. 18, No. 2, Agustus 2007

Hapsoro, Dody, pp. 65-85, *Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Transparansi: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia*

Ningsih, Dwi Astuti dan Wakhid Slamet Ciptono, pp. 87-98, *Going Beyond Corporate Social Responsibility: The Critical Factors of Corporate Social Innovation—An Empirical Study*

Lako, Andreas, pp. 99-113, *Relevansi Nilai Informasi Akuntansi untuk Pasar Saham: Problema dan Peluang Riset*

Tjahjono, Heru Kurnianto, pp. 115-125, *Validasi Item-Item Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural: Aplikasi Structural Equation Modeling dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA)*

Indriyo, St. Mahendra Soni, pp. 127-134, *Reorientasi Kepentingan Korporasi dari Share-holders ke Stakeholders untuk Menjawab Tantangan Globalisasi di Masa Depan*

Rahardja, Conny Tjandra dan N.H. Setiadi Widjaya, pp. 135-148, *Manajemen Stres: Bagaimana Menghidupi Stres untuk Mencapai Keefektifan Organisasi*

Vol. 18, No. 3, Desember 2007

Hery dan Merrina Agustiny, pp. 149-161, *Pengaruh Pelaksanaan Etika Profesi Terhadap Pengambilan Keputusan Akuntan Publik (Auditor)*

Suhartini dan Putri Yusiyanti, pp. 163-177, *Pengaruh Motivasi Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan PDAM Tirtamarta Yogyakarta (Pendekatan Teori Ekspektansi Victor Vroom)*

Supriyanto, Y., pp. 179-198, *Kritik Terhadap Kinerja Pendekatan Profitability Index dan Pendekatan Net Present Value untuk Memilih Sejumlah Proyek Independen dalam Capital Rationing*

Khasanah, Mufidhatul, pp. 199-208, *Analisis Ekonomi-Politik Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sleman dan Bantul Tahun 2004 dan 2005*

Sani, Usman dan Istiqomah Istiqomah, pp. 209-221, *Analisis Experiential Marketing Sabun Lux "Beauty Gives You Super Powers"*

Suripto, Bambang, pp. 223-236, *Atribusi Kinerja oleh Manajemen dalam Industri yang Diregulasi: Pengujian Empiris Teori Atribusi dalam Laporan Tahunan Industri Perbankan di Indonesia*

Vol. 19, No. 1, April 2008

Afifurrahman, Wahid dan Dody Hapsoro, pp. 1-14, *Pengaruh Pengungkapan Sukarela Melalui Web Site terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*

Fachrunnisa, Olivia, pp. 15-23, *Perbedaan Gender dalam Penggunaan Gaya Kepemimpinan Transformasional: Suatu Pengujian dari Perspektif Atasan, Bawahan, Rekan Kerja, dan Diri Sendiri*

Prajogo, Wisnu, pp. 25-38, *Pengaruh Kepemimpinan dan Kepribadian pada Modal Sosial serta Dampaknya pada Kinerja*

Djamaluddin, Subekti dan Rahmawati, pp. 39-50, *Kandungan Informasi Komponen-Komponen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*

Fajar, Siti Al, pp. 51-62, Kepemimpinan Transformasional: Keterkaitannya dengan Tipe Kepribadian Berupa *Behavioral Coping* dan *Emotional Coping*

Hery, pp. 63-70, Peran Normatif dan Upaya Peningkatan Citra *Auditor* Internal, serta Keikutsertaannya dalam Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance*

Vol. 19, No. 2, Agustus 2008

Hadi, Pramono, pp. 71-77, *An Economic Valuation Of Turtle Conservation Efforts In Riau Case On Tambelan Island At 2006-2007*

Noormansyah, Irvan, pp. 79-87, *Studies In Management Accounting Control Systems In Less Developed Countries*

Giri, Efraim Ferdinan, pp. 89-102, Pengaruh Kebijakan Pembayaran Dividen Terhadap Informasi Asimetri di Bursa Efek Indonesia

Nugraha, Albert Kristian Novi Adhi, pp. 103-111, *The External Variables, Perceived Ease of Use and Perceived Usefulness Toward The Use of Sikasa 2.0 Software: A Survey of Employees in Satya Wacana Christian University*

Utomo, Semcesen Budiman dan Baldric Siregar, pp. 113-125, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan Kontrol Kepemilikan terhadap Perataan Laba pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Hardani, Rahmat Purbandono, pp. 127-137, Pengaruh Strategi dan Taktik terhadap Kesuksesan Tahap Operasionalisasi Proyek

Vol. 19, No. 3, Desember 2008

Djamaluddin, Subekti, Rahmawati, dan Handayani Tri Wijayanti, pp. 139-153, Analisis Perubahan Aktiva Pajak Tangguhan dan Kewajiban Pajak Tangguhan untuk Mendeteksi Manajemen Laba

Hapsoro, Dody, pp. 155-172, Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* terhadap Kinerja Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia

Wulandari, Cynthia dan Shanti, pp. 173-183, Pengaruh Pengungkapan Sukarela terhadap Asimetri Informasi pada Perusahaan Perbankan yang *Go Public* di PT. Bursa Efek Indonesia

Kristina, Batsyeba Maria dan Baldric Siregar, pp. 185-196, Pengaruh Manajemen Laba Nyata terhadap Kinerja.

Bawono, Icuk dan Rangga, pp. 197-207, Persepsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pembantu Pemegang Uang Muka Kerja (PPUMK) terhadap Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Langsung (LS): Studi pada Pendidikan Tinggi Negeri Universitas Jenderal Soedirman

Adhilla, Fitroh, pp. 209-228, Analisis Manfaat Sosial dan Fungsional yang Diperoleh Konsumen dari Hubungan yang Terjalin dengan Pramuniaga

Vol. 20, No. 1, April 2009

Setyomurni, Retno dan Tony Wijaya, pp. 1-11, Pengaruh *Computer Anxiety* terhadap Keahlian *Novice Accountant* dalam Menggunakan Komputer: Gender dan *Locus Of Control* sebagai Faktor Moderasi

Hapsoro, Dody, pp. 13-24, Pengaruh Transparansi terhadap Nilai Perusahaan: Studi Empiris di Pasar Modal Indonesia

Noormansyah, Irvan, pp. 25-34, *Management Control Systems and The Deregulation In The Higher Education Sector: A Review of Literature*

Suryawati, pp. 35-46, Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Tekstil dan Pakaian Jadi di Provinsi DIY

Pramuka, Bambang Agus dan Wiwiek Rabiatul Adawiyah, pp. 47-60, Persepsi Pengguna terhadap Mutu Layanan Perpustakaan (*Libqual*) Perguruan Tinggi di Kabupaten Banyumas

Yuliana, Christina, pp. 61-67, Kajian Pustaka terhadap Teori Agensi dan Akuntansi Manajemen

Vol. 20, No. 2, Agustus 2009

Nursiah dan Fahmy Radhi, pp. 69-77, Pengaruh Penerapan Strategi Inovasi Terhadap Kinerja Operasional

Atuti, Sri, pp. 79-87, Independensi *Auditor* Setelah Pemberlakuan *Sarbanes-Oxley Act* Di Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Eefek Jakarta (BEI)

Giri, Efraim Ferdinan, pp. 89-106, Pelaporan Laba Komprehensif Dan Implikasinya Dalam Praktik

Kiswara, Endang, pp. 107-117, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Oleh Perusahaan Multinasional Di Indonesia

Vol. 22, No. 3, Desember 2011

ISSN: 0853-1259

JURNAL
AKUNTANSI & MANAJEMEN

Tahun 1990

Kusreni, Sri dan Didin Fatihudin, pp. 119-132, Pergeseran Penyerapan Tenaga Kerja Pasca Lapindo Sidoarjo Dan Upaya Penyelesaiannya

Fajar, Siti Al, pp. 1330-139, Penerapan *Total Quality Service* Sebagai Upaya Mencapai Loyalitas *Customer*

Vol. 20 No. 3, Desember 2009

Wijaya, Okie Indra, Yasmin Umar Assegaf, dan Rahmawati, pp. 141-156, Pengaruh Kualitas Audit Dan *Proxy Going Concern* Terhadap Opini Audit *Going Concern* Pada Perusahaan Non Regulasi Di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Wardani, Rima Aguatania Kusuma dan Baldric Siregar, pp. 157-174, Pengaruh Aliran Kas Bebas Terhadap Nilai Pemegang Saham Dengan Set Kesempatan Investasi Dan Dividen Sebagai Variabel Moderator

Alogifari, pp. 175-182, Inflasi Kelompok Bahan Makanan Dengan Metode *Box-Jenkins*: Kasus Indonesia, 2006:1 – 2009:8

Sarwoko, pp. 183-193, Model Estimasi Permintaan Pariwisata Ke Indonesia Dengan Pendekatan *Co-Integration* Dan *Error Correction Model*

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando, pp. 195-218, Estimasi Harga Opsi Saham Di Bursa Efek Indonesia (BEI): Studi Kasus Saham LQ-45

Wijaya, Tony, pp. 219-229, Hubungan Atribut Iklan Bersambung *Ponds Flawless White* Di Televisi Dengan Respon Pemirsa

Vol. 21 No. 1, April 2010

Pangeran, Perminas, pp. 1-16, Pemilihan Sekuritas Dan Arah Kebijakan Struktur Modal: *Pecking Order* Ataupun *Static-Tradeoff*?

Budiyanti, Maria Susilowati, pp. 17-29, Pengaruh Investasi, Kepemilikan Manajerial, Dan *Leverage* Operasi Terhadap Hubungan Interdependensi Antara Kebijakan Dividen Dengan Kebijakan *Leverage* Keuangan

Safithri, Anny Laila dan Baldric Siregar, pp. 31-43, *Herding* Pada Keputusan Struktur Modal

Shanti, J.C. pp. 45-58, Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan-Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Sebelum Dan Sesudah Pembayaran Dividen Kas

Setiawan dan Rudy Badrudin, pp. 59-79, Kontribusi Industri Telekomunikasi Selular Terhadap Perekonomian Negara

Astuti, Tri, pp. 81-104, Analisis Pengaruh Pengumuman Laporan Keuangan Terhadap *Return Saham* Di Bursa Efek Jakarta (BEJ)

Vol. 21 No. 2, Agustus 2010

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando, pp. 105-127, *Value At Risk Portofolio* Dan Likuiditas Saham

Prasasti, Hestu dan Baldric Siregar, pp. 129-151, Pola Atribusi Perusahaan Publik Di Indonesia

Susiati, Retno, pp. 153-170, Kontribusi Penyertaan Modal Bank Perkreditan Rakyat "Bank Pasar" Sleman Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2001-2005

Sarwoko, pp. 171-179, Peranan Sektor Pariwisata Terhadap Perekonomian Indonesia

Eveline, Farida, pp. 181-198, Pengaruh *Adverse Selection*, Pembungkahan Negatif, Dan *Self Efficacy* Terhadap Eskalasi Komitmen Proyek Investasi Yang Tidak Menguntungkan

Wahyuningrum, Dwi Asih, pp. 199-216, Analisis Dewan Direksi, Dewan Komisaris, *Cross-Directorships* Dewan, Dan Indikasi Manajemen Laba

Vol. 21 No. 3, Desember 2010

Pasaribu, Rowland Bismark Fernando Pasaribu, pp. 217-230, Pemilihan Model *Asset Pricing*

Radhi, Fahmy, pp. 231-242, Pengaruh Lingkungan Bisnis, Aliansi Stratejik, dan Strategi Inovasi terhadap Kinerja Perusahaan

Badrudin, Rudy, pp. 243-263, Rasio Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi DIY Pasca Otonomi Daerah

Annas, Muflikhun, pp. 265-284, Pengaruh Kinerja Keuangan Perusahaan terhadap *Return Saham* dengan Perilaku *Herding* sebagai Variabel Mediasi

Siregar, Baldric, pp. 285-295, Utang dan Divergensi Hak Kontrol dari Hak Aliran Kas

Utami, Indah Dewi Utami dan Rahmawati, pp. 297-306, Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Asing, dan Umur Perusahaan terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure* pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Vol. 22 No. 1, April 2011

Hendarto, Kresno Agus, pp. 1-22, *Corporate Social Responsibility In Indonesia's National Press Context: A Preliminary Study*

Wasiaturrahma, pp. 23-38, Komparasi Efektivitas Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal Jangka Pendek dan Jangka Panjang dalam Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Badrudin, Rudy, pp. 39-66, Pengaruh Belanja Modal pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah

Wijayanti, Handayani Tri, pp. 67-83, Pengaruh *Corporate Social Responsibility* dan Manajemen Laba terhadap Kinerja Keuangan dan Nilai Perusahaan

Sarwoko, pp. 85-94, Stasionaritas Produk Domestik Bruto Riil Perkapita dari Lima Besar Negara Asal Wisatawan Mancanegara ke Indonesia, Tahun 1970-2009

Prajoga, Wisnu, pp. 95-106, Pengaruh Kepribadian (Taksonomi *Big Five Personality*) pada Kinerja *In-Role* dan *Extra-Role* Karyawan

Vol. 22 No. 2, Agustus 2011

Wiradinata, Jeffy dan Baldric Siregar, pp.107-124, Pengaruh Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan pada Perusahaan Sektor Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Pangeran, Perminas, pp.125-141, Laba Permanen dan Perilaku Dividen: Pengujian Kembali Model Garrett dan Priestley di Bursa Efek Indonesia

Purnamawati, Astuti, pp.143-157, Model Keseimbangan Pertumbuhan Ekonomi dan Defisit Anggaran Pemerintah (Kasus Indonesia, Tahun 1985-2009)

Handayani, Puji, pp.159-169, Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi Sosial Perusahaan: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tergolong *High Profile* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Rahyuda, Henny, pp.171-180, Pengaruh Uang Beredar terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia Periode 1998:1-2009:12

Setyowati, Endang, pp.181-192, Analisis Empiris Netralitas Uang di Indonesia

PEDOMAN PENULISAN JURNAL AKUNTANSI & MANAJEMEN

Ketentuan Umum

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sesuai dengan format yang ditentukan.
2. Penulis mengirim tiga eksemplar naskah dan satu *compact disk* (CD) yang berisikan naskah tersebut kepada redaksi. Satu eksemplar dilengkapi dengan nama dan alamat sedang dua lainnya tanpa nama dan alamat yang akan dikirim kepada mitra bestari. Naskah dapat dikirim juga melalui *e-mail*.
3. Naskah yang dikirim belum pernah diterbitkan di media lain yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh semua penulis bahwa naskah tersebut belum pernah dipublikasikan. Pernyataan tersebut dilampirkan pada naskah.
4. Naskah dan CD dikirim kepada *Editorial Secretary*
Jurnal Akuntansi & Manajemen (JAM)
Jalan Seturan Yogyakarta 55281
Telpon (0274) 486160, 486321 ext. 1332 • Fax. (0274) 486155
e-mail: rudy.badrudin@stieykpn.ac.id

Standar Penulisan

1. Naskah diketik menggunakan program *Microsoft Word* pada ukuran kertas A4 berat 80 gram, jarak 2 spasi, jenis huruf Times New Roman berukuran 12 *point*, margin kiri 4 cm, serta margin atas, kanan, dan bawah masing-masing 3 cm.
2. Setiap halaman diberi nomor secara berurutan. Gambar dan tabel dikelompokkan bersama pada lembar terpisah di bagian akhir naskah.
3. Angka dan huruf pada gambar, tabel, atau histogram menggunakan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 *point*.
4. Naskah ditulis maksimum sebanyak 15 halaman termasuk gambar dan tabel.

Urutan Penulisan Naskah

1. Naskah hasil penelitian terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Materi dan Metode, Hasil, Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
2. Naskah kajian pustaka terdiri atas Judul, Nama Penulis, Alamat Penulis, Abstrak, Pendahuluan, Masalah dan Pembahasan, Ucapan Terima Kasih, dan Daftar Pustaka.
3. Judul ditulis singkat, spesifik, dan informatif yang menggambarkan isi naskah maksimal 15 kata. Untuk kajian pustaka, di belakang judul harap ditulis Suatu Kajian Pustaka. Judul ditulis dengan huruf kapital dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 14 *point*, jarak satu spasi, dan terletak di tengah-tengah tanpa titik.
4. Nama Penulis ditulis lengkap tanpa gelar akademis disertai alamat institusi penulis yang dilengkapi dengan nomor kode pos, nomor telepon, fax, dan *e-mail*.

5. Abstrak ditulis dalam satu paragraf tidak lebih dari 200 kata menggunakan bahasa Inggris. Abstrak mengandung uraian secara singkat tentang tujuan, materi, metode, hasil utama, dan simpulan yang ditulis dalam satu spasi.
6. Kata Kunci (*Keywords*) ditulis miring, maksimal 5 (lima) kata, satu spasi setelah abstrak.
7. Pendahuluan berisi latar belakang, tujuan, dan pustaka yang mendukung. Dalam mengutip pendapat orang lain dipakai sistem nama penulis dan tahun. Contoh: Badrudin (2006); Subagyo dkk. (2004).
8. Materi dan Metode ditulis lengkap.
9. Hasil menyajikan uraian hasil penelitian sendiri. Deskripsi hasil penelitian disajikan secara jelas.
10. Pembahasan memuat diskusi hasil penelitian sendiri yang dikaitkan dengan tujuan penelitian (pengujian hipotesis). Diskusi diakhiri dengan simpulan dan pemberian saran jika dipandang perlu.
11. Pembahasan (*review/kajian* pustaka) memuat bahasan ringkas mencakup masalah yang dikaji.
12. Ucapan Terima Kasih disampaikan kepada berbagai pihak yang membantu sehingga penelitian dapat dilangsungkan, misalnya pemberi gagasan dan penyandang dana.
13. Ilustrasi:
 - a. Judul tabel, grafik, histogram, sketsa, dan gambar (foto) diberi nomor urut. Judul singkat tetapi jelas beserta satuan-satuan yang dipakai. Judul ilustrasi ditulis dengan jenis huruf Times New Roman berukuran 10 point, masuk satu tab (5 ketukan) dari pinggir kiri, awal kata menggunakan huruf kapital, dengan jarak 1 spasi
 - b. Keterangan tabel ditulis di sebelah kiri bawah menggunakan huruf Times New Roman berukuran 10 point jarak satu spasi.
 - c. Penulisan angka desimal dalam tabel untuk bahasa Indonesia dipisahkan dengan koma (,) dan untuk bahasa Inggris digunakan titik (.).
 - d. Gambar/Grafik dibuat dalam program Excel.
 - e. Nama Latin, Yunani, atau Daerah dicetak miring sedang istilah asing diberi tanda petik.
 - f. Satuan pengukuran menggunakan Sistem Internasional (SI).
14. Daftar Pustaka
 - a. Hanya memuat referensi yang diacu dalam naskah dan ditulis secara alfabetik berdasarkan huruf awal dari nama penulis pertama. Jika dalam bentuk buku, dicantumkan nama semua penulis, tahun, judul buku, edisi, penerbit, dan tempat. Jika dalam bentuk jurnal, dicantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, nama jurnal, volume, nomor publikasi, dan halaman. Jika mengambil artikel dalam buku, cantumkan nama penulis, tahun, judul tulisan, editor, judul buku, penerbit, dan tempat.
 - b. Diharapkan dirujuk referensi 10 tahun terakhir dengan proporsi pustaka primer (jurnal) minimal 80%.
 - c. Hendaknya diacu cara penulisan keustakaan seperti yang dipakai pada JAM/JEB berikut ini:

Jurnal

Yetton, Philip W., Kim D. Johnston, and Jane F. Craig. Summer 1994. "Computer-Aided Architects: A Case Study of IT and Strategic Change." *Sloan Management Review*. 57-67.

Buku

Paliwoda, Stan. 2004. *The Essence of International Marketing*. UK: Prentice-Hall, Ince.

Prosiding

Pujaningsih, R.I., Sutrisno, C.L., dan Sumarsih, S. 2006. Kajian kualitas produk kakao yang diamoniasi dengan aras urea yang berbeda. Di dalam: *Pengembangan Teknologi Inovatif untuk Mendukung Pembangunan Peternakan Berkelanjutan. Prosiding Seminar Nasional* dalam Rangka HUT ke-40 (Lustrum VIII) Fakultas Peternakan Universitas Jenderal Soedirman; Purwokerto, 11 Pebruari 2006. Fakutas Peternakan UNSOED, Purwokerto. Halaman 54-60.

Artikel dalam Buku

Leitzmann, C., Ploeger, A.M., and Huth, K. 1979. The Influence of Lignin on Lipid Metabolism of The Rat. In: G.E. Inglett & S.I.Falkehag. Eds. *Dietary Fibers Chemistry and Nutrition*. Academic Press. INC., New York.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Assih, P. 2004. Pengaruh Kesempatan Investasi terhadap Hubungan antara Faktor Faktor Motivasional dan Tingkat Manajemen Laba. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana S-3 UGM. Yogyakarta.

Internet

Hargreaves, J. 2005. Manure Gases Can Be Dangerous. Department of Primary Industries and Fisheries, Queensland Government. <http://www.dpi.qld.gov.au/pigs/9760.html>. Diakses 15 September 2005.

Dokumen

[BPS] Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman. 2006. Sleman Dalam Angka Tahun 2005.

Mekanisme Seleksi Naskah

1. Naskah harus mengikuti format/gaya penulisan yang telah ditetapkan.
2. Naskah yang tidak sesuai dengan format akan dikembalikan ke penulis untuk diperbaiki.
3. Naskah yang sesuai dengan format diteruskan ke *Editorial Board Members* untuk ditelaah diterima atau ditolak.
4. Naskah yang diterima atau naskah yang formatnya sudah diperbaiki selanjutnya dicarikan penelaah (MITRA BESTARI) tentang kelayakan terbit.
5. Naskah yang sudah diperiksa (ditelaah oleh MITRA BESTARI) dikembalikan ke *Editorial Board Members* dengan empat kemungkinan (dapat diterima tanpa revisi, dapat diterima dengan revisi kecil (*minor revision*), dapat diterima dengan revisi *mayor* (perlu direview lagi setelah revisi), dan tidak diterima/ditolak).
6. Apabila ditolak, *Editorial Board Members* membuat keputusan diterima atau tidak seandainya terjadi ketidaksesuaian di antara MITRA BESTARI.
7. Keputusan penolakan *Editorial Board Members* dikirimkan kepada penulis.
8. Naskah yang mengalami perbaikan dikirim kembali ke penulis untuk perbaikan.
9. Naskah yang sudah diperbaiki oleh penulis diserahkan oleh *Editorial Board Members* ke *Managing Editors*.
10. Contoh cetak naskah sebelum terbit dikirimkan ke penulis untuk mendapatkan persetujuan.
11. Naskah siap dicetak dan cetak lepas (*off print*) dikirim ke penulis.